

Dr. ZAINUL ABAS, M.Ag.

STUDI AGAMA

Kajian Dialog Antar Agama



EFUDEPRESS
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Surakarta

STUDI AGAMA

Kajian Dialog Antar Agama

© Dr. Zainul Abas, M.Ag. 2020.

All Right Reserved

Diterbitkan oleh:

EFUDEPRESS

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta

Jl. Pandawa Pucangan Dusun IV Kartasura

Sukoharjo Jawa Tengah

Telp. 0271-784098, 0856 2856 260

Penulis:

Dr. Zainul Abas, M.Ag.

Tata Letak:

LinkMed Pro Jogja

Tata Sampul

cetakjogja.id

Cetakan I, Agustus 2020

viii + 154 halaman, 16 x 24 cm

ISBN : 978-623-94204-8-2

Kutipan Pasal 72:

**Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 19 Tahun 2002)**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penulisan karya ini. Dalam buku ini penulis mengambil fokus tentang pengkajian dialog antar agama baik secara teoretik maupun praktik. Tulisan ini juga bermaksud memberikan kontribusi pemikiran secara teoretik bagaimana membangun dialog antar agama di Indonesia untuk mengantisipasi ancaman konflik sosial (konflik antar agama) yang berpotensi muncul di negara kita ini.

Sebagian bahan dasar buku ini adalah berasal dari penelitian tesis penulis semasa mengambil program magister di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Dialog Antar Agama di Indonesia: Kajian terhadap Paradigma Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia”. Di dalam tesis tersebut dikaji berbagai pemikiran cendekiawan muslim Indonesia dengan tampilan urutan tokoh-tokoh secara monoton. Namun demikian, tidak semuanya diambil apa adanya, tetapi poin-poin pemikiran atau konsepnya secara tematiknya saja dan ditambah dengan bahan-bahan yang lain. Dalam terbitan kali ini, buku ini dikemas dengan judul “STUDI AGAMA: Kajian Dialog Antar Agama”. Penulis mengemas naskah ini menjadi buku yang dapat dijadikan kajian teoretik dan pedoman aksi bagi siapa saja yang menggeluti studi agama atau secara spesifik kajian dialog antar agama (*religious dialogue*).

Karena itu, karya ini bisa menjadi buku rujukan bagi mahasiswa dalam studi-studi agama atau dialog antar agama.

Di dalam buku ini dijabarkan mengenai berbagai teori dalam dialog antar agama dan wacana mengenai keberagaman umat agama sebagai landasan teologis maupun akademis untuk saling memahami kondisi yang di ada di masing-masing agama. Dengan menjabarkan masalah ini, penulis berharap ada kontribusi dalam membangun kesadaran akan pentingnya pemahaman mengenai keanekaragaman dalam kehidupan beragama. Kesadaran mengenai keniscayaan keanekaragaman tersebut adalah prasyarat bisa diadakannya komunikasi dan hubungan yang positif antar umat beragama. Tanpa adanya kesadaran tersebut, hubungan antar umat beragama akan mengalami banyak kendala.

Membangun kesadaran mengenai keniscayaan keberagaman dapat dilakukan di kampus dalam perkuliahan-perkuliahan atau forum ilmiah lainnya, juga dapat dilakukan di masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan aksi tentang pentingnya memahami perbedaan agama. Ruang lingkupnya meliputi dua lingkungan: lingkungan lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat yang selama ini dianggap rentan dengan konflik sosial, juga lingkungan masyarakat lainnya yang tidak begitu rentan sebagai upaya antisipatif.

Buku ini disusun menjadi delapan bab. Bab I berbicara mengenai isu dialog antar agama dalam studi agama. Di dalamnya dibahas posisi penting dialog antar agama dalam melakukan studi-studi agama. Bab II adalah Ruang Lingkup Dialog yang mengurai tentang pengertian dan unsur-unsur. Bab III mengurai tentang problematika dialog antar agama. Bab IV mengurai berbagai macam teori dialog antar agama yang mencakup pembahasan mengenai makna pluralisme dan etika dialog antar agama yang dapat digunakan dalam melakukan dialog-dialog. Kemudian dalam bab V penulis melakukan pembacaan sosial berkenaan dengan berbagai tantangan yang masih dan akan menghadang umat beragama. Bab VI berbicara mengenai peran agama di tengah problematika modernitas. Bab VII membicarakan urgensi HAM dalam kehidupan bergama. Bab VIII adalah epilog.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam memperlancar usaha penulis dalam menyelesaikan karya ini. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam karya ini. Oleh karena itu, penulis berharap saran dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Sukoharjo, Juni 2020

Penulis

Dr. Zainul Abas, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: ISU DIALOG ANTAR AGAMA DALAM STUDI AGAMA	1
BAB II: RUANG LINGKUP DIALOG	11
BAB II: PROBLEMATIKA DIALOG ANTAR AGAMA.....	41
BAB III: TEORI DIALOG ANTAR AGAMA.....	59
BAB IV: TANTANGAN DIALOG ANTAR AGAMA.....	95
BAB V: PERAN AGAMA DI TENGAH PROBLEMATIKA MODERNITAS.....	115
BAB VI: URGENSI HAM DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA.....	127
BAB VII: EPILOG.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	147

BAB I

ISU DIALOG ANTAR AGAMA DALAM STUDI AGAMA

Dialog antar agama (*interreligious dialogue*) adalah salah satu isu penting dalam perkembangan studi agama-agama. Isu dialog antar agama mengiringi perkembangan pergaulan antar umat beragama dari zaman ke zaman. Isu ini menjadi perhatian para pemimpin agama di tengah percaturan global dalam rangka untuk membangun kerukunan (harmoni) dan perdamaian dunia. Implementasi dialog antar agama secara akademik sampai pada kajian-kajian mendalam mengenai berbagai doktrin yang krusial di masing-masing agama, mulai doktrin teologis sampai hal-hal yang bersifat praktis.

Studi agama (*religious studies*) adalah mengkaji tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama. Studi agama adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun

praktik-praktis pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya.¹

Studi agama bisa dilakukan oleh pemeluk agama masing-masing dan juga bisa dilakukan oleh kalangan pemeluk lintas agama. Tentu saja ada perbedaan mengkaji agama yang dilakukan oleh pemeluk suatu terhadap agamanya sendiri dengan mengkaji agama yang dipeluk oleh orang lain, begitu juga sebaliknya. Mengkaji suatu agama oleh pemeluk agamanya sendiri bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran suatu agama untuk dapat melaksanakannya dan mengamalkannya. Mengkaji suatu agama yang dilakukan oleh pemeluk agama lain tentu bertujuan untuk suatu ilmu pengetahuan.² Dialog antar agama adalah bagian dari studi agama yang di dalamnya terjadi kajian dari para pemeluk suatu agama baik kepada agama sendiri maupun kepada agama lain. Di dalam praktek dialog antar agama, para tokoh-tokoh agama menggali inti ajarannya sendiri dan juga berusaha memahami inti ajaran agama lain yang sekiranya bisa didialogkan bersama.

Dengan mengkaji inti ajaran agama dan keberagaman para pemeluk suatu agama dapat dicapai suatu pemahaman bahwa agama mengandung dua hal penting yaitu hal-hal yang bersifat normatif dan hal-hal yang bersifat historis, atau hal-hal yang bersifat esoterik dan hal-hal yang bersifat eksoterik.

Suatu agama memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dimensi esoterik dan eksoterik. Pada dimensi esoterik, agama melampaui ruang dan waktu, melampaui rasionalitas, bersifat transenden dan mutlak. Sementara dalam dimensi eksoteriknya, agama berwujud dalam bentuk yang terstruktur, ada dalam ruang dan waktu, rasionalitas, terbatas dan relatif. Relativitas bentuk agama (eksoterime), membuka peluang untuk dilakukan pengkajian secara kritis, mendalam, dan rasional, sehingga nilai-nilai kebenaran yang di

¹ Muhaimin, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2012), 1.

² Ibid.

kandungnya dapat tersingkap dari tabir keterbatasan dan relativitasnya, serta dapat berfungsi sebagai sumber kemaslahatan dalam kehidupan manusia pada jagat raya ini. Dalam konteks ruang publik, suatu agama tertentu tidak bisa dilepaskan dari kesejarahannya yang dinamis dan kompleks, sehingga pembacaan terhadap Islam tidak cukup hanya dengan satu pendekatan, apalagi hanya dengan pendekatan normative, melainkan harus dilakukan dengan pendekatan dan perspektif jamak.³

Agama mengandung dua hal yaitu hal-hal yang bersifat absolut dan hal-hal yang relatif. Hal ini juga melahirkan pola pikir umat beragama yang memperlakukan semua hal dalam agama sebagai sesuatu yang absolut. Akibatnya berkembang klaim-klaim kebenaran absolut dari pemeluk agama ketika memperlakukan pemikiran atau pendapatnya. Di sisi lain, agama berkembang dan hidup bersama dengan perubahan-perubahan kondisi zaman pemeluknya. Agama menghadapi berbagai hal kehidupan yang bersifat relatif, artinya yang selalu berubah dari zaman ke zaman. Karena itu, dalam studi agama dipahami bahwa hal-hal yang bersifat absolut harus didialogkan dengan hal-hal yang bersifat relatif. Agama yang berasal dari Tuhan memang absolut tetapi pemahaman pemeluk agama terhadap agama dari Tuhan tersebut adalah relatif. Pemahaman terhadap agama itulah yang tidak boleh menjadi suatu yang bersifat absolut. Pemahaman agama tidak boleh kebal kritik. Agama ketika dipahami oleh pemeluknya bersentuhan dengan aspek-aspek kesejarahan pemeluk yang bersifat profan, bersifat relatif. Karena itu, menurut Amin Abdullah, perlu interkoneksi antara hal-hal yang bersifat normatif yang absolut dengan hal-hal yang bersifat historis yang relatif.

Karena itu, Amin Abdullah menegaskan perlunya pendekatan agama yang berwajah ganda dalam studi agama di Indonesia, yakni pendekatan yang bersifat teologis-normatif dan sekaligus pendekatan yang bersifat historis-kritis. Kedua pendekatan tersebut tidak terpisah antara satu dengan lainnya, melainkan menyatu dalam satu kesatuan

³ Syafiq A. Mughni, "Berpikir Holistik Dalam Studi Islam," in *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Jakarta: IRCiSoD, 2012), 5.

yang utuh,, ibarat sekeping mata uang logam di mana antara kedua permukaannya menyatu dalam satu kesatuan yang kokoh.⁴

Menurut Amin Abdullah, dengan memperhatikan kondisi objektif masyarakat Indonesia yang begitu majemuk keberagamaannya serta membandingkannya dengan berbagai situasi dan kondisi politik di luar negeri, studi agama (*religious studies*) di Indonesia terasa sangat urgen dan mendesak untuk dikembangkan studi dan pendekatan agama yang bersifat komprehensif, multidisipliner, interdisipliner -dengan menggunakan metode yang bersifat historis-kritis –melengkapi penggunaan metodologi yang bersifat doktriner-normatif—adalah pilihan tepat untuk masyarakat Indonesia yang begitu majemuk keberagamaannya dan kepercayaannya. Amin menambahkan, agama untuk era sekarang ini tidak lagi dapat didekati dan difahami hanya lewat pendekatan -teologis-normatif semata-mata. Pada penghujung abad ke-19, lebih-lebih pertengahan abad ke-20, terjadi pergeseran paradigma pemahaman tentang “agama” dari yang dahulu terbatas pada “idealitas” ke arah “historitas”, dari yang hanya berkisar pada “doktrin” ke arah entitas “sosiologis”, dari diskurus “esensi” ke arah “eksistensi”.⁵

Dalam pergulatan dunia yang semakin terbuka dan transparan, orang tidak dapat dipersalahkan untuk melihat fenomena “agama” secara aspektual, dimensional dan bahkan multi-dimensional approaches. Selain agama memang mempunyai doktrin teologis-normatif, dan memang di situlah letak “hard core” daripada keberagamaan manusia, orang dapat pula melihat sebagai “tradisi”. Tradisi sulit dipisahkan dari faktor “human construction” yang semula dipengaruhi oleh perjalanan sejarah sosial-ekonomi politik dan budaya yang amat panjang.⁶

Agama, lebih-lebih teologi, tidak lagi terbatas hanya sekedar menerangkan hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya tetapi secara tidak terelakkan juga melibatkan kesadaran berkelompok (sosiologis),

⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas Atau Historisitas*, I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 4.

⁵ *Ibid.*, 7–9.

⁶ *Ibid.*, 9.

kesadaran pencarian asal usul agama (antropologis), pemenuhan kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang kuat dan ketenangan jiwa (psikologis) bahkan ajaran agama tertentu dapat diteliti sejauh mana keterkaitan ajaran etikanya dengan corak pandangan hidup yang memberi dorongan yang kuat untuk memperoleh derajat kesejahteraan hidup yang optimal (ekonomi). Dalam hubungannya dengan nilai-nilai etika yang fundamental, agama juga dapat didekati secara filosofis. Belum lagi jika dilihat dalam kaitannya dengan fungsi keprofesian agama yang lebih menekankan pandangan kritis terhadap situasi lingkungan sekitar. Di situ tampak, bahwa fenomena “agama” memang perlu didekati secara *multi-dimensional approaches*.⁷

Dalam studi agama diperlukan adanya *multiapproach* dan *multiperspective*, karena agama tentu bukan sesuatu yang hanya hidup di “langit” tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika budaya yang tertus berkembang. Agama tentu saja tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan alam semesta.

Senada dengan hal di atas, suatu agama mencakup hal-hal yang ideal dan hal-hal yang riil. Dalam konteks Islam, hal-hal yang ideal itu disebut dengan *Islamic* dan hal-hal yang riil disebut sebagai *Islamicate*. *Islamicate* menggambarkan pengertian tentang keseluruhan masyarakat dan budaya tempat kaum muslimin dan keimanannya bergumul dalam tradisi dan adat-istiadat selama berabad-abad. Penggunaan *islamicate* (keislaman) sebenarnya lebih menekankan pada fakta bahwa tantangan besar dalam mempelajari Islam ialah bagaimana menjelaskan dan menganalisis prinsip Islam yang universal yang dinyatakan dalam konteks social yang berbeda-beda. Ekspresi Islam yang beragam itu menunjukkan bahwa ada proses dialog yang terus menerus antara

⁷ Ibid., 10.

Islam yang normative dan realitas yang dinamis, yang menghasilkan peradaban.⁸

Untuk memahami apa itu agama, menarik untuk meminjam pembagian yang digunakan oleh Moeslim Abdurrahman. Moeslim menegaskan bahwa ada dua pendekatan dalam memahami agama. *Pertama*, pendekatan substantive, dan *kedua*, pendekatan fungsional. Pendekatan pertama dimulai dengan mencoba mempertanyakan apakah agama itu. Sedangkan yang kedua memulai dengan pertanyaan apakah fungsi sosial dan psikologis agama, baik bagi individu maupun kelompok social. Dengan menggunakan pendekatan pertama, sekaligus dapat dibedakan mana yang agama dan mana yang bukan agama. Definisi substansi biasanya mencakup makna dan kompleks makna yang dikaitkan dengan wujud-wujud transenden dalam arti konvensional, seperti ritus atau bentuk hubungan manusia dengan Tuhan, atau kekuatan adikodrati. Adapun pendekatan fungsional lebih tertarik melihat agama sebagaimana yang terpantul dalam struktur, system dan pengaturan sosial. Tokoh-tokoh dalam pendekatan yang kedua ini di antaranya nya adalah R. Bellah, Clifford Geertz dan Thomas Luckman. Tokoh lain adalah Peter Berger, sosiolog Amerika. Ia menganjurkan agar kembali melihat agama dari “isinya yang di dalam” atau *from within* – yang disebut Max Weber dengan istilah *verstehen*. Yakni suatu pendekatan yang memahami agama sebagaimana agama itu dipahami sendiri oleh para pemeluknya, atau oleh actor-aktornya. Atas dasar itu, ia menawarkan pendekatan yang disebut fenomenologi, yang mementingkan penafsiran realitas bukan berdasarkan pada konsep intelektual sang pengamat—tapi harus berangkat dari pandangan dan pemahaman para pelaku realitas itu sendiri.⁹

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa suatu dialog antar agama dilakukan dengan menggunakan *multiapproach* dalam memahami inti ajaran agama dan juga praktik-praktik

⁸ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 153.

⁹ *Ibid.*, 156–157.

keberagamaan umat beragama. Dengan menggunakan multiapproach dalam memandang agama, maka dialog dapat dilakukan dengan dinamis, bukan apologis dan menonjolkan klaim kebenaran.

Di dalam dialog antar agama bukan tidak mungkin klaim-klaim kebenaran itu selalu muncul. Hal ini dikarenakan agama memang memiliki nilai-nilai yang dipandang kebenaran absolut oleh pemeluknya. Dalam Islam ditemukan konsep *innaddina indallahil-islam* (Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam). Begitu juga dalam agama Kristiani pernah ditemukan konsep “extra eclesia nulla sallus” (di luar gereja tidak ada kebenaran), meskipun konsep tersebut dicabut sewaktu Konsili Vatikan II. Baik secara langsung maupun tidak langsung klaim-klaim kebenaran itu tidak dapat dipungkiri keberadaannya dalam suatu agama. Namun demikian, dengan berbagai pendekatan studi agama misalnya pendekatan hermeneutik, pendekatan teologis, pendekatan sosiologis-antropologis, tentu saja klaim-klaim tersebut harus terus dikaji ulang bagaimana konstruksi pemahaman atau interpretasinya dalam kehidupan sosial.

Dalam praktek kehidupan keberagamaan, dialog antar agama adalah isu yang sangat penting dalam studi agama. Di tengah berbagai tantangan kemanusiaan yang dihadapi oleh umat beragama, peran agama untuk ikut menyelesaikan problem kemanusiaan seperti problem kemiskinan, krisis moralitas, problem kesehatan, problem lingkungan dan problem-problem yang lain sangat dibutuhkan. Umat beragama dapat berperan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut jika terjadi kesepahaman mengenai pentingnya menyelesaikan bersama. Kebersamaan antar pemeluk agama juga menjadi modal penting untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian. Perdamaian umat manusia juga ditentukan oleh perdamaian umat beragama.

Tulisan-tulisan akademik dan hasil penelitian tentang dialog antar agama berkembang pesat baik refleksi teoretik maupun riset-riset sosial. Perbincangan tentang dialog antar agama dengan pluralisme misalnya ditulis oleh Abdul Halim, dosen Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi. Halim menulis di Jurnal Tadjid Vol. XIV No 1 Januari-Juni 2015 dengan judul Pluralisme dan Dialog Antar Agama. Dalam

kesimpulannya, Halim menegaskan bahwa kehadiran pluralisme dan kesadaran akan realita plural yang tidak dapat dipungkiri, apalagi dihindari, merupakan momentum di mana signifikansi dialog antar umat beragama semakin dirasakan.

Kajian dialog antar agama juga ada yang mengaitkan dengan adanya praktek-praktek kekerasan yang terjadi. Hal ini seperti yang ditulis oleh Mawardi, dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Ia menulis dengan judul “Kekerasan dan Problematika Dialog Antar Umat Beragama” di jurnal *Toleransi* Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2010. Pembahasan dialog antar agama sangat penting dalam rangka untuk mencegah terjadinya kekerasan atas nama agama yang berpotensi muncul dalam kehidupan umat beragama.

Ada juga yang mengaitkan kajian dialog antar agama dengan kerukunan dan perdamaian umat beragama. Tulisan Khotimah dalam *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII No. 2 Juli 2011 dengan judul “Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama”, dan juga tulisan Aulia Agustin dalam jurnal *Al-Mada* Vol. 1 No. 2 Tahun 2018 dengan judul “Perdamaian Sebagai Perwujudan dalam Dialog Antar Agama”, adalah contoh-contoh tulisan terkait dengan dialog antar agama. Masih banyak tulisan-tulisan semacam itu di berbagai jurnal.

Ada juga yang menulis pemikiran tokoh terkait dengan isu dialog antara agama. Hal ini seperti tulisan Zaprulkhan, dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dalam jurnal *Mawa'izh* Vol. 9. No. 2 tahun 2018 dengan judul “Dialog dan Kerjasama antar Umat Beragama dalam Perspektif Nurcholish Madjid”. Zaprulkan menegaskan bahwa dialog antar agama mengikuti argumen-argumen Cak Nur adalah berpijak dari keprihatinan yang sama mengenai kemanusiaan. Dialog dan kerjasama itu meskipun harus memiliki sandaran (tanggungjawab) vertikal kepada Tuhan, tapi tetap harus bermuara kepada kebaikan dan manfaat budaya, dan bangsa. Menurutnya, setiap pemeluk agama perlu mempunyai semacam tanggungjawab global yakni memiliki solidaritas terhadap penderitaan kemanusiaan secara universal. Di sini muara keprihatinan, penghormatan, dan kepedulian kita adalah harkat martabat manusia itu sendiri sebagai anugerah istimewa dari Tuhan.

Isu dialog antar agama bahkan terkait juga dengan masalah lingkungan atau harmoni bumi. Hal ini seperti yang ditulis oleh Media Zainul Bahri di jurnal *Refleksi*, Vol. 13 tahun 2011 dengan judul “Dialog antar Iman dan Kerjasama Demi Harmoni Bumi”. Ada juga tulisan yang mengenai dialog antar agama dan antar budaya yang mengambil kasus-kasus lokal seperti yang ditulis oleh Muryana dalam jurnal *Esensia* Vol. XIV No. 2 Oktober 2013 dengan judul “Dialog Interreligius-Kultural dan Civil Religion (Studi atas Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu))”. Kajian-kajian yang bersifat lokal terkait dengan pengalaman dialog antar agama sangat banyak ditemukan dalam jurnal-jurnal ilmiah.

Sementara itu, dalam percaturan internasional pertemuan-pertemuan tokoh agama untuk membangun dan menciptakan perdamaian dunia terus berjalan. Pada awal tahun 2020 misalnya, para tokoh agama dunia menghadiri pertemuan tingkat tinggi agama-agama Ibrahim di Vatikan pada 14-17 Januari 2020. Salah satu tokoh Indonesia yang ikut hadir adalah Katib Aam PBNU KH. Yahya Cholil Tsquf sebagai salah seorang dari enam tokoh wakil Islam. Mereka bertemu untuk berembuk mengenai gerakan bersama untuk menciptakan perdamaian. Dunia. (<https://kompas.id/baca/internasional/2020/01/13/para-tokoh-agama-dunia-hadiri-pertemuan-tingkat-tinggi-agama-agama-di-vatikan/>) Dalam pertemuan tersebut, para tokoh agama dari sejumlah negara sepakat untuk melakukan upaya rekontekstualisasi agama demi mewujudkan perdamaian dunia.

Selain itu, upaya-upaya resmi antar pemimpin negara untuk mewujudkan kerukunan dengan melakukan dialog-dialog antar agama juga terus dilakukan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin pada bulan Pebruari 2020 bersama Presiden Singapura Halimah Yacob. Ma'ruf menyampaikan kepada Halimah bahwa upaya meningkatkan kerukunan antaragama melalui dialog lintas agama secara internasional perlu terus digalakkan. Mereka berdua sepakat untuk mendorong penyelenggaraan dialog lintas agama di antara kedua negara. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Menurut Ma'ruf, dialog-

dialog antar pemuka agama harus dikedepankan sebagai upaya untuk menciptakan kerukunan dan toleransi antar masyarakat. Dengan adanya toleransi, maka paham-paham radikal akan sulit untuk menyusup ke pemikiran masyarakat. Agama hendaknya dijadikan untuk mendukung kerukunan antar agama, supaya agama tidak menjadi sumber konflik. Dialog adalah solusi untuk menciptakan dan menjaga perdamaian di wilayah-wilayah konflik. Pendekatan agama adalah pendekatan yang sangat efektif untuk menyelesaikan konflik dibandingkan dengan pendekatan militer dan politik. (<https://mediaindonesia.com/read/detail/289915-indonesia-akan-prakarsai-pertemuan-tokoh-lintas-agama-dunia>)

Dialog antar agama menjadi isu yang terus diperbincangkan, karena kehidupan umat beragama terus berkembang mengikuti perkembangan-perkembangan bidang lain seperti ekonomi, politik dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat beragama juga berkembang dipengaruhi oleh konstelasi aspek sosial politik yang berlangsung di lokal atau negara dan percaturan politik global. Dialog antar agama sebagai bagian dari studi agama-agama perlu mendapatkan perhatian serius baik mengenai khazanah-khazanah teoretik maupun pengalaman-pengalaman praktis umat beragama di manapun tempatnya.

BAB II

RUANG LINGKUP DIALOG

A. Pengertian Dialog Antar Agama

Kata “dialog” adalah kata yang sudah tidak asing lagi. Kata ini menjadi semakin populer ketika gerakan untuk bertemu dan berkumpul bersama dalam menyelesaikan persoalan mulai dilakukan oleh umat beragama, terutama pada abad ke-20. Sejak itulah, sering kali terdengar istilah dialog antar agama, dialog antar peradaban, dialog antar umat beragama dan sebagainya.

Kata “dialog” paling tidak, bisa dimengerti dari dua sudut yaitu sudut etimologis dan terminologis dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan, termasuk rangkaian perjalanan sejarah manusia. Para cendekiawan memaknai “dialog” secara beragam. Berikut ini adalah makna-makna dialog tersebut.

Kata “dialog” berasal dari kata *dialogus* (Yunani). Kata ini berarti dwi cakap, yakni percakapan antara dua orang atau lebih. Dialog dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam mencari nilai-nilai kebenaran. Dialog juga berarti tulisan dalam bentuk percakapan atau pembicaraan, diskusi antara orang-orang atau pihak-pihak yang

berbeda pandangan. Dialog juga bisa berbentuk semacam karangan prosa atau puisi untuk menyatakan berbagai pandangan yang berbeda.¹⁰

Namun, dialog tidaklah mesti diasumsikan sebagai keterlibatan dua orang (pihak) secara berhadap-hadapan pada saat bersamaan. Sebagaimana dikatakan Mukti Ali, dialog tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang dijalankan oleh dua unsur, karena sub kata “dia” dalam “dialogos” tidak mempunyai sesuatu untuk dikerjakan dengan “duo” pihak kedua. Menurutnya, dialog berarti “dia-leghe”, yaitu yang sedang berbicara, sedang berdiskusi, sedang berargumentasi mengenai seluruh aspek persoalan. Karenanya, dialog adalah saling mengoreksi dan bergerak bersama dalam menyelesaikan masalah baru. Dialog juga dapat dimaknai sebagai penemuan jalan yang umum melalui realitas dan melalui persoalan-persoalan yang dihadapi. Mukti Ali menyebut kata *concourse* sebagai padanan kata dialog, yang berarti berlari bersama, bergerak bersama, bergerak maju bersama, bukan hanya berbicara bersama.¹¹

Selain itu, dialog juga merupakan suatu percakapan bebas, terus terang dan bertanggung jawab, yang didasari oleh saling menghormati dan mempercayai. Yang dimaksud bebas adalah tidak adanya intimidasi atau suatu keadaan terancam dan terpaksa tetapi berdasarkan kemerdekaan dan kebebasan. Terus terang adalah menyampaikan apa adanya hal-hal yang dimiliki untuk dapat menjadi bahan mencari titik temu bersama. Artinya bukan informasi yang mengandung kebohongan. Bertanggung jawab artinya masing-masing pihak siap mempertanggungjawabkan terhadap apa yang disampikannya.

Dialog bertujuan memperoleh saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa atau masalah kemanusiaan sehingga kondisinya menjadi lebih dan makin baik, materiil maupun spirituil. Dialog bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan kedamaian dalam kehidupan umat manusia.

¹⁰ Burhanuddin Daja, *Materi Kuliah Hubungan Antar Agama*, 1999.

¹¹ Mukti Ali, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), 7–8.

Karena itu, dialog sesungguhnya bukan polemik atau pertengkaran di mana orang beradu argumentasi melalui media apapun baik tulis maupun elektronik dengan tujuan permusuhan. Dialog juga bukan sekedar perdebatan antara orang yang satu dengan lainnya saling mengemukakan kebenaran sendiri dan kesalahan pendapat-pendapat orang lain. Dialog bukan mencari kesalahan orang lain. Dengan kata lain, dialog juga bukan suatu apologi yang satu pihak berusaha mempertahankan kepercayaannya karena merasa terancam, begitu juga sebaliknya.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Ali dalam memaknai dialog yang mencakup berbagai hal dengan orientasi dan tujuan-tujuan yang positif, bukan negatif. Mukti Ali mengemukakan:

“Dialog bukan polemik di mana orang beradu argumentasi lewat pena. Dialog bukan debat di mana orang saling mengemukakan kebenaran sendiri dan kesalahan pendapat-pendapat orang lain. Dialog bukan apologi di mana orang berusaha mempertahankan kepercayaannya karena merasa terancam. Dialog bukan pula elenktik di mana orang membantah agama orang lain dengan menuntut pertanggung jawaban. Dialog, pada hakikatnya, adalah suatu percakapan bebas, terus terang dan bertanggung jawab, yang didasari oleh saling menghormati dan mempercayai. Dialog bertujuan memperoleh saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa yang lebih dan makin baik, materiil maupun spirituil.”¹²

Jadi, dialog itu bukan berpolemik dan berdebat untuk menyampaikan kebenarannya sendiri dengan mengemukakan kesalahan-kesalahan orang lain. Dialog juga bukan merupakan kumpulan apologi-apologi dengan hanya mempertahankan kepercayaan masing-masing. Dialog bukan berbantah-bantahan dengan menurut pertanggungjawaban orang lain. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memahami dialog. Dialog merupakan percakapan bebas, terus terang dan bertanggungjawab dengan didasari oleh saling menghormati dan

¹² Mukti Ali, “Peranan Agama Di Dalam Pembangunan Nasional,” *Al Jami'ah* XV, no. 15 (1972): 22.

mempercayai. Secara lebih luas, dialog bertujuan memperoleh saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa supaya menjadi lebih baik dalam setiap aspeknya.

Dialog memiliki makna yang lebih luas dalam kehidupan. Dialog tidak sekedar hanya saling memberi informasi mengenai persamaan dan perbedaan dari ajaran satu agama-agama dengan agama lainnya. Dialog juga bukan hanya sekedar hidup berdampingan antara pelbagai macam kelompok pemeluk agama dengan tanpa tujuan untuk kebersamaan.

Dialog antar agama juga bukan merupakan suatu usaha agar orang yang berbicara menjadi yakin akan kepercayaannya sehingga menjadikan orang lain mengubah agamanya kepada agama yang ia peluk. Dialog tidak dimaksudkan untuk konversi, yaitu untuk menjadikan orang lain supaya menerima kepercayaan yang ia yakini sehingga seseorang mau berpindah agama atau keyakinan. Dialog antar agama juga bukan merupakan usaha untuk menyatukan semua ajaran agama menjadi satu. Dialog antar agama juga bukan suatu usaha untuk membentuk agama baru yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dialog bukanlah berdebat adu argumentasi antara pelbagai kelompok pemeluk agama, hingga dengan demikian ada orang yang menang dan ada orang yang kalah. Dialog bukanlah suatu usaha untuk minta pertanggungjawaban kepada orang lain dalam menjalankan agamanya.

Dialog antar agama adalah pertemuan hati dan pikiran antar pemeluk pelbagai agama. Dialog adalah komunikasi antara orang-orang yang percaya pada tingkat agama. Dialog adalah jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerja sama dalam proyek-proyek yang menyangkut kepentingan bersama. Ia merupakan perjumpaan antar pemeluk agama, tanpa merasa rendah dan tanpa merasa tinggi, dan tanpa agenda atau tujuan yang dirahasiakan, tanpa ada yang merasa terancam baik secara fisik maupun keyakinan.

Seorang muslim yang berjumpa dengan pengikut agama lain dalam dialog adalah sebagai seorang muslim. Demikian juga halnya

dengan orang Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu yang berjumpa dengan orang yang beragama lain. Begitu juga sebaliknya. Ia bermaksud berbakti kepada Tuhan yang menguasai alam semesta dengan segala isi dan gerakannya. Seorang muslim sebagai anggota dari umat Islam mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang mempunyai kepercayaan lain, dan bersedia untuk belajar daripadanya. Masing-masing orang yang diajak bicara juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ia mau mendengarkan pandangan yang diajukan olehnya dan bersedia untuk belajar daripadanya.”¹³

Dialog bisa terjadi secara informal maupun secara formal. Dialog juga bisa secara individu atau kelompok, atau bisa juga secara pribadi atau lembaga. Dalam hal ini, suatu dialog diharapkan menjadi forum atau media agar masing-masing pihak bisa berbicara satu dengan lainnya dengan sikap yang baik, jujur (terus terang), dan hati terbuka.¹⁴

Dialog bukan hanya untuk dialog. Dialog tidak berhenti ketika aktivitas itu selesai dilakukan. Dialog memiliki tujuan. Menurut Alwi Shihab, dialog adalah salah satu cara untuk menciptakan kerukunan antar agama. Dengan dialog, umat beragama mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berbeda pandangan tentang kenyataan hidup. Dialog dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dialog dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu masyarakat.

Menurut Alwi Shihab:

“dengan dialog agama umat beragama mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berbeda pandangan tentang kenyataan hidup. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama

¹³ Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah Dan Misi,” in *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia Dan Belanda* (Jakarta: INIS, 1992), 208.

¹⁴ Mukti Ali, “Dialogue Between Muslims and Christians in Indonesia and Its Problems,” *Al-Jami'ah* IX, no. 4 (1970): 53.

mitra dialog. Dialog tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu masyarakat.”¹⁵

Jadi, dialog itu adalah suatu keadaan saling memberi dan saling menerima berbagai informasi dan pandangan sehingga masing-masing memiliki wawasan yang luas tentang apa yang dimiliki dan diyakini oleh orang lain. Dengan bekal wawasan yang luas itulah masing-masing pihak dapat mewujudkan kehidupan yang rukun, aman dan damai di masyarakat.

Bahkan, dialog sesungguhnya merupakan hal yang esensial untuk merangsang keberagaman kita agar tidak mandeg dan statis. Dengan adanya berbagai informasi dan wawasan tentang orang lain tentu menjadikan keberagaman seseorang menjadi dinamis.

Dialog itu sebenarnya bisa dimulai dari dialog diri sendiri, antar satu orang dengan orang lain, dan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Dialog ditujukan untuk mewujudkan kerukunan bersama.

Djohan Effendi pernah mengungkapkan, setelah melihat kenyataan bahwa seorang muslim membaca ayat al-Fâtihah Ihdina al-shirâth al-mustaqîm sebanyak 17 kali setiap hari dalam sembahyang. Kalau agama dapat dianggap sebagai jalan keselamatan tidakkah keberagaman itu pada hakikatnya suatu proses pencaharian yang terus menerus? Karena itu, menurutnya, dialog itu dengan sendirinya dapat dilakukan dalam bentuk dialog dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Dalam dialog itu diperlukan kedewasaan dan keterbukaan untuk dapat melahirkan semacam teologi kerukunan.¹⁶

Sementara itu Nurcholish Madjid melihat bahwa salah satu wujud keserasian hidup antar umat beragama adalah adanya kesediaan dari semua pihak untuk berdialog, sebab dialog itu sendiri melibatkan adanya pandangan dan pendekatan positif suatu pihak kepada pihak-

¹⁵ Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, VII. (Bandung: Mizan, 1999), 41.

¹⁶ Djohan Effendi, “Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan,” *Prisma* VII, no. 5 (1978): 17.

pihak lain. Adanya dialog akan menghasilkan keserasian dan saling pengertian.¹⁷

Menurut Nurcholish, karena di masing-masing agama mengajarkan tentang kepatuhan dan kepasrahan kepada Tuhan meskipun Nabi dan Rasulnya berbeda-beda, maka kebutuhan untuk melakukan dialog adalah sesuatu yang sangat diperlukan, bahkan harus dilakukan. Hal ini tentu sangat baik bagi para pemeluk agama sehingga memiliki wawasan yang luas mengenai diri sendiri dan juga orang lain.

Menurut Nurcholish berkaitan dengan dialog:

“Tuhan telah membangkitkan pengajar dan penganut kebenaran (nabi, rasul) kepada semua umat manusia tanpa kecuali, dan ajaran mereka semua adalah sama dan satu, yaitu ajaran tunduk-patuh dan taat-pasrah kepada Tuhan yang disebut al-islâm (dalam makna generiknya, bukan dalam peristilahan kebahasaannya), maka sesungguhnya dialog adalah sesuatu yang tidak saja dimungkinkan, malah diperlukan, jika tidak diharuskan.¹⁸

Keadaan sosio-kultural dari masing-masing agama secara historis tentu berbeda-beda, namun fenomena lahiriyah itu mestinya tidak menghalangi usaha menuju titik temu antara satu dengan lainnya. Meskipun rumusan linguistik dan verbal keyakinan keagamaan berbeda-beda, tentu eksternalisasi keimanan itu dalam dimensi sosial kemanusiaannya memiliki kesamaan-kesamaan karena menyangkut kerja nyata kemanusiaan. Di dalam ajaran Islam terkandung ajaran misalnya, paling tidak dinyatakan dalam aktivitas kemanusiaan seperti menolong kaum miskin, dan dalam mengusahakan perdamaian kepada semua orang tanpa kecuali.

Jadi, sebagaimana ditegaskan Nurcholish, dialog antar agama dapat dipandang sebagai pelaksanaan ajaran agama yang paling asasi, dan kerjasama kemanusiaan yang dihasilkannya berdasarkan keimanan

¹⁷ Nurcholish Madjid, “Dialog Agama-Agama Dalam Perspektif Universalisme Al-Islâm”, in *Passing Over, Melintasi Batas Agama* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Paramadina, 1998), 6.

¹⁸ Ibid., 9.

kepada Tuhan Yang Mahaesa dan kebaikan adalah perintah dalam Kitab Suci.”¹⁹

Berkaitan dengan masalah dialog ini, harus diperhatikan bahwa jika umat beragama tidak memiliki pengetahuan tentang orang lain hendaknya berhati-hati dalam melukukan kritik atau koreksi terhadap konsep orang lain. Harus disadari bahwa suatu dialog tidak perlu membicarakan hal-hal negatif agama lain. Tentu saja hal-hal yang sangat penting untuk didialogkan adalah masalah-masalah kemanusiaan dan kemanfaatan-kemanfaatan hidup bersama.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Abdurrahman Wahid berikut ini:

“Kalau tidak mengetahui satu sama lain, semestinya tidak perlu melakukan kritik, koreksi, atau meluruskan konsep orang lain. Kalau itu tetap dilakukan akhirnya berantakan seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Karena itu harus ada kesadaran untuk menghormati konsep agama lain. Penganut satu agama tidak perlu membicarakan secara negatif konsep agama lain. Soal-soal itu menjadi urusan masing-masing. Di dalam semangat keruhanian kita, sebenarnya di luar konsep ketuhanan juga di luar cara beribadat, konsep-konsep kemanusiaan kita, konsep-konsep kegunaan agama bagi kehidupan manusia, saya rasa hal itu dapat dipelajari bersama, dapat dikembangkan lebih jauh, dan kalau perlu diperdebatkan. Tentu perlu diketahui wilayah mana yang menjadi urusan agama masing-masing dan wilayah mana yang terbuka untuk didialogkan.”²⁰

Menurut Natsir, dialog adalah usaha untuk memecahkan adanya perbedaan-perbedaan. Dialog adalah perwujudan sikap yang tidak pasif dan tenggelam dalam perbedaan-perbedaan. Dialog adalah usaha untuk menjernihkan kehidupan antar agama. Berdialog adalah memanggil orang-orang beragama lain yang mempunyai Kitab, berpedoman pada wahyu ilahi. Arti pentingnya dialog adalah agar

¹⁹ Ibid., 19–20.

²⁰ Abdurrahman Wahid, “Dialog Agama Dan Masalah Pendangkalan Agama,” in *Passing Over, Melintasi Batas Agama* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Paramadina, 1998), 59.

umat beragama dapat hidup berdampingan satu sama lain sebagai saudara, dan yang paling penting adalah menghargai identitas masing-masing pemeluk agama.²¹ Perbedaan keyakinan agama bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan secara damai, bahkan bukan hanya toleransi secara pasif tetapi juga positif yaitu berbuat baik, dan berlaku adil antara satu dengan lainnya.²² Sama halnya dengan Natsir, Rasyidi memandang perlunya toleransi untuk menghindari ketegangan-ketegangan hubungan antar umat beragama. Diskusi dengan agama lain harus dilakukan dengan cara yang baik.²³

Jadi, dialog merupakan perbincangan antara dua orang (dua unsur) atau lebih, baik pada tingkat yang sederhana yang bersifat informal (tanpa ada syarat-syarat apapun) maupun pada tingkat yang resmi yang bersifat formal. Pada tingkat ini dialog sesungguhnya telah dilaksanakan atau dilakukan oleh manusia sejak dulu kala, bahkan barangkali bukan hanya dialog antara sesama manusia tapi juga dialog kepada Tuhan atau makhluk lainnya seperti malaikat atau jin. Peristiwa perbincangan antara Allah dan malaikat ketika memperbincangkan penciptaan Adam juga merupakan salah satu bentuk dialog sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah (2):30. Dialog itu kemudian terus terjadi antara Tuhan dengan manusia (Adam), antara manusia dengan malaikat, antara manusia dengan jin dan iblis, dan antara manusia dengan manusia. Dialog antar sesama manusia yang pertama kali adalah dialog yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dialog ini kemudian terus terjadi, bahkan sampai sekarang ini dan masa akan datang. Sekarang ini, dialog bukan hanya terbatas dengan hal-hal yang hidup tapi juga hal-hal yang mati (diam) seperti berdialog dengan buku, berdialog dengan alam, berdialog dengan diri sendiri, berdialog dengan kebenaran atau kesalahan dan sebagainya.

²¹ Johannes L, "Bung Natsir: Menghadang Konflik, Membangun Toleransi," *Majalah Filsafat Driyarkara XXII No. 5*, n.d., 45-46.

²² Mohd. Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, II. (Jakarta: Penerbit Hudaya, 1970), 18.

²³ M. Rasjidi, "Pidato Musyawarah Antar Agama 30 Nopember 1967 Di Jakarta," *Al-Djami'ah VIII*, no. Mei (1968): 40.

Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, adalah yang berkaitan dengan forum dialog, yang tidak mesti dilakukan dalam forum resmi tetapi dapat juga dalam forum yang tidak resmi berupa percakapan bebas dan mereka tidak mesti harus bertemu secara fisik. Karena itu dialog di sini dapat dipahami sebagai “pertemuan”²⁴ dan “conversation” (percakapan), baik secara informal maupun secara formal. Percakapan ini bisa secara individu atau kelompok, atau bisa juga secara pribadi atau lembaga. Dalam konteks agama-agama, “percakapan” di antara berbagai agama (pemeluk agama) sesungguhnya telah sering terjadi sejak lama, baik percakapan mengenai makna kepercayaan, ritual, etika atau masalah kemanusiaan lainnya. Hal ini terjadi, terutama, ketika agama-agama atau sistem-sistem kepercayaan yang berbeda-beda sudah saling bertemu (bersinggungan), meskipun “percakapan” itu dilakukan secara informal dan tidak sampai terekam secara baik.²⁵

Dalam hal ini, klasifikasi Mircea Eliade dapat membantu pemahaman tentang dialog. Eliade membagi berbagai macam aktivitas dialog yang mencakup hal-hal berikut ini. Pertama, *discursive dialogue* (sebelumnya “debate” atau “discussion”) yang meliputi meeting (pertemuan), listening (mendengarkan), dan diskusi pada level penelitian intelektual yang saling kompeten. Kedua, *human dialogue* yang menempatkan pada landasan-landasan eksistensial yang dideskripsikan sebelumnya, dan mengasumsikan bahwa mungkin bagi manusia untuk bertemu secara murni dan sungguh-sungguh sebagai *human beings*, dengan mengesampingkan kepercayaan-kepercayaan yang memisahkan mereka. Ketiga, *secular dialogue* yang menekankan bahwa di mana-mana ada tugas untuk dilaksanakan di dunia, orang-orang yang beriman dalam kepercayaan yang berbeda-beda bisa membagi dalam program aksi bersama, tanpa mempertimbangan pada pendirian-pendirian mereka yang bersangkutan. Keempat, *spiritual*

²⁴ Kardinal Sergio Pignedoli, “Dasar Pemikiran,” in *Trialog Tiga Agama Besar; Yahudi, Kristen, Islam*, I. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), 19.

²⁵ Leonard Swidler, “The Dialogue Decalogue: Ground Rules for Interreligious, Interideological Dialogue,” *Al-Jami'ah*, no. 57 (1994): 141.

dialogue yang menekankan aspek spiritual dan kontemplasi. Dialog spiritual ini diperjuangkan terutama oleh orang-orang yang telah dilatih dalam tradisi-tradisi kontemplatif dan monastik, dan orang yang telah belajar meletakkan nilai yang tinggi di atas spiritualitas Timur (atau yang lain). Lokusnya bukanlah perdebatan dan diskusi, tetapi prayer dan meditasi.²⁶

Kedua, adalah mengenai pelaku dialog, bahwa dialog tidak mesti dilakukan oleh dua pihak tetapi dapat lebih dari itu, karena dialog adalah berbicara, berdiskusi, dan berargumentasi mengenai seluruh aspek persoalan. Selain itu, dialog juga adalah berlari bersama, bergerak bersama, bergerak maju bersama. Hal ini persis seperti yang dikemukakan oleh Mircea Eliade bahwa dialog sesungguhnya bukan hanya sekedar berbicara atau berbincang, tetapi juga berdiskusi, berargumentasi mengenai berbagai aspek kehidupan, sehingga ada koreksi dan ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan baru. Berdiskusi bisa secara langsung dalam forum-forum tertentu, tetapi bisa juga berupa “sebuah karya tulis yang melemparkan (memberikan) bentuk percakapan”.²⁷

Ketiga, adalah mengenai fungsi atau arti pentingnya dialog, yakni untuk saling mengoreksi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Selain itu, dialog juga memiliki arti penting sebagai upaya untuk menemukan jalan penyelesaian melalui realitas dan melalui persoalan-persoalan yang dihadapi. Dialog bukanlah polemik, bukan perdebatan truth claim, bukan apologi dan bantah-bantahan akan suatu pertanggung jawaban. Dialog adalah upaya untuk memperoleh saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa yang lebih dan makin baik, materiil maupun spirituil. Oleh karena itu, dialog tidak cukup hanya sekedar saling memberi informasi tentang persamaan dan perbedaan agama masing-masing.

²⁶ Mircea (ed.) Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, 4th ed. (New York: Macmillan Publishing Company, n.d.), 347.

²⁷ *Ibid.*, 344.

Suatu hal yang sangat penting adalah sebagaimana yang diingatkan oleh Mukti Ali berkenaan dengan masalah konversi dan sinkretisme. Suatu pelaksanaan dialog hendaknya tidak berubah menjadi alat untuk meyakinkan orang kepercayaan kepada orang lain sehingga seseorang mau berpindah agama. Konversi bukanlah tujuan dialog. Selain itu, dialog antar agama bukan merupakan usaha untuk menyatukan semua ajaran agama menjadi satu. Dengan kata lain, dialog bukan usaha untuk sinkretisme, juga bukan usaha untuk membentuk agama baru yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini didasari oleh pemikiran bahwa dialog sesungguhnya merupakan suatu pertemuan hati dan pikiran. Dialog antar agama tidak dimaksudkan sebagai berdebat adu argumentasi antara berbagai pemeluk agama, sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Dialog antar agama justru membiarkan hak setiap orang untuk mengamalkan keyakinannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Dialog antar agama adalah pertemuan hati dan pikiran antar pemeluk berbagai agama yang bertujuan mencapai kebenaran dan kerja sama dalam masalah-masalah yang dihadapi bersama.²⁸

Secara lebih luas, sebagai media untuk mencapai kebenaran dan kerjasama umat manusia maka suatu dialog sesungguhnya adalah dialog budaya, artinya mendialogkan produk-produk pemikiran umat beragama atas pemahamannya terhadap teks-teks suci. Produk pemikiran manusia tentu bukanlah sesuatu yang absolut, karenanya membuka peluang untuk bisa didialogkan. Dialog agama-agama harus diartikan sebagai bukan dialog keyakinan atas doktrin ajaran suatu agama, apalagi kitab suci agama-agama, melainkan dialog budaya yang bersumber pada kitab suci dan keyakinan suatu agama. Kebudayaan yang bersumber dari keyakinan dan kitab suci suatu agama bukanlah agama itu sendiri yang bersumber dari wahyu yang mutlak. Kebudayaan agama adalah pelebagaan yang tumbuh dalam proses interaktif manusia dengan kitab suci agama yang diyakininya. Ia merupakan hasil dari daya kreatif pemeluk suatu agama yang dipengaruhi latar belakang sejarah, geografis, dan berbagai kondisi

²⁸ Arief Subhan, "Ilmu Perbandingan Agama: Ketegangan Antara Dialog Dan Dakwah," *Jurnal Ulumul Qur'an* IV, no. 4 (1993): 4.

objektif kehidupan. Kebudayaan agama, dengan demikian, akan terus tumbuh dan berkembang searah dengan perkembangan mekanisme kesejarahan dan berbagai kondisi objektif kehidupannya tersebut. Perbedaan antara kebudayaan dan agama harus dijernihkan agar tidak terjadi pemahaman yang tumpang tindih. Hanya dengan penjernihan kebudayaan dan agama ini sajalah dialog agama menjadi mungkin karena ia merupakan dialog kebudayaan yang bersumber pada kitab suci dan keyakinan suatu agama. Dalam upaya penjernihan inilah pemikiran keagamaan menjadi bagian paling strategis dalam dialog agama yang akan memberi arah konstruktif kecenderungan baru fungsi agama setelah lemahnya peran berbagai ideologi sosial.²⁹

Keempat, adalah mengenai penyikapan atas dialog, bahwa dialog mesti didasari oleh sikap berterus terang dan bertanggung jawab dengan saling menghormati dan mempercayai. Dialog adalah suatu percakapan antara dua pihak atau lebih yang mengandung unsur keterbukaan, sikap kritis dan upaya untuk saling mendengar, saling belajar dan memahami orang lain secara lebih mendalam.³⁰

Dengan demikian, dialog antar agama adalah sesuatu yang penting dan strategis, terutama di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, untuk menjernihkan berbagai hal yang berkaitan dengan agama sebagai keyakinan dan kebudayaan. Yang perlu disadari adalah dinamika dan perkembangan hal-hal yang didialogkan, yang berjalan searah dengan daya kritis dan kreatif manusia tanpa harus melepaskan ataupun merelativisasikan keyakinan agamanya.

Harus diakui bahwa dialog dan kerjasama antar agama sesungguhnya merupakan suatu keniscayaan. Namun, yang harus diantisipasi adalah adanya truth claim yang dapat mempengaruhi eksklusivitas umat beragama. Setiap agama memang memiliki “klaim kebenarannya”-nya sendiri. Menurut M. Syafi’i Anwar “klaim

²⁹ Munir Mul Khan, “Agama Dalam Dialog Budaya,” in *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog “Bebas” Konflik* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 282.

³⁰ Sumartana Dkk, *Dialog: Kritik Dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), xxi.

kebenaran” (*truth claim*) inilah yang menjadi totalitas sistem makna yang berlaku bagi seluruh kehidupan, baik individual maupun sosial.³¹ Namun demikian, eksklusivitas agama itu hendaknya tidak menjadi penghalang untuk tetap adanya dialog antar pemeluk agama. Eksklusivitas agama juga tidak boleh menghilangkan sisi inklusivitas yang ada dalam suatu agama.

Dengan demikian, dialog antar agama meliputi banyak aspek; berbicara, bercakap-cakap, berbincang-bincang, berdiskusi, berargumentasi, melemparkan gagasan lewat tulisan, mencari jalan keluar, bergerak bersama, berlari bersama, saling mengoreksi, dan lain sebagainya, dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan yang ada, yang dilakukan oleh dua orang (dua pihak) atau lebih, dengan sikap terbuka, terus terang, kritis, empati, dan saling menghargai. Mengenai peristilahan-peristilahan yang ada, penulis tidak melihat ada perbedaan yang substansial dari term dialog antar agama, dialog antar kepercayaan, dialog antar umat beragama, dialog antar iman, serta inter-religious dialogue, kerjasama antar agama (*interreligious cooperation*), “ekumene” oleh Hans Kung.³²

B. Unsur-Unsur Dialog Antar Agama

Dari gambaran makna dialog di atas, ada beberapa unsur yang dapat dicermati, yaitu yang berkenaan dengan subjek dialog, materi dialog, strategi dialog serta tujuan dialog. Dalam pengertiannya yang sangat umum, subyek dialog dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu dialog intra-agama (intern agama) dan dialog antar agama. Kemudian, materi dialognya terdiri dari masalah teologis, etis dan empiris. Strategi dialognya terdiri dari dialog kehidupan (dialog biasa, tidak formal), dialog akademik, dan dialog aksi.

³¹ M. Syafi'i Anwar, “Sikap Politik Kepada Ahl Al-Kitab,” *Jurnal Ulumul Qur'an* IV, no. 4 (1993): 3.

³² St. Sunardi, “Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama,” in *Dialog: Kritik Dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), 75.

1. Subjek Dialog

a. Dialog intra agama

Dialog intra agama adalah dialog yang dilakukan oleh sesama pemeluk agama tertentu. Diakui bahwa dalam masing-masing agama terdapat juga berbagai perbedaan, berbagai mazhab, berbagai aliran, dan berbagai sekte. Perbedaan-perbedaan itu tidak jarang menimbulkan ketegangan-ketegangan. Bahkan sering dijumpai masing-masing pihak merasa dirinya paling benar, sementara yang lain salah.

Dialog ini bisa disebut dialog intra agama atau dialog intern umat beragama. Ada juga yang menyebut dialog intra agama ini sebagai dialog komunitas basis imani (*basic faith community*) sebagaimana disebutkan oleh Banawiratma. Dialog ini dilakukan di kalangan intern pemeluk agama masing-masing, untuk menimba kekayaan tradisi imannya sendiri-sendiri dan menggali sumber-sumber imannya sendiri. Dialog ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan yang khas umat beriman kepada yang lain, dan dalam rangka mempertanggungjawabkan imannya.³³

Masalah perbedaan-perbedaan di dalam agama, termasuk agama Islam, adalah sesuatu yang sangat dimaklumi. Perbedaan ini sudah terjadi sepanjang sejarah umat Islam, paling tidak sejak masa akhir khalifah Usman bin Affan dan pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Persoalan yang dihadapi pun tidak kalah rumit dengan persoalan antar umat beragama, karena di dalamnya juga muncul “klaim-klaim kebenaran” dari masing-masing pihak.

Sepanjang sejarahnya, Islam mengalami perbedaan-perbedaan yang akut. Di antara perbedaan-perbedaan yang besar adalah adanya aliran dalam bidang kalam (teologi), mazhab-mazhab fiqih, tarekat dan tasawuf, aliran-aliran filsafat, dan apalagi friksi-friksi politik. Dalam bidang kalam dikenal ada Khawarij, Syi’ah, Murji’ah, Jabariyah, Qodariyah, Mu’tazilah, Salafiyah, Ahlussunnah (Asy’ariyah

³³ Banawiratma, “Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik,” in *Dialog: Kritik & Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), 24–27.

dan Maturidiyah) dan aliran-aliran yang muncul di era modern dan era kontemporer. Dalam bidang fiqih dikenal ada madzhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Isma'ili. Dalam bidang tasawuf dikenal ada model Al-Ghazali, al-Junaidi, al-Hallaj, dan Ibnu 'Arabi. Dalam bidang tasawuf ini kemudian berkembang berbagai model tarekt. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain. Perbedaan-perbedaan itu telah meluas menjadi fenomena global di dunia Islam, sehingga di Indonesia pun bisa diamati kenyataan itu meskipun tidak sama persis, misalnya NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Washliyah. Al-Irsyad. Salafi dan sebagainya.

Dalam Islam, dialog intra agama adalah perwujudan dari apa yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam wilayah "*ukhuwah Islamiyah*" (persaudaraan di antara umat Islam). Sebuah hadis telah mengingatkan bahwa "*al-muslimu akhul-muslim*" (orang Muslim yang satu dan muslim yang lain adalah bersaudara). Bahkan, di antara sesama umat Muslim diibaratkan seperti satu tubuh yang saling melengkapi. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain pasti merasakan sakitnya juga. Artinya, di antara sesama umat Islam dianjurkan untuk selalu menjalin persaudaraan, kerjasama, saling tolong menolong, saling membantu, dan saling menasehati, sebagaimana dianjurkan dalam surat *al-Asr*.

Semua itu diperlukan adanya suatu dialog yang jujur dari masing-masing pihak. Keterbukaan hati masing-masing untuk tidak memiliki sikap benci, dendam, bohong, hasud, menjadi modal yang utama. Suatu hadis telah mengingatkan, "bukan orang mukmin, orang yang suka mencela, suka melalnat, perbuatannya keji dan rendah budinya." "Janganlah kamu saling menghasut, saling berpalingan dan benci membenci (dendam), tetapi jadilah kamu sebagai hamba yang bersaudara." Dalam Al-Qur'an disebutkan:

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah

mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya? Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Hujurât (49) : 12.)

Dialog intern atau intra agama ini sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya pertikaian atau bahkan perang saudara di antara umat suatu agama tertentu. Dialog intra agama bisa berfungsi untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan beribadah kepada Tuhan. Menyamakan persepsi dan menyusun langkah bersama untuk melakukan aktivitas yang memberi manfaat yang lebih besar kepada umat.

b. Dialog antar agama

Dialog antar agama adalah dialog yang dilakukan antara pemeluk agama yang satu kepada pemeluk agama yang lain. Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali agama dan kepercayaan. Ada agama yang mendapatkan respons luas dan ada juga yang kurang luas. Di antara agama-agama besar (banyak pemeluknya) adalah agama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, Konghucu, dan masih banyak agama-agama kecil lainnya. Al-Qur'an sendiri sudah mengingatkan bahwa manusia memang dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia saling mengenal, saling menghargai satu sama lain (Q.S. Al-Hujurât (49): 13). Hal ini tentu saja sekaligus berbagai perbedaan agama yang dianut oleh manusia (Q.S. Al-Kâfirûn (109): 6). Di antara agama-agama yang ada di dunia ini tidak jarang juga terjadi ketegangan-ketegangan, bahkan sampai pada perebutan klaim kebenaran yang harus dimiliki oleh salah satu pihak. Ketegangan antara agama Yahudi dan Kristen, antara agama Kristen dan Islam, antara Islam dan Hindu masih saja mewarnai kehidupan manusia.³⁴

Dialog ini, oleh Banawiratma, disebut dengan dialog komunitas basis antar iman (*basic interfaith community*). Dialog ini membicarakan fungsi keagamaan, menganalisis situasi yang dialami bersama, kajian teologis baik ilmiah maupun pengalaman. Dialog ini juga mungkin

³⁴ Samuel P. Huntington, “Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?” *Jurnal Ulumul Qur'an* IV, no. 5 (1993).

membicarakan tentang hal-hal yang menjadi kecurigaan masing-masing, misalnya tentang isu kristenisasi dan islamisasi.³⁵

Istilah dialog antar agama mempunyai kandungan yang sama dengan dialog antara pemimpin/pemeluk agama. Menurut Masdar Faridl Mas'udi, dialog antar agama adalah dialog antar para pemimpin jemaat agama, karena mereka selalu terlibat konflik. Akar dari konflik adalah karena mereka memahami agama secara simbolik, bahkan simboliknya simbolik, tetapi dengan klaim agama sejati berikut kemutlakan dan kesakralannya.³⁶

Berdasarkan ajaran Islam, seseorang tidak boleh mencela, mencaci, mengumpat, menganggap rendah, berprasangka buruk, benci-membenci, menghasut, dan berkata yang menyakitkan hati orang lain. Ini semua adalah untuk menjaga persaudaraan dan suasana aman damai, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang-orang yang dzalim.” (Q.S. Al-Hujurât (49) : 11)

Di dalam ayat di atas jelas sekali bahwa suatu kaum atau suatu pemeluk agama tertentu tidak diperkenankan mengolok-olok kaum atau umat agama lain. Suatu kaum tidak boleh masing-masing individu baik laki-laki maupun perempuan saling mengolok-olok kepada yang

³⁵ Banawiratma, “Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik,” 24–27.

³⁶ Masdar F. Mas'udi, “Agama Dan Dialognya,” in *Dialog: Kritik & Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), 155.

lain. Semua pihak tidak boleh saling mencela dan memanggil dengan panggilan-panggilan atau gelar yang buruk. Siapaun yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan tidak pernah menyesali atau memperbaikinya maka ia dikategorikan sebagai orang dholim.

Tuhan telah memberikan rezeki, karunia dan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya. Semua dari manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT, Tuhan yang maha Esa. Apa yang dilakukan oleh manusia tidak hanya berhenti di dunia saja, tapi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan adalah pertanggung-jawaban pribadi. Semua akan mempertanggungjawabkan masing-masing, siapa yang benar dan siapa yang salah. Al-Qur'an sudah mengajarkan masalah ini.

“Katakanlah: Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah: “Allah”, dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah: “Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat, dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat.

Katakanlah: “Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi Keputusan lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Saba' (34) : 24-26)

Dialog antar umat agama merupakan suatu keniscayaan di tengah percaturan dunia global. Pertemuan dan pergaulan di antara semua pemeluk agama tidak mungkin dapat dapat dihindari. Karena itu, untuk mengantisipasi potensi-potensi terjadinya pertikaian antar umat beragama maka dialog antar agama sangat perlu digalakkan.

2. Materi Dialog

Secara garis besar, materi yang dapat diperbincangkan dalam dialog mencakup tiga hal, yaitu masalah teologis, masalah etika, dan masalah pengalaman keagamaan (empiris). Masalah-masalah ini bisa

diperbincangkan oleh tingkat subjek manapun dari pembagian subjek dialog di atas.

a. Dialog Teologis

Pada tingkat teologis, dialog antar agama berbicara seputar masalah ketuhanan, masalah kenabian, asal usul manusia, akar sejarah agama-agama Ibrahimy (*Abrahamic religions*) atau hal-hal lain yang bersiat teologis. Dialog teologis ini, misalnya, berupa perbincangan tentang keesaan Tuhan, otentisitas kitab suci, keabsahan seorang Nabi atau Rasul. Perbincangan tentang Tuhan adalah salah satu aspek yang paling sentral dalam agama manapun.³⁷ Dialog teologis ini terjadi pada umat intra-agama, umat antar agama atau umat beragama dan umat tidak beragama. Di dalam umat Islam misalnya, pernah ada pengalaman yang sangat seru dan memuncak dalam wilayah kalam (teologi), sehingga muncul tuduhan kafir, munafik, murtad dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Umat Nasrani juga mengalami hal yang sama dengan munculnya Kristen Protestan dan Katolik, belum lagi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil di dalam agama Kristen. Agama Hindu, Budha dan sebagainya, juga mengalami hal yang sama.

Dalam dialog teologis ini, para pemuka agama saling menukar informasi tentang keyakinan, kepercayaan dan amalan-amalan agama mereka, dan berusaha untuk mencari saling pengertian.³⁸ Selain itu, dialog teologis adalah dialog yang membicarakan warisan-warisan keagamaan dengan nilai-nilainya agar dapat memahami dengan lebih dalam dan menghargai lebih tulus.³⁹

Dialog teologis ini adalah dialog yang tidak mudah. Dialog teologis ini biasanya bisa dilakukan oleh para ilmuan dari masing-masing agama yang bersedia membuka diri untuk mau memahami teologi

³⁷ Azra Azyumardi, "Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama: Perspektif Islam," in *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Baliitbang Depag RI, 1997), 12.

³⁸ Ali, "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah Dan Misi," 211.

³⁹ Sumartana, *Dialog Kritik Dan Identitas Agama*, xvii.

atau keyakinan umat lain. Dialog teologis ini sesungguhnya sangat bermanfaat untuk membangun saling pemahaman terhadap keyakinan yang dimiliki masing-masing pemeluk agama. Hal ini berkonsekuensi pada penggunaan bahasa dan penyesuaian perilaku dalam pergaulan-pergaulan yang melibatkan antar umat beragama.

b. Dialog Etis

Pada tingkat etis dialog antar agama membicarakan hal-hal yang bersifat moralitas dan etis yang harus dilakukan oleh siapa pun pemeluk agama dan orang yang tidak beragama. Manusia sesungguhnya memiliki nasib yang sama sebagai manusia yang perlu hidup, makan, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dialog etis ini lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan dialog teologis.

Persoalan etika atau moralitas adalah persoalan bersama umat beragama. Terjadinya praktek-praktek ketidakadilan, baik ekonomi maupun politik, yang berimbas pada nasib seseorang adalah persoalan bersama umat beragama. Maraknya perilaku kekerasan, kerusakan, pertengkaran, perkelahian pelajar, dan semacamnya adalah keprihatinan bersama umat beragama. Berkembangnya budaya mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, perjudian, dan penyimpangan seksual juga merupakan keprihatinan bersama umat beragama. Begitu juga berbagai pengalaman pilu kekerasan anak terhadap orang dan juga orang tua terhadap anak adalah persoalan yang dihadapi umat beragama.

Di dalam dialog etis ini umat beragama dapat menyampaikan prinsip-prinsip apa yang bisa dipakai untuk mendukung aktivitas umat beragama secara umum. Prinsip-prinsip etis dari masing-masing agama itu kemudian perlu dipertemukan antara satu dengan lainnya sehingga bisa menjadi rumusan etika yang bersifat universal. Etika universal atau moralitas universal ini tentu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga hidup bersama. Etika universal ini antara lain adalah hak asasi manusia, kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Ini

semua diperlukan untuk membangun perdamaian, keharmonisan dan kesejahteraan hidup bersama.⁴⁰

c. Dialog Empiris

Pada tingkat empiris dialog antar agama tidak hanya bergerak dalam dataran pengetahuan mengenai agama lain, tetapi juga dalam dataran pengalaman dan keterlibatan iman yang mendalam. Dengan kata lain adalah pertemuan antara iman dengan iman.⁴¹ Ada yang mengatakan bahwa dialog ini merupakan dialog tinggi, suatu dialog yang memajukan penghayatan nilai-nilai rohani yang mendalam. Pada dialog inilah masing-masing berbagi pengalaman doa, kontemplasi, meditasi dan yang lebih dalam lagi yaitu pengalaman mistik.⁴² Dalam dialog pengalaman keagamaan ini para partisipan dialog diberi kesempatan untuk membagikan pengalaman-pengalaman keagamaan mereka yang berakar pada tradisi-tradisi agama masing-masing.⁴³

Masing-masing umat beragama mengomunikasikan pengalaman agama, doa dan meditasi, dzikir, tafakkur, puasa, ziarah tempat suci yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Dialog semacam ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya mereka yang memiliki keyakinan mendalamlah yang dapat melakukannya. Doa bersama adalah salah satu bentuk dialog ini. Hal itu bukan berarti mereka melakukan doa bersama, karena doa didasarkan pada keyakinan masing-masing, tetapi mereka bisa datang bersama untuk berdoa dengan maksud yang sama. Doa semacam ini pernah dilakukan tanggal 27 Oktober 1986 ketika “Hari Doa Sedunia untuk Perdamaian” di Assisi. Setiap jamaah berdoa dengan cara mereka sendiri-sendiri dan tidak mengikuti doa agama lain.⁴⁴

⁴⁰ Hans and Karl-Josef Kuschel (ed.) Kung, *A Global Ethic* (New York: Continuum, 1993).

⁴¹ Banawiratma, “Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik,” 24.

⁴² A. Ligoy CP, “Gereja Indonesia Dan Dialog Antar Agama,” *Majalah Rohani*, 1997.

⁴³ Sumartana, *Dialog Kritik Dan Identitas Agama*, xvii.

⁴⁴ Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah Dan Misi,” 210.

Doa bersama semacam itu juga marak di Indonesia belakangan ini. Para pemuka agama melakukan doa bersama seperti doa bersama di atas. Salah satu lembaga yang sering melaksanakan doa bersama ini adalah Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB) Yogyakarta, seperti yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2000 di Sanggar Candi Sapta Rengga Surakarsan Yogyakarta. Sebelum itu juga pernah dilaksanakan di Kraton Yogyakarta, tepatnya bulan Mei 1998 menjelang kejatuhan rezim Orde Baru. Sekarang ini, kegiatan doa bersama sangat sering dilakukan oleh pemeluk antar umat beragama. Apalagi, sekarang ini sudah ada wadah antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kabupaten kota dan propinsi, sehingga kegiatan doa bersama ini bukan sesuatu yang asing lagi.

3. Strategi Dialog

Dilihat dari strateginya, dialog dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dialog kehidupan (biasa, sederhana, tidak formal), dialog akademik atau intelektual (oral, tertulis, diskusi, penelitian, sarasehan, dan lokakarya), dialog aksi.⁴⁵

a. Dialog Tidak Formal

Pada dataran yang tidak formal (dialog kehidupan) dialog dapat dilakukan oleh mereka yang berbeda agama dengan cara makan bersama di warung sambil memperbincangkan masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan. Dengan kata lain, dialog tidak dilakukan secara verbal dan teologis belaka (dialog subjektif-objektif), tetapi lebih mengandalkan pada mekanisme kultural.⁴⁶ Selain itu, secara jujur masing-masing pihak bisa menerangkan imannya, mendasarkan diri

⁴⁵ Jacques Waardenburg, "Critical Issues in Muslim-Christian Relations: Theoretical, Practical, Dialogical, Scholarly," *Islam and Christian-Muslim Relations* 8, no. 1 (1997).

⁴⁶ Emha Ainun Nadjib, "Dialog Antar Agama Dan Batas-Batasnya," in *Dialog: Kritik & Identitas Agama*, 1993, 158–159.

pada kehendak untuk saling belajar.⁴⁷ Orang dari pelbagai macam agama dan keyakinan hidup bersama, dan kerja sama untuk saling memperkaya kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, dengan perantaraan melakukan nilai-nilai dari agama masing-masing tanpa diskusi formal. Dialog semacam ini bisa dilakukan dalam keluarga, sekolah, militer, rumah sakit, industri, kantor, negara dan tempat-tempat lain.⁴⁸ Dialog kehidupan adalah dialog yang berusaha membuka hidup terhadap kegembiraan, kesusahan, keprihatinan dan kegelisahan hidup sesama manusia.⁴⁹ Dialog pada tingkat ini, komunikasinya bersifat timbal balik.⁵⁰

Menurut Banawiratma, dialog ini adalah dialog kehidupan antar umat beriman dalam komunitas basis manusiawi (*basic human community*). Ini adalah dataran dialog dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang-orang yang berbeda iman mengalami situasi yang sama, suka-duka, kecemasan dan pengharapan bersama. Di antara mereka ada kepedulian kemanusiaan atau kepedulian insani yang tidak memakai label agama. Sebagaimana dimaklumi oleh semua orang bahwa manusia memiliki kebutuhan yang sama, kebutuhan terhadap air bersih, perumahan yang sehat, pendidikan yang cukup, kebutuhan lapangan pekerjaan, kebutuhan keamanan, kebutuhan ketentraman dan sebagainya. Mereka ini mempunyai kepedulian yang sama terhadap ketidakadilan yang merugikan sesama manusia, yang tidak mempedulikan agama tertentu.⁵¹

Dialog tidak formal ini bisa dilakukan pada semua tingkatan usia. Perkumpulan-perkumpulan lintas agama merupakan media yang sangat mendukung adanya dialog tidak formal ini. Komunitas pemuda lintas agama yang bergaul bersama melakukan kerja-kerja

⁴⁷ M Yuwono, "Menuju Dialog Muslim-Kristen (Katolik) Di Indonesia," *Majalah Rohani*, 1981, 208.

⁴⁸ Ali, "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah Dan Misi," 209.

⁴⁹ Dkk, *Dialog Krit. Dan Identitas Agama*, xvi.

⁵⁰ Ligoy CP, "Gereja Indonesia Dan Dialog Antar Agama," 128.

⁵¹ Banawiratma, "Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik," 24.

sosial lintas agama sebenarnya media yang sangat kondusif untuk berdiskusi atau memperbincangkan kerukunan dan sebagainya. Begitu, silaturahmi antar personal tokoh-tokoh agama atau antar umat beragama dengan santai berbincang dan berdiskusi tentang masalah-masalah agama yang dihadapi dan mencari jalan keluar untuk kebaikan bersama juga merupakan dialog tidak formal.

b. Dialog Akademik

Pada tataran akademik atau intelektual dialog antar agama bisa dilakukan melalui diskusi, seminar, lokakarya, penulisan buku, artikel di koran atau majalah, talk show, ceramah dan penelitian. Bentuk dialog ini biasanya diikuti oleh kalangan akademisi. Melalui bentuk dialog ini, gagasan atau pemikiran dari masing-masing tokoh umat beragama bisa diamati.

Sejak dialog antar agama menjadi concern pemerintah dan juga para pemeluk agama, maka dialog akademis ini sangat berkembang. Mulai tahun 1990-an dimotori oleh tokoh-tokoh lintas agama seperti Gus Dur, Nurcholish Madjid, Mukti Ali, Djohan Effendi dan tokoh lain-lain kegiatan dialog antar agama berkembang di kampus-kampus. Kegiatan tersebut terus berjalan pada tahun 2000-an sampai sekarang. Setelah keluarga Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2006 yang mengatur kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maka dialog-dialog akademik semakin sering dilakukan.

Dialog secara akademik ini bahkan bukan hanya di kampus-kampus, tapi juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga sangat sering melakukannya. Selain itu, dialog akademik juga sering difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian maupun oleh pemerintah daerah oleh gubernur maupun bupati/walikota. Bahkan tidak jarang difasilitasi oleh pihak kepolisian dan militer dengan tajuk dan kegiatan yang bervariasi.

c. Dialog Aksi

Pada tataran aksi dialog dapat juga berupa bagaimana masyarakat bisa melakukan gotong royong, membersihkan parit, mengecat tembok

dan segala macam. Umat agama manapun memiliki kebutuhan yang sama dalam hal ini. Mengamankan lingkungan, menciptakan lingkungan yang sehat, keindahan dan keramahan adalah tanggung jawab semua manusia.⁵² Dialog aksi adalah dialog yang mengajak untuk bekerja sama mengatasi pembatasan-pembatasan yang menghalangi kehidupan secara bebas dan manusiawi.⁵³ Dialog aksi bersama (dialogue in action) mencoba memperjuangkan masyarakat yang lebih adil, lebih merdeka, lebih manusiawi. Pada dialog ini, antar umat beragama bersama-sama mentransformasikan masyarakat agar menjadi lebih adil, lebih merdeka dan manusiawi, agar keutuhan ciptaan, lingkungan hidup dilestarikan.⁵⁴

Dengan kata lain, ini adalah dialog dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan harkat umat manusia dan pembebasan integral dari umat manusia. Pemeluk-pemeluk agama dapat mengadakan kerja sama dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan, dalam meningkatkan kehidupan keluarga, dalam proyek bersama untuk membantu rakyat yang menderita dari kekeringan, kemiskinan, kekurangan makan, membantu para pengungsi dan terutama meningkatkan keadilan dan perdamaian.⁵⁵

4. Tujuan, Fungsi dan Sasaran Dialog

Selanjutnya, suatu aktivitas dialog pasti memiliki tujuan, baik tujuan itu disadari atau tidak disadari. Tujuan dialog sangat bervariasi sesuai dengan kondisi, masalah dan tantangan yang dihadapi atau yang mau diselesaikan. Dari pemaknaan dialog di atas, tujuan dialog antar agama adalah sebagai berikut. (1) mencari pemahaman bersama yang lebih terbuka dan adil terhadap perbedaan pendapat, atau bahkan mencari titik temu (*kalimatun sawâ*) dari perbedaan itu. Dengan kata lain, membudayakan keterbukaan untuk mencari kebenaran di

⁵² Nadjib, "Dialog Antar Agama Dan Batas-Batasnya," 159.

⁵³ Sumartana, *Dialog Kritik Dan Identitas Agama*, xvi.

⁵⁴ Banawiratma, "Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik," 24–27.

⁵⁵ Ali, "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah Dan Misi," 209–210.

antara sesuatu yang berbeda-beda, tapi bukan menentukan agama mana yang paling benar, juga bukan untuk membanding-bandingkan agama. Selain itu juga untuk membangun toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati. (2) menghidupkan suatu kesadaran baru tentang keprihatinan agama berkenaan dengan masalah kemanusiaan. Sesungguhnya masing-masing agama memiliki keprihatinan yang sama tentang kehidupan manusia, paling tidak dilihat dari aspek kemanusiaan yang membutuhkan makan, kesehatan, tempat tinggal, perdamaian, keadilan dan lain-lain. (3) membangun kerjasama untuk memecahkan persoalan kemanusiaan bersama di masyarakat serta untuk mencegah terjadinya konflik sesama umat.⁵⁶ Selain itu, juga untuk menanamkan rasa saling menghargai dan saling memerlukan untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian.⁵⁷ Dengan kata lain adalah membangun ko-eksistensi, pembebasan, integrasi, dan bahkan pro-eksistensi.⁵⁸

Dialog juga bisa berfungsi sebagai kritik, baik ke dalam (ad intra) maupun ke luar (ad extra). Artinya, dialog mempunyai fungsi untuk melihat hubungan antara seorang pemeluk agama dengan agamanya, atau antara pemeluk agama dengan agama dan pemeluk agama lain. Untuk mencari kebenaran yang hakiki, maka kritik internal dan eksternal harus dilakukan. Pencarian kebenaran adalah bersifat terus-menerus. Dalam proses kehidupan manusia yang selalu berubah, kebenaran bukanlah bersifat *ready-made* atau *taken for granted* yang bersifat statis. Kebenaran adalah dinamis yang selalu menampakkan diri dan berproses dalam kehidupan, sejarah, dan relasi dengan orang lain. Kebenaran meliputi dimensi praktis dan refleksif. Kebenaran

⁵⁶ Mas'udi, "Agama Dan Dialognya," 155.

⁵⁷ Burhanuddin Daja, *Perbandingan Agama: Suatu Paradigma Studi Strategis Dan Pembangunan Nasional Indonesia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1995), 42.

⁵⁸ Sunardi, "Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama," 74.

adalah kontekstual. Oleh karena itu, perilaku dan pemahaman umat beragama perlu adanya kritik.⁵⁹

Dialog selalu dilakukan dalam konteks tertentu.⁶⁰ Artinya, antara satu masa dengan masa lainnya dimungkinkan (untuk tidak mengatakan dipastikan) ada perbedaan-perbedaan sesuai dengan tantangan dan masalah pada masanya masing-masing. Dalam konteks sekarang ini misalnya, pembicaraan mengenai peran agama perlu ditempatkan pada konteks persoalan global saat ini; misalnya persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan dan lingkungan hidup.

Secara lebih mendalam, dialog bukan hanya sekedar memajukan kerjasama dan sikap terbuka, melainkan juga memurnikan dan mendorong untuk menggapai kebenaran dalam kehidupan, kesucian, keadilan, cinta kasih (rahmah), dan perdamaian. Inilah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki tingkat pengetahuan dan penghayatan agama yang sangat tinggi, bahkan tidak jarang mereka dianggap telah keluar dari suatu ajaran agama tertentu. Dengan kata lain, dialog ini adalah dalam level paling mendalam. Ada yang mengatakan bahwa dialog ini adalah dialog keselamatan, artinya dialog yang terus menerus menemukan, memperjelas dan memahami persatuan manusia sepanjang masa. Dialog keselamatan merupakan sharing keselamatan. Dalam dialog ini masing-masing yang terlibat di dalamnya diajak untuk saling membangkitkan pengalaman keselamatan.⁶¹ Suatu dialog antar agama adalah sama dengan dialog keselamatan yang dicita-citakan masing-masing agama.⁶²

⁵⁹ Komaruddin dan Ahmad Gaus AF. (ed.) Hidayat, "Lingkup Dan Metodologi Studi Agama-Agama," in *Passing Over, Melintasi Batas Agama* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Paramadina, 1998), 42–43.

⁶⁰ Th. Sumartana, *Dialog: Kritik Dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), xvii.

⁶¹ Ligoy CP, "Gereja Indonesia Dan Dialog Antar Agama," 128–129.

⁶² Budhy Munawar Rahman, "Kesatuan Transenden Dalam Teologi: Perspektif Islam Tentang Kesamaan Agama-Agama," in *Dialog: Kritik & Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), 138.

Satu hal yang dapat dicermati dari pendapat Mukti Ali adalah bahwa dialog antar agama membantu kepada setiap peserta untuk tumbuh dalam kepercayaannya sendiri, manakala ia berjumpa dengan orang yang berlainan agama dan bertukar pikiran tentang berbagai keyakinan dan amalan yang diyakini dan diamalkan oleh masing-masing pemeluk agama. Dialog antar agama juga dapat membantu untuk meningkatkan kerja sama di antara para penduduk suatu negeri. Maksud yang paling penting dari dialog itu adalah usaha untuk keselamatan.⁶³

Menurut Burhanuddin Daja, dialog antar agama sangat diperlukan tidak hanya untuk menghadapi konflik dan ketegangan antara agama tetapi juga untuk transformasi sosial dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, berbagai problem umat beragama adalah sangat kompleks. Hal ini tidak cukup hanya diselesaikan oleh satu kelompok agama, tetapi memerlukan sumbangan dari yang lain.

“An interreligious dialogue was also greatly needed in facing not only religious conflicts and tensions but also social transformation and economic development, because the set of problems related to them is too complex to be solved by only on religious group and without contributions of religion values. By dialogue we make an effort to facilitate genuine communication as an expression of a readiness to listen to and respect one another, and as an openness to speak about, and to search for common concerns.”⁶⁴

Berkaitan dengan tujuan, fungsi, dan sasaran dialog antar agama di atas, pembagian Leonard Swidler menarik untuk diperhatikan. Swidler menetapkan ada sepuluh hal agar dialog antar agama bisa terlaksana dengan wajar. Ia menyebutnya sebagai “basic ground rules or commandements of interreligious and interideological dialogue”. Sepuluh aturan dasar atau “commandements” tersebut adalah sebagai berikut. (1) The primary purpose of dialogue is to learn, that is, to change and grow in the perception and understanding of reality, and

⁶³ Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah Dan Misi,” 215–218.

⁶⁴ Burhanuddin Daja, “State and Religious Harmony in Contemporary Indonesia,” *Religiosa* I, no. 1 (1995): 14.

then to act accordingly. (2) Interreligious, interideological dialogue must be a two-side project -- within each religious or ideological community and between religious or ideological communities. (3) Each participant must come to the dialogue with complete honesty and sincerity. (4) In interreligious, interideological dialogue we must not compare our ideals with our partner's practice, but rather our ideals with our partner's ideals, our practice with our partner's practice. (5) Each participant must define himself. (6) Each participant must come to the dialogue with no hard-and-fast assumptions as to where the points of disagreement are. (7) Dialogue can take place only between equals. (8) Dialogue can take place on the basis of mutual trust. (9) Persons entering into interreligious, interideological dialogue must be at least minimally self-critical of both themselves and their own religion or ideological traditions. (10) Each participant eventually must attempt to experience the partner's religion or ideology "from within".⁶⁵

Sementara itu, menurut Burhanuddin Daja, kesepuluh aturan dasar tersebut mesti harus ditambah beberapa hal berikut ini. (1) Dialog antar agama harus dipersiapkan secara profesional dan diorganisir secara rapi. (2) Dialog antar agama yang sesungguhnya harus hanya disertai oleh lapisan elit agama, terutama kalau dialog itu adalah dialog teologis. (3) Dialog harus selalu dilakukan dalam konteks tertentu. (4) Peserta dialog harus mempunyai keinginan-tahuan yang sungguh-sungguh terhadap nilai-nilai, ritus, dan simbol-simbol agama lain dan atau agamanya sendiri dari segi kelemahan, kekuatan atau hal-hal yang konstan dan mungkin dapat berubah, untuk landasan hidup bersama di dunia secara damai.⁶⁶

⁶⁵ Swidler, "The Dialogue Decalogue: Ground Rules for Interreligious, Interideological Dialogue," 142-143.

⁶⁶ Daja, *Materi Kuliah Hubungan Antar Agama*.

BAB II

PROBLEMATIKA DIALOG ANTAR AGAMA

A. Perkembangan Dialog

Sebelum menjadi suatu gerakan yang terstruktur, kemunculan dialog antar agama telah diawali dengan suatu dialog kehidupan (*dialogs of life*). Dialog kehidupan sudah dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Dialog kehidupan menjadi keniscayaan bagi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendirian. Manusia memerlukan dialog. Manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa dialog. Ini adalah sunnatullah, kodrat, alamiah. Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan (Q.S. Al-Rûm (30):21). Allah juga menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku (Q.S. Al-Hujurât (49):13). Karena itulah, dialog kehidupan menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan oleh manusia.

Dialog kehidupan adalah dialog yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari yang serba sederhana. Dialog ini tidak berlangsung di ruang kuliah, di ruang sidang, acara seminar, dan bentuk-bentuk formal lainnya. Dialog kehidupan berlangsung pada saat masyarakat hidup saling bertetangga atau bekerja bersama dan berdampingan bersama di tempat manapun, di kantor, pasar, sekolah, rumah sakit, dan lain

sebagainya. Dalam interaksi itu masyarakat saling menunjukkan sikap persaudaraan dan keramahan, saling membantu, saling membuka hati bagi persoalan kehidupan, saling mendidik anak-anak, merawat orang sakit dan berusia lanjut, membela kaum miskin yang tertindas, berjuang mewujudkan keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia, dan sebagainya yang berkaitan dengan persoalan kemanusiaan riil sehari-hari.⁶⁷

Dialog antar agama mulai menjadi salah satu pokok perhatian penting di kalangan agama-agama dunia adalah pada pertengahan kedua abad ke-20. Di kalangan Nasrani, tahun 1929 sudah didirikan sebuah panitia Consultation on the Church and the Jewish People (CCJP) yang menangani hubungan (dialog antar agama) antara kalangan Gereja dan bangsa Yahudi. Pencetusnya adalah Dewan Pekabaran Injil se-Dunia (International Missionary Council), yang semula bernama Committee on the Approach to the Jews (Komite untuk Pendekatan orang Yahudi). Dialog antar agama tersebut adalah dialog antar pemeluk agama Yahudi dan Nasrani.⁶⁸ Secara resmi, dialog antar agama mulai dibicarakan dan dipikirkan sejak Konsili Vatikan II tahun 1961, dan dengan dibukanya Sub Unit Dialog Antar Agama oleh Dewan Gereja-Gereja se-Dunia tahun 1971.⁶⁹

Di Indonesia sendiri, usaha dini dalam dialog antar agama telah mulai dirintis pada tahun 1967. Ketika itu pemerintah melalui Departemen Agama mencoba memprakarsai Musyawarah Antar Agama dengan menyertakan pemuka agama-agama di Indonesia. Musyawarah Antar Agama itu dilaksanakan menyusul meletusnya

⁶⁷ Ignatius L. Madya SJ. Utama, "Dialog Kehidupan Sebagai Cara Menjadi Gereja," *Majalah Rohani* (Yogyakarta, 1997), 123.

⁶⁸ D.C. Mulder, "Pengalaman-Pengalaman Mengenai Dialog Agama: Dari Dewan Gereja-Gereja Dunia," *Majalah Gema Duta Wacana*, 1994, 72–73.

⁶⁹ D.C. Mulder, "Perkembangan Dialog Antar Agama Di Dunia Modern," in *Dialog: Kritik Dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), 233–247.

peristiwa Meulaboh, Aceh Barat, awal Juli 1967, dan peristiwa Makassar, 1 Oktober 1967.⁷⁰

Dari sisi hasil konkrit, usaha ini belum mendapatkan sesuatu yang membanggakan, karena Musyawarah Antar Agama tidak menghasilkan kesepakatan mengenai persoalan misi, dakwah atau penyebaran agama terhadap umat lain. Pada era tahun 60-an itu kehidupan beragama di Indonesia memang diwarnai oleh kesadaran misi yang tinggi, sehingga usaha dialog dirasakan sekali mendapati banyak hambatan. Namun, sebagai usaha awal, usaha ini berhasil menciptakan embrio yang positif untuk perkembangan dialog antar agama masa selanjutnya. Musyawarah antar Agama menjadi titik awal pembentukan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama untuk masa selanjutnya.⁷¹

Memasuki tahun 70-an sampai pertengahan era 90-an, meski kesadaran misi tetap tinggi, kehidupan beragama dihadapkan pada konteks modernisasi atau pembangunan. Konsentrasi pemerintah saat itu lebih ditekankan pada bidang pembangunan. Upaya dialog antar umat beragama pada saat itu lebih dimaksudkan untuk menghindari konflik dan untuk membicarakan partisipasi agama dalam proses perubahan masyarakat melalui pembangunan.⁷² Selama masa itu respons masing-masing pemeluk agama sangat bervariasi. Banyak ide-ide agama muncul untuk merespons proses pembangunan atau modernisasi tersebut. Di antara respon tersebut adalah agama dilihat sebagai kekuatan kritis dengan memunculkan ide-ide profetis dan transformatif dalam menyikapi efek, dampak, dan implikasi-implikasi kapitalisme yang dibungkus modernitas.⁷³ Agama dijadikan sebagai kekuatan kritis atas pembangunan.

⁷⁰ Umar Hasyim, *Toleransi Dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, n.d.), 291 dan 314.

⁷¹ Sudjangi, *Profil Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Di Indonesia: Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 1999), 1.

⁷² Mukti Ali, *Lmu Perbandingan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 1990), 67–68.

⁷³ Budhy Munawar Rahman, “Agama, Modernitas Dan Pluralisme Bangsa,” in *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog “Bebas”Konflik* (Bandung: Pustaka

Khususnya dalam konteks Islam, dan agama pada umumnya, hubungan agama dan negara menunjukkan hubungan yang subordinatif. Negara menempati posisi yang kuat dan sebaliknya agama pada posisi yang lemah. Ada yang menyebut hubungan semacam itu sebagai pola “hegemonik”, yaitu suatu bentuk hubungan di mana birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang stabil dan kuat, secara kultural dan struktural berada dalam posisi yang dominan dibanding dengan kekuatan-kekuatan sosial-politik lainnya. Posisi hegemonik ini erat kaitannya dengan strategi dan kebijakan untuk mengamankan pembangunan dan modernisasi, dengan tujuan memperbaiki kebobrokan ekonomi dan politik warisan Orde Lama.⁷⁴

Era tahun 1980-an ditandai terjadinya perubahan-perubahan sosial sebagai dampak dari kebijakan pembangunan Orde Baru. Pembangunan ekonomi adalah faktor determinan perubahan sosial yang ada. Proses intelektualisasi berkembang sangat pesat, bukan hanya di kalangan masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat perdesaan. Tidak sedikit pelajar-pelajar Indonesia menempuh jenjang pendidikan di luar negeri, baik Timur Tengah maupun Eropa dan Amerika. Maraknya intelektualisasi umat Islam ditandai munculnya pemikiran-pemikiran keislaman yang mencoba memberikan formulasi, interpretasi dan refleksi terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan dalam arti luas, baik dalam bidang politik, sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.⁷⁵

Proses intelektualisasi juga terjadi pada mereka yang memiliki perhatian dalam kehidupan antar umat beragama, bahkan proses itu sesungguhnya sudah terjadi pada awal masa Orde Baru. Berkenaan dengan gerakan dialog antar umat beragama, keberadaan cendekiawan Muslim tentu tidak diragukan lagi. Beberapa nama bisa disebutkan, misalnya M. Rasjidi, Moh. Natsir, Mukti Ali, Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Burhanuddin Daja, Alwi Shihab

Hidayah, 1998), 82.

⁷⁴ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), 327–329.

⁷⁵ Ibid.

dan sebagainya. Mereka telah menawarkan gagasan-gagasannya dalam berbagai tulisan baik yang sudah dibukukan maupun yang belum. Peran-peran tersebut terus berlangsung sampai sekarang ini, bahkan mungkin sampai pada waktu yang tidak bisa diprediksikan.

Gagasan atau pemikiran cendekiawan Muslim tentang dialog antar agama adalah satu jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi pada masa zamannya. Faktor kontekstual dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing cendekiawan melahirkan satu corak pemikiran yang khas bagi zamannya, dan tentu saja pemikiran mereka memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan pada zamannya dan kekuatan pada masa sesudahnya jika pemikiran itu menemukan satu kondisi masyarakat yang sesuai dengan kondisi munculnya pemikiran itu pada mulanya. Sebaliknya, pemikiran itu sangat mungkin ditinggalkan, jika dianggap tidak kontekstual dan tantangan yang muncul sudah sedemikian kompleks yang sangat berbeda dengan waktu munculnya pemikiran tersebut.

Munculnya pemikiran-pemikiran itu selalu dipengaruhi oleh pandangan-pandangan normatif keagamaan dan faktor-faktor sosio-kultural yang sedang aktual baik dalam konteks pemikiran maupun praksis, baik secara nasional maupun global. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Taufik Abdullah bahwa setiap peristiwa kemanusiaan atau sosial tidak terjadi dalam suatu “kevakuman”, tetapi dalam suatu wadah struktural. Bahkan peristiwa itu sesungguhnya adalah pula hasil interaksi antar stuktur dengan “aktor peristiwa” atau sesuatu yang dijadikan sebagai subyek dari peristiwa itu.⁷⁶

Dalam konteks Islam, berbagai pemikiran cendekiawan Muslim sejak tahun 1967 merupakan pemikiran yang sangat penting dan bersejarah dalam konteks dialog antar agama karena sejak saat itulah dialog antar agama mulai gencar dilaksanakan. Musyawarah Antar Agama tahun 1967 menjadi momentum yang paling utama. Momentum itu menjadi catatan sejarah yang tidak bisa dilupakan

⁷⁶ Taufik (ed.) Abdullah, *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3S, 1989), ix.

oleh para penganut agama di Indonesia. Sejak saat itulah dialog antar agama gencar dilaksanakan, baik atas prakarsa pemerintah maupun non-pemerintah.⁷⁷

Tahun 1990-an dialog antar agama telah menjadi agenda penting bersama di kalangan umat beragama di tengah sering terjadinya gesekan-gesekan antar umat beragama waktu itu. Dialog-dialog akademik di kampus-kampus dan juga dialog yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat marak dilakukan di tengah banyak ketidakpuasan umat kepada pemerintah Orde Baru. Hal itu berlangsung sampai tahun 2000-an. Tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an adalah ladang subur berkembangnya aktivitas-aktivitas dialog antar agama mengiringi konstelasi sosial politik yang terjadi di Indonesia. Pada akhir pemerintahan Orde Baru, fenomena berhadapan-hadapan antara agama dan negara (lebih tepatnya pemimpin agama dan pemimpin negara) mengiringi perkembangan sosial politik yang terjadi.

Suasana menjelang reformasi di Indonesia tahun 1998 peristiwa-peristiwa yang melibatkan ketegangan-ketegangan sosial begitu mudah terjadi, termasuk antar umat beragama. Hal ini juga terjadi pasca reformasi akhir abad ke-20 dan awal abad-abad ke-21. Pengalaman-pengalaman pilu di Maluku, Sampit, Sambas dan tempat lainnya adalah contoh ketegangan-ketegangan yang terjadi.

Kemudian, sejak tahun 2006 dengan didirikannya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara resmi oleh pemerintah, maka aktivitas dialog antar agama menjadi terlembagakan. Keberadaan FKUB diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa pemeliharaan

⁷⁷ Subhan, "Ilmu Perbandingan Agama: Ketegangan Antara Dialog Dan Dakwah," 4.

kerukunan umat beragama menjadi tanggungjawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur di atas dibantu oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi. Sementara itu, pemeliharaan kerukunan umat Bergama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota. Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota tersebut dibantu oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. Adapun tugas FKUB ada lima, yaitu: 1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; 2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; 3) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakna bupati/walikota; 4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan 5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian ruma ibadah.

Memelihara kerukunan antar umat beragama di tengah banyak isu krusial bukanlah sesuatu yang mudah. Memelihara kerukunan antar umat beragama membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, mulai dari pemerintah, pemimpin agama, tokoh-tokoh masyarakat sampai lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Termasuk dalam hal ini adalah peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB memegang peranan yang sangat strategis. Sebagai institusi yang berada di bawah payung pemerintah daerah, FKUB adalah kumpulan dari semua pemimpin agama. Keberadaan FKUB menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama.

B. Memaknai Universalitas Agama

Dalam Islam, paling tidak, ada tiga hal yang tidak boleh diabaikan dalam kehidupan beragama, yaitu aspek keimanan (teologis), aspek akhlak (etika), dan aspek praksis (pengalaman praksis, berbuat untuk kebenaran). Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang ketiga hal di atas, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. Setidaknya bisa dilihat pada Surat al-‘Ashr. Kandungan Surat al-‘Ashr menunjukkan bahwa aspek teologis, etis dan aksi itu menjadi sesuatu yang tak terpisahkan. Keimanan terimplementasi dalam kesaksian (syahadat) terhadap kebenaran yang bersifat terus menerus (perennial) sepanjang hidup. Etika terimplementasi dalam kesalehan dan amar ma’ruf nahi munkar. Pengalaman konkrit di masyarakat terimplementasi dalam *fastabiq al-khairât*.⁷⁸

Diskursus wacana keagamaan, paling tidak Islam, memperlakukan ketiga hal tersebut secara berkelindan. Abdullah Yusuf Ali misalnya, ia melihat bahwa Islam sebagai agama universal mengandung tiga hal; iman, berbuat baik dan menjauhkan diri dari kebatilan.⁷⁹ Dengan bahasa yang lebih sederhana Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa Islam bukan sekedar ajaran “agama”, melainkan doktrin kehidupan itu sendiri.⁸⁰ Oleh karena itu, agama tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan manusia atau kehidupan ini. Agama dan kehidupan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Agama tidak akan pernah berhenti selama kehidupan manusia masih ada di atas bumi ini, atau sebaliknya.⁸¹

Agama merupakan sesuatu yang riil, bukan ilusi. Keberadaan konsep-konsep teologis yang metafisik tidak menjadi agama bersifat

⁷⁸ Ahmad Suaedy, “Agama, Spiritualitas Baru Dan Keadilan: Perspektif Islam,” in *Spiritualitas Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1994), 165.

⁷⁹ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary* (USA: Anna Corporation, 1989), 106.

⁸⁰ Komaruddin Hidayat, “Agama Untuk Kemanusiaan,” in *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog “Bebas”Konflik* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 43.

⁸¹ Harold (dkk) Titus, *Persoalan-Persoalan Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 414.

transenden an sich. Sebagaimana dikatakan Ignas Kleden, agama tidak berada di langit –sebagaimana idealismenya Plato-, tetapi agama selalu merupakan agama manusia biasa, dengan darah dan daging. Hakekat agama selalu merupakan suatu hakekat yang historis, yang berjuang bersama perubahan dan kefanaan, dan bukanlah suatu hakekat metafisik belaka, yang tertutup, selesai, tak mengandung gerak dalam dirinya, dan menutup dalam keabadian.⁸² Keberadaan agama sebagai realitas yang bermakna tidak pernah absen atau jauh dari kehidupan sehari-hari. Agama bermaksud membantu manusia dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada, baik secara individual maupun sosial. Dengan kata lain agama berorientasi untuk kebahagiaan dan ketentraman manusia. Karena itu, agama selalu mengajarkan tentang moral, akhlak, dan kebaikan-kebaikan.

Untuk itulah, maka perlu memahamai nilai-nilai universal yang ada di dalam Islam (universalitas Islam). Islam mengandung nilai-nilai universal untuk membangun kehidupan umat manusia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebutnya dengan istilah universalisme Islam. Yang dimaksud Gus Dur dengan universalisme Islam adalah prinsip-prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi persamaan derajat di muka hukum dan undang-undang, perlindungan warga masyarakat dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderita kekurangan serta pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan. Universalisme Islam tercermin dalam ajaran-ajaran yang memiliki kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan dengan mempertimbangkan kearifan-kearifan. Ajaran mengenai universalisme Islam tersebut ditampilkan dalam lima jaminan dasar yang harus diberikan kepada warga masyarakat, yaitu: (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (*if u an-nafsi*), (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*if u ad-din*), (3) keselamatan keluarga dan keturunan (*if u an-nasl*), (4) keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan

⁸² Ignas Kleden, “Agama Dan Perubahan Sosial,” in *Agama Dan Tantangan Zaman* (Jakarta: LP3S, 1985), 215–216.

dan pengurusan di luar prosedur hukum (*if u al-māl*), dan (5) keselamatan hak milik dan profesi (*if u al-aqli*).⁸³

Dengan jaminan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali, sesuai dengan hak masing-masing. Dengan jaminan keselamatan keyakinan agama bagi warga masyarakat melandasi hubungan antar-warga masyarakat atas dasar sikap saling hormat-menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar. Bagi Gus Dur, dengan tauhid, Islam menegakkan penghargaan kepada perbedaan pendapat dan perbenturan keyakinan. Dengan jaminan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral yang sangat kuat. Karena keluarga merupakan ikatan sosial paling dasar, maka tidak boleh dijadikan ajang manipulasi dalam bentuk apapun oleh sistem kekuasaan yang ada. Kemudian, dengan jaminan keselamatan harta-benda, hal ini dapat menjadikan sarana berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan profesional dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu. Dengan haknya itulah warga masyarakat secara perorangan memiliki peluang dan sarana untuk mengembangkan diri melalui pola atau cara yang dipilihnya sendiri, namun tetap dalam alur umum kehidupan masyarakat. Kemudian, jaminan keselamatan profesi merupakan penghargaan kebebasan kepada penganut profesi dengan tanggungjawabnya masing-masing.⁸⁴

Kelima unsur hak-hak dasar kemanusiaan di atas tidak otomatis menjamin keselamatan umat manusia, kalau tidak didukung oleh kosmopolitanisme peradaban Islam. Kosmopolitanisme peradaban Islam itu muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralistis budaya dan heterogenitas politik.⁸⁵ Kosmopolitansime peradaban Islam tercapai atau berada pada titik optimal manakala tercapai keseimbangan antara kecenderungan

⁸³ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 3–5.

⁸⁴ *Ibid.*, 5–8.

⁸⁵ *Ibid.*, 9.

normatif kaum Muslim dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang non-muslim). Ia menamakan situasi semacam itu sebagai kosmopolitanisme yang kreatif, yang memungkinkan pencarian sisi-sisi paling tidak masuk akal dari kebenaran yang ingin dicari dan ditemukan.⁸⁶

Dari prinsip-prinsip universalisme Islam itulah mendorong pandangan mengenai kosmopolitanisme peradaban Islam. Mengenai hubungan antara universalisme Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam ini Gus Dur mengatakan :

Mau tidak mau haruslah dikembangkan agenda universalisme ajaran Islam, sehingga terasa kegunaannya bagi umat manusia secara keseluruhan. Toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan dan keprihatinan yang penuh kearifan akan keterbelakangan kaum Muslim sendiri akan memunculkan tenaga luar biasa untuk membuka belenggu kebodohan dan kemiskinan yang begitu kuat mencekam kehidupan mayoritas umat Muslim dewasa ini. Dari proses itu akan muncul kebutuhan akan kosmopolitanisme baru yang selanjutnya akan bersama-sama menganut faham dan ideologi yang lain, turut membebaskan manusia dari ketidakadilan struktur sosial-ekonomis dan kebiadaban rejim-rejim politik yang dzalim. Hanya dengan menampilkan universalisme Islam baru dalam ajarannya dan kosmopolitanisme baru dalam sikap hidup para pemeluknya, Islam akan mampu memberikan perangkat sumberdaya manusia yang diperlukan oleh si miskin untuk memperbaiki nasib sendiri secara berarti dan mendasar, melalui penciptaan etika sosial baru yang penuh dengan semangat solidaritas sosial dan jiwa transformatif yang prihatin dengan nasib orang kecil.⁸⁷

Dengan konsep di atas, Gus Dur tampak ingin menegaskan bahwa Islam menempatkan manusia pada kedudukan kemakhlukan yang sangat tinggi, yang termaktub dari kerangka penciptaannya oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan keadaan (*a san*

⁸⁶ Abdurrahman, *Islam Transformatif*, 89.

⁸⁷ Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*, 13-14.

at-taqwīm). Walaupun ia memiliki potensi untuk menjadi makhluk paling rendah nilainya, kalau ia menyalahgunakan fitrahnya yang mulia itu, pada dasarnya ia adalah tetap makhluk mulia yang dilengkapi dengan budi, akal, perasaan dan ketrampilan untuk mengembangkan diri seolah-olah tanpa batas. Penempatan manusia pada kedudukan sedemikian tinggi ini dalam kosmologi Islam, pada dasarnya menuntut pula penghargaan kepada nilai-nilai dasar kehidupan manusia yang sesuai dengan martabatnya, pelestarian hak-hak dasarnya secara individual maupun secara kolektif, pelestarian hak mengembangkan pemikiran sendiri tanpa takut terhadap ancaman pengekan hak mengemukakan pendapat secara terbuka, dan pengokohan hak untuk mengembangkan kepribadian tanpa campur tangan dari orang lain.⁸⁸

Beberapa poin penting yang dapat digarisbawahi dari rumusan di atas adalah manusia memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan ini dan manusia memiliki potensi budi, akal, perasaan dan ketrampilan. Dengan kedudukan dan potensinya tersebut manusia harus memberi penghargaan kepada nilai-nilai dasar kehidupan manusia, melestarikan hak-hak dasarnya secara individual maupun secara kolektif, melestarikan hak mengembangkan pemikiran sendiri tanpa takut terhadap ancaman pengekan hak mengemukakan pendapat secara terbuka, dan mengokohkan hak untuk mengembangkan kepribadian tanpa campur tangan dari orang lain. Rumusan tersebut menjadi gambaran mengenai posisi manusia beserta peran, hak dan kewajiban yang harus dilakukannya.

Dalam merumuskan basis universalisme Islam, Gus Dur memiliki gambaran profil masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang mampu mewujudkan kesejahteraan. Gus Dur menyatakan:

Islam memberikan hak kepada manusia untuk menjadi 'penggati Allah' (khalifah) di muka bumi, sebuah fungsi kemasyarakatan yang mengharuskan kaum muslimin untuk senantiasa memperjuangkan dan melestarikan cita hidup kemasyarakatan yang mampu menyejahterakan manusia itu sendiri secara menyeluruh dan tuntas.

⁸⁸ Ibid., 29–30.

Dengan demikian kaum muslimin diharuskan untuk menentang pola kehidupan bermasyarakat yang eksploitatif, tidak manusiawi serta tidak berasaskan keadilan dalam artiannya yang mutlak.⁸⁹

Menurut Gus Dur, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. *Pertama*, kewajiban untuk senantiasa taat asas (konsisten) dalam berpikir dan mencari pemecahan bagi persoalan-persoalan yang kita hadapi. *Kedua*, kewajiban menjunjung tinggi tujuan utama kehidupan menurut Islam yaitu mencari kemaslahatan sejauh mungkin, menjauhkan kerusakan/*mafsadah* sekuat mungkin, dan menerapkan asas kerahmatan dalam kehidupan secara keseluruhan. *Ketiga*, kewajiban menyediakan sarana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan utama kehidupan di atas. *Keempat*, kewajiban memikul tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat secara tuntas dan jujur.⁹⁰

Untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas, diperlukan orientasi baru bagi umat Islam dalam menghadapi dan mensikapi keadaan. Menurut Gus Dur:

Orientasi baru itu tentunya harus dilandaskan pada pemahaman al-Qur'an sebagai sumber inspirasional tertinggi kaum muslimin dalam kerangka berikut: *pertama*, kaum muslimin harus meletakkan seluruh tata kehidupan mereka dalam kerangka penegakan hak-hak asasi manusia, pemeliharaan asas kebebasan dalam penyelenggaraan kehidupan itu sendiri, dan pemberian peluang sebesar-besarnya bagi pengembangan kepribadian menurut cara yang dipilih masing-masing; *kedua*, keseluruhan pranata keagamaan yang dikembangkan kaum muslimin harus ditujukan kepada penataan kembali kehidupan dalam kerangka yang dikemukakan di atas, dan *ketiga*, dengan demikian, al-Qur'an sebagai sumber pengambilan pendapat formal bagi kaum muslimin harus dikaji dan ditinjau asumsi-asumsi dasarnya berdasarkan kebutuhan di atas, setelah dihadapkan kepada kenyataan kehidupan umat manusia secara keseluruhan.⁹¹

⁸⁹ Ibid., 30.

⁹⁰ Ibid., 31.

⁹¹ Ibid.

Universalisasi ajaran Islam yang dimaksudkan Gus Dur meliputi beberapa hal, yaitu toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan dan keprihatinan yang penuh kearifan akan keterbelakangan, belenggu kebodohan dan kemiskinan kaum muslimin. Dari proses universalisasi Islam tadi diharapkan akan muncul kosmopolitanisme baru yang berusaha membebaskan manusia dari ketidakadilan struktur sosial-ekonomis dan kebiadaban rezim-rezim politik yang lain. Universalisme Islam dan kosmopolitanisme ajaran Islam akan mampu memberikan perangkat sumber daya manusia. Hal inilah yang dibutuhkan oleh kaum miskin untuk memperbaiki nasib sendiri secara berarti dan mendasar, melalui penciptaan etika sosial baru yang penuh dengan semangat solidaritas sosial dan jiwa transformatif yang prihatin dengan nasib orang kecil.⁹²

Universalisasi ajaran Islam sesungguhnya merupakan pemaknaan terhadap ajaran tauhid. Gus Dur berkeyakinan bahwa agama sebenarnya dapat memberikan kontribusi pada pembebasan masyarakat. Ajaran paling penting dan fundamental dalam agama adalah tentang tauhid. Dengan bertauhid secara benar, pengamalan ajaran agama akan memperkuat struktur masyarakat, dan pada saat yang bersamaan juga akan menimbulkan sikap pembebasan manusia. Ketika agama dilihat pada tingkatan rakyat bawah, ia akan mampu menumbuhkan kearifan dalam menghadapi pelbagai tekanan dan penindasan, baik kemiskinan dan keterbelakangan maupun belenggu yang bersifat kultural. Dengan demikian, rakyat kecil sebenarnya bukan tidak pernah berpikir soal perlunya perubahan total. Mereka memang tidak bicara soal revolusi, tetapi rakyat kecil adalah pengawal revolusi itu sendiri.⁹³

Terkait dengan paradigma universalisme dan kosmopolitanisme Islam dari Gus Dur adalah sebagai paradigma untuk keluar dari jebakan historis dan sosiologis umat Islam. Gus Dur menyuarakan perlunya

⁹² Abdurrahman, *Islam Transformatif*, 90.

⁹³ Zuly Qodir, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam Di Indonesia 1991-2002* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 54.

kesadaran non-sektarianistis Islam sambil mencoba menggali kembali khazanah intelektual yang dimiliki selama ini.⁹⁴

Bagi Gus Dur, nilai keadilan, persamaan dan demokrasi merupakan kondisi struktural yang harus diwujudkan demi tergeraknya perlindungan terhadap lima hak dasar kemanusiaan tersebut. Inilah yang pada akhirnya melahirkan gerakan pembebasan (*ta arur, liberation*), yang di dalamnya menyentuh wacana keagamaan, kebudayaan dan ilmu sosial.

.... Islam tidak selayaknya harus berhadapan dengan ideologi-ideologi transformatif manapun di dunia ini, karena ia juga harus melakukan kerja transformatifnya sendiri.yang terjadi adalah sebuah hubungan simbiotik dengan sebuah kesadaran transformatif tanpa nama, yang lalu mewujudkan diri dalam pelestarian lingkungan, pengembangan keswadayaan, penegakkan demokrasi tanpa merinci terlebih dahulu bentuk sistemiknya, dan sebagainya.⁹⁵

Dari pandangan tersebut tercermin jelas bahwa Islam memiliki misi yang membebaskan manusia dari berbagai keterpurukan. Menurut Asghar, bahwa hakikat kehadiran Islam adalah dalam kerangka membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan pelanggaran harkat kemanusiaan.⁹⁶

Dari berbagai tulisan yang ada, pemikiran Gus Dur banyak menawarkan hal baru yang menyusun paradigma pembebasannya, antara lain; *pertama*, kemerdekaan (*indepency*) yang kita mengerti tidak hanya otonomi atau kemerdekaan wilayah saja, akan tetapi terlebih adalah kemandirian masyarakat/rakyat sebagai karya agung Tuhan. *Kedua*, kesaudaraan (*solidarity*) bukan persaudaraan, karena kesaudaraan adalah sesuatu yang harus diusahakan dari kedua belah pihak atau lebih. Artinya bukan hanya sebatas *brotherhood*

⁹⁴ Abdurrahman, *Islam Transformatif*, 80.

⁹⁵ Abdurrahman Wahid, "Pengantar," in *Agama, Ideologi Dan Pembangunan* (Jakarta: P3M, 1991), x.

⁹⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 11-12.

(persaudaraan/kekeluargaan), terlebih adalah rasa hormat kepada pribadi yang lain dengan segala keunikan dan kemajemukannya. *Ketiga*, keadilan sosial (*social justice*) artinya bukan sekedar pemerataan (*equality*), tetapi terlebih adalah mencakup syarat atau sarana kehidupan manusia. *Keempat*, kerakyatan (*populist*) bukan hanya sekedar cinta bangsa (*nationalhood*) melainkan lebih dari itu yaitu cinta terhadap kemanusiaan bagi mereka, terlebih bagi yang terpinggirkan.⁹⁷

Selanjutnya, menurut Komaruddin Hidayat ada tiga kecenderungan respons seseorang terhadap agama. Pertama, respon mistikal (*solitary*), yaitu suatu respon yang ditandai dengan penekanannya pada penghayatan individual terhadap kehadiran Tuhan. Kedua, respons humanis-fungsional, yaitu suatu kecenderungan beragama dengan titik tekan pada penghayatan nilai-nilai kemanusiaan yang dianjurkan oleh agama. Ketiga, respons profetik-ideologikal (*solidarity*), yaitu respon yang ditandai dengan penekanan pada misi sosial keagamaan dengan menggalang solidaritas dan kekuatan.⁹⁸

Sesungguhnya para pemeluk agama, termasuk para cerdik cendekiawan masing-masing agama, memiliki peran yang menonjol dalam mengartikulasikan ketiga respons di atas. Dari gambaran di atas, ada dua hal yang senantiasa mempengaruhi corak berpikir para pemimpin dan pemeluk agama, yaitu sesuatu yang bersifat doktrin (aspek normatif) dan kondisi sosio-kultural yang dihadapinya (aspek historis). Suatu pemikiran atau corak keberagamaan seseorang sesungguhnya adalah hasil dari dialektika antara aspek normatif dan aspek historis di atas.

Para cerdik cendekiawan di masing-masing agama memegang peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai universal dari agama. Hal itu perlu ditunjukkan oleh mereka dengan mengekspresikan ide-ide sistematis dalam merespon problem sosial dan kemasyarakatan, dengan tetap memiliki komitmen pada nilai-nilai dalam kehidupan

⁹⁷ Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis, Dan Isinya* (Yogyakarta: LKiS, 2000), xxix.

⁹⁸ Hidayat, "Agama Untuk Kemanusiaan," 43–44.

masyarakat dan negara.⁹⁹ Sebagaimana didefinisikan oleh Edward Shils bahwa:

*“Intellectuals are the aggregate of persons in any society who employ in their communication and expression, with relatively higher frequency than most other members of their society, symbols of general scope and abstract reference, concerning man, society, nature, and the cosmos.”*¹⁰⁰

Intelektual adalah sekelompok orang dalam masyarakat yang dalam komunikasi dan ekspresinya --dengan frekuensi yang relatif lebih besar daripada kebanyakan anggota lainnya—menggunakan simbol-simbol ruang lingkup yang umum dan referensi yang abstrak, berkaitan dengan persoalan manusia, masyarakat, alam, dan kosmos.

Antonio Gramsci –sebagaimana dikutip oleh Mudji Sutrisno—telah membuat tipologisasi yang sangat menarik. Ada lima tipologi cendekiawan. *Pertama*, cendekiawan tradisional yaitu penyebar ide dan mediator antara massa rakyat dengan kelas atasnya. *Kedua*, cendekiawan organik, yaitu kelompok cendekiawan dengan badan penelitian dan studinya berusaha untuk memberi refleksi atas keadaan namun terbatas untuk kelompoknya sendiri. *Ketiga*, cendekiawan kritis yang mampu melepaskan diri dari hegemoni penguasaan elit kuasa yang sedang memerintah dan mampu memberi pendidikan alternatif untuk proses kemerdekaan. *Keempat*, cendekiawan universal yang memperjuangkan proses peradaban dan struktur budaya yang memperjuangkan kemanusiaan dan humanisme serta dihormatinya harkat manusia. *Kelima*, cendekiawan partisian adalah cendekiawan yang terlibat dalam gerak bersama dengan massa rakyat untuk pembaruan masyarakat dengan seluruh aksi politik dan pendidikan penyadarannya.¹⁰¹

⁹⁹ Masykuri Abdullah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 14–15.

¹⁰⁰ David L (ed.) Sills, *International Encyclopedia of the Social Science*, 7th ed. (London: The Macmillan Company & The Free Press, 1968), 399.

¹⁰¹ Mudji Sutrisno, “Pengantar,” in *Cendekiawan Antara Budaya Dan Politik Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Yayasan Obor, 1996), xi–xii.

Pada bahasan selanjutnya, penulis akan meramu berbagai teori dan praktik dialog antar agama dari para cendekiawan yang membentuk suatu paradigma. Apa yang dimaksud paradigma adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kung dan Amin Abdullah. Menurut Hans Küng, “paradigma” adalah “a total constellation: the conscious – unconscious ‘total constellation of convictions, value, and pattern of behavior’”. Paradigma adalah model interpretasi atau model pemahaman. Paradigma tidak sama dengan agama.¹⁰² Dengan rumusan lain, Amin Abdullah memaknai paradigma sebagai gugusan pemikiran keilmuan, yakni adalah gugusan-gugusan pemikiran yang merupakan akumulasi dari pengetahuan dan teori-teori yang diangkat dari peristiwa dan sejarah perkembangan masyarakat yang terkait, yang telah menjadi suatu bangunan ide, cara pandang, cara berfikir dan cara bertindak dalam melihat suatu fenomena kehidupan.¹⁰³

Untuk itulah, pada bahasan berikut ini, penulis memperlakukan berbagai teori dan paradigma pemikiran cendekiawan Muslim Indonesia yang pernah muncul sejak tahun 1967 sebagai sumber rujukan yang sangat berharga.

¹⁰² Sunardi, “Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama,” 81.

¹⁰³ Abdullah, *Studi Agama, Normativitas Atau Historisitas*, 102 dan 109.

BAB III

TEORI DIALOG ANTAR AGAMA

Pada bab ini, akan diurai berbagai macam teori atau konsep dialog antar agama yang meliputi pembahasan mengenai konsep pluralisme agama dan formulasi etika yang harus diperhatikan dalam implementasi hubungan antar agama atau dialog antar agama. Dialog antar agama berbicara tentang berbagai hal, baik yang berkaitan dengan masalah teologis, etika sampai pada hal-hal yang bersifat empiris. Dalam dialog antar agama, wacana pluralisme agama menjadi perbincangan utama. Pluralisme agama sendiri bisa dimaknai secara berbeda-beda, tetapi konsep-konsep tersebut dapat dikategorisasikan meliputi bidang sosial, etis serta teologis.

A. Makna Pluralisme Agama

1. Pluralisme sebagai Kenyataan Sosiologis

Makna pluralisme pertama yang tidak dapat dihindari adalah pluralisme sebagai kenyataan sosial. Secara sosiologis, pluralisme agama adalah suatu kenyataan. Artinya, umat manusia berbeda-beda, beragam dan plural dalam hal beragama. Ini adalah kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam kenyataan sosial, umat manusia telah memeluk agama yang berbeda-beda. Kenyataan ini harus diakui. Pengakuan terhadap adanya pluralisme

agama secara sosiologis ini merupakan wacana pluralisme yang paling sederhana, karena pengakuan ini tidak berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau bahkan etika dari agama lain.

Dalam pengertian sosiologis ini, masing-masing pemeluk agama tidak memasuki wilayah akidah (keimanan) orang lain. Agama, dalam hal ini, diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar, apalagi berganti. H.M. Rasjidi pernah mengibaratkan, agama tidak dapat diibaratkan seperti rumah atau pakaian yang kalau perlu dapat diganti. Bagi seseorang yang memeluk keyakinan, maka keyakinan itu tidak dapat pisah dari kita. Berdasarkan keyakinan inilah, masih menurut Rasjidi, umat beragama sulit berbicara objektif dalam soal keyakinan. Meski masing-masing pemeluk agama berusaha mencoba berbicara objektif, namun sikap objektif dalam soal keyakinan adalah sesuatu yang mustahil karena manusia dalam keadaan *involved* (terlibat). Sebagai Muslim misalnya, seseorang menyadari sepenuhnya bahwa ia *involved* (terlibat) dengan Islam.¹⁰⁴ Demikian juga orang yang beragama lain.

Keberadaan umat beragama yang beraneka ragam tersebut diakibatkan oleh banyak faktor. Di antara faktornya adalah faktor sejarah dan kenyataan hidup yang memiliki pengaruh besar dalam pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, di dalam memandang adanya berbagai perbedaan umat beragama itu perlu dipandang kondisi keberagamaannya sesuai dengan perkembangan sejarah. Hal itu akan menyadarkan kita bahwa masyarakat sekarang ini adalah *multi-complex* yang mengandung *religious pluralism*, bermacam-macam agama. Ini sudah terjadi sejak lama dan merupakan kenyataan sejarah. Di Indonesia misalnya, tidak dapat dipungkiri adanya *religious pluralism*.¹⁰⁵

Namun demikian, pengakuan pluralisme secara sosiologis ini, yakni dalam pengakuan-pengakuan sosial, tidak dapat dicampuradukkan

¹⁰⁴ Rasjidi, "Pidato Musyawarah Antar Agama 30 Nopember 1967 Di Jakarta," 35.

¹⁰⁵ *Ibid.*

dengan pengakuan terhadap hal-hal teologis. Masalah pengakuan sosial berbeda dengan pengakuan teologis. Jika dalam pengakuan sosial dapat dikompromikan, masalah keyakinan teologis tidak bisa dipakai hukum kompromistis, karena dalam satu persoalan (objek) yang sama misalnya, masing-masing pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, misalnya pandangan tentang al-Qur'an, Bibel, Nabi Muhammad, Yesus dan Mariam.

Dalam menyikapi masalah-masalah di atas umat beragama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Terkait masalah Mariam dan Yesus misalnya, orang Islam melakukan penghargaan yang tinggi terhadap Mariam dan Yesus. Islam menyatakan bahwa Mariam adalah wanita suci yang dianugerahi putra yang kemudian menjadi Nabi Isa. Hal ini harus diakui sebagai bagian keimanan orang Islam. Orang Islam benar-benar tidak dapat mempercayai (mengimani) ketuhanan Yesus Kristus tetapi mempercayai kenabiannya sebagaimana Nabi Muhammad.

Kemudian terkait dengan Al-Qur'an, selain kepada Al-Qur'an, orang Islam juga memandang Torah dan Injil sebagai Kitab Suci (Kitabullah). Hal ini adalah keyakinan yang harus dipegangi oleh orang Islam. Jika masalah ini dipertentangkan, akan banyak muncul pertanyaan yang sifatnya saling mengorek kebenaran masing-masing. Di antara pertanyaan itu sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mukti Ali.¹⁰⁶

Harus diakui bahwa masing-masing agama memiliki keyakinan teologis yang tidak bisa dikompromikan. Islam memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh umat agama lain, misalnya konsep tentang Nabi Isa dan beberapa hal di atas. Begitu juga, Kristen memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh Islam, misalnya konsep tentang Nabi Muhammad.

¹⁰⁶ Ali, "Dialogue Between Muslims and Christians in Indonesia and Its Problems," 55.

Masing-masing memiliki keyakinannya sendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini harus diakui sebagai realitas dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.

2. Pluralisme sebagai Teologi Kerukunan

Wacana tentang pluralisme agama juga dapat dilihat sebagai sebuah teologi kerukunan. Pluralisme sebagai teologi kerukunan ini bukan hanya pengakuan secara sosiologis bahwa umat beragama berbeda, tetapi juga pengakuan tentang pentingnya kerukunan di antara umat beragama. Dalam hal ini perlu dibedakan antara agama dan keberagamaan. Bagi masing-masing pemeluk agama, agama mereka adalah agama yang absolut, tetapi agama yang absolut ini berbeda dengan keberagamaan pemeluk agama sebagai hasil dari pemahamannya.

Pengertian antara agama dan keberagamaan harus dipahami secara proporsional. Agama –terutama yang bersumber pada wahyu, diyakini sebagai bersifat ilahiyah. Agama memiliki nilai mutlak. Namun, ketika agama itu dipahami oleh manusia, maka kebenaran agama itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap dan dijangkau oleh manusia, karena manusia sendiri bersifat nisbi. Oleh karena itu, kebenaran apapun yang dikemukakan oleh manusia –termasuk kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia—bersifat nisbi, tidak absolut. Yang absolut adalah kebenaran agama itu sendiri, sementara kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia itu nisbi. Kebenaran absolut itu hanya bisa diketahui oleh ilmu Tuhan.¹⁰⁷

Djohan Effendi, seorang yang peduli dalam membangun kerukunan umat beragama, pernah mengemukakan:

“Sebagai makhluk yang bersifat nisbi, pengertian dan pengetahuan manusia tidak mungkin mampu menjangkau dan menangkap agama

¹⁰⁷ Effendi, “Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan,” 16.

sebagai doktrin kebenaran secara tepat dan menyeluruh. Hal itu hanya ada dalam ilmu Tuhan. Dengan demikian apabila seorang penganut mengatakan perkataan agama, yang ada dalam pikirannya bukan hanya agama sendiri, akan tetapi juga aliran yang dianutnya, bahkan pengertian dan pemahamannya sendiri. Oleh karena itu, pengertian dan pemahamannya tentang agama jelas bukan agama itu sendiri dan karena itu tidak ada alasan untuk secara mutlak dan a priori menyalahkan pengertian dan pemahaman orang lain.”¹⁰⁸

Dari sinilah, dialog antar agama merupakan sesuatu yang esensial untuk merangsang keberagaman kita agar tidak mandeg dan statis. Paksaan atau kekerasan apapun tidak boleh mendapat tempat di dalam usaha-usaha pengembangan agama dan keberagaman. Dalam hal ini, tentu saja yang dibutuhkan adalah sikap menghormati dan menghargai terhadap iman lain. Dari situlah, akan terwujud teologi kerukunan. Penghormatan terhadap adanya pluralisme agama akan mewujudkan terciptanya teologi kerukunan di kalangan umat beragama.

Jadi, perlu diberi garis pembatas yang tegas antara agama dan keberagaman. Kedua hal ini tidak dapat dicampuraduk. Tidak ada keagamaan seseorang –sebagai suatu keberagaman-- yang dapat dianggap bersifat absolut. Absolutisme keberagaman adalah tidak benar. Berbagai persoalan yang menimpa umat beragama sering kali disebabkan adanya pandangan bahwa keberagaman seseorang dijadikan representasi dari agama yang absolut.

3. Pluralisme adalah sikap saling menghargai

Pluralisme adalah sikap saling menghargai di antara sesama pemeluk agama dan tidak boleh memandang rendah orang lain atau kelompok lain. Mengapa umat beragama harus saling menghargai dan menghormati? Karena, umat beragama harus senantiasa menjaga persaudaraan antara satu dengan lainnya, meskipun keyakinannya berbeda. Persaudaraan dapat terwujud apabila masing-masing memiliki sikap saling menghormati dan tidak memperlakukan orang lain lebih rendah. Nurcholis Madjid pernah mengemukakan :

¹⁰⁸ Ibid.

“Petunjuk konkret lain untuk memelihara ukhuwah adalah tidak dibenarkannya sama sekali suatu kelompok dari kalangan orang-orang beriman untuk memandang rendah atau kurang menghargai kelompok lainnya, sebab siapa tahu mereka yang dipandang rendah itu lebih baik daripada mereka yang memandang rendah. Ini mengajajarkan kita –dalam pergaulan dengan sesama manusia, khususnya sesama kalangan yang percaya kepada Tuhan—tidak melakukan absolutisme, suatu pangkal dari segala permusuhan.”¹⁰⁹

Nurcholish menegaskan betapa pentingnya kehidupan beragama. Ia tidak menjelaskan secara tegas apakah yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam saja. Artinya, agama yang dimaksud adalah agama secara umum. Namun, dengan bahasa yang dialektis, ia melakukan otokritik terhadap pemeluk agama. Ia mengutip pendapat Wilson yang sangat pesimis terhadap keberadaan agama. Ia mengakui bahwa dalam agama-agama, lebih tepatnya, dalam lingkungan para penganut agama-agama, selalu ada potensi kenegatifan dan perusakan yang amat berbahaya.¹¹⁰

Tulisan Nurcholish Madjid yang penuh dengan nuansa dialog ini disampaikan di Taman Ismail Marzuki 21 Oktober 1992, Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang. Pengamatan terhadap realitas pluralitas umat menjadi perhatian serius. Sebagaimana judulnya, ia mengupas bagaimana generasi mendatang menjalankan kehidupan beragama. Kata generasi mendatang adalah kata yang masih umum yang tidak perlu dikotak hanya dalam generasi Islam. Dalam tulisannya itu, Nurcholish ingin melaksanakan kandungan hadis yang menyatakan “agama adalah pesan” (al-dîn al-nashîhah).¹¹¹

Potensi negatif atau perusakan itu, pada tahun 90-an misalnya, ditandai oleh konflik-konflik dengan warna keagamaan. Menurut

¹⁰⁹ Andito (ed), *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog “Bebas” Konflik* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 259.

¹¹⁰ Nurcholish Madjid, “Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang,” *Jurnal Ulumul Qur’an* IV, no. 1 (1993): 4 dan 6.

¹¹¹ Ibid.

Nurcholish, diakui, agama memang bukan satu-satunya faktor, tapi jelas sekali bahwa pertimbangan keagamaan dalam konflik-konflik itu dan dalam eskalasinya sangat banyak memainkan peran. Setiap warna keagamaan dalam suatu konflik seringkali melibatkan agama formal atau agama terorganisir (*organized religion*).

Semua manusia pada dasarnya adalah bersaudara. Manusia berasal dari leluhur yang sama, yaitu Nabi Adam. Dalam perkembangannya, umat manusia kemudian terpisah-pisah secara geografis, sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dalam keadaan yang terpisah-pisah itulah diutus seorang Nabi dan Rasul. Nurcholish pernah menegaskan bahwa setiap umat atau golongan manusia telah pernah dibangkitkan atau diutus seorang utusan Tuhan, dengan tugas menyeru umatnya untuk menyembah kepada Tuhan saja (dalam pengertian paham Ketuhanan Yang Maha Esa yang murni). Ia mengutip Surat al-Nahl (16): 36. Berdasarkan firman-firman Allah itu dikatakan bahwa:

“... semua agama Nabi dan Rasul yang telah dibangkitkan dalam setiap umat adalah sama, dan inti dari ajaran semua Nabi dan Rasul itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa dan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan tiranik. Dengan perkataan lain, Ketuhanan Yang Maha Esa dan perlawanan terhadap tirani adalah titik pertemuan, common platform atau, dalam bahasa al-Qur’an, kalimatun-sawâ’ (kalimat atau ajaran yang sama) antara semua kitab suci.”¹¹²

Menurut Nurcholish, kesamaan-kesamaan yang ada dalam agama-agama bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia berargumentasi, semua yang benar berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah, Yang Maha Benar (al-Haqq). Semua Nabi dan Rasul membawa ajaran kebenaran yang sama. Sementara itu, adanya perbedaan itu hanyalah dalam bentuk-bentuk responsi khusus tugas seorang Rasul kepada tuntutan zaman dan tempatnya. Ditegaskan bahwa perbedaan itu tidaklah prinsipil, sedangkan ajaran pokok atau syariat para Nabi dan Rasul adalah sama. Dalam rangka menjelaskan hal ini, ia mengutip al-Qur’an, yakni dalam Surat Al-Syûrâ (42):13, al-Nisâ’ (4):163-165, al-Baqarah

¹¹² Ibid., 12.

(2):136, al-Ankabût (29):46, Al-Syûrâ (42):15, dan al-Mâidah (5):8. Ayat-ayat yang dikutip itu berkenaan dengan kesamaan antara syariat Muhammad dengan syariat Nuh, Ibrahim, Isma'îl, Ishaq, Ya'qub, Ayyub, Yunus, Harun, Musa, Sulaiman, Dawud, Isa dan kepada rasul-rasul yang tidak dikisahkan kepada Muhammad.¹¹³ Ayat-ayat itu menunjukkan adanya kesinambungan, kesatuan dan persamaan agama-agama para Nabi dan Rasul Allah.

Inilah yang kemudian disebut sebagai titik temu agama-agama, yaitu titik temu asal usul dari ajaran-ajaran agama. Mengenai titik temu agama-agama ini, mengikuti Nurcholish Majid, ada empat prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal, karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia. Kedua, Islam mengajarkan pandangan tentang kesatuan nubuwwah (kenabian) dan umat yang percaya kepada Tuhan. Ketiga, agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah kelanjutan langsung agama-agama sebelumnya, khususnya yang secara "genealogis" paling dekat ialah agama-agama Semitik-Abrahamik. Keempat, umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang beragama lain, khususnya para penganut kitab suci (Ahl al-Kitab).¹¹⁴ Semua prinsip itu mengarah pada ajaran "tidak boleh ada paksaan dalam agama".

Harus disadari bahwa sekarang ini adalah zaman globalisasi. Dunia terasa lebih dekat dan lebih sempit. Hal ini berkat teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Dunia ini ibaratnya seperti "desa" saja, atau dalam bahasa Nurcholish "desa buwana" (global village). Hubungan antar manusia juga semakin dekat. Namun, di sisi lain, potensi konflik dan ketegangan juga semakin dekat. Nurcholish pernah mengemukakan :

¹¹³ Ibid., 13–14.

¹¹⁴ Nurcholish Madjid, "Hubungan Antar Umat Beragama : Antara Ajaran Dan Kenyataan," in *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia (Beberapa Permasalahan)*, VII. (Jakarta: INIS, 1990), 108–109.

“Dalam desa buwana itu, seperti telah disinggung, manusia akan semakin intim dan mendalam mengenal satu sama lain, tetapi sekaligus juga lebih mudah terbawa kepada penghadapan dan konfrontasi langsung. Karena itu sangat diperlukan sikap-sikap saling mengerti dan paham, dengan kemungkinan mencari dan menemukan titik kesamaan atau kalimatun sawa’ seperti diperintahkan Allah dalam al-Qur’an. Dengan tegas al-Qur’an melarang pemaksaan suatu agama kepada orang atau komunitas lain, betapapun benarnya agama itu, karena akhirnya hanya Allah yang bakal mampu memberi petunjuk kepada seseorang, secara pribadi. Namun, demi kebahagiaannya sendiri, manusia harus terbuka kepada setiap ajaran atau pandangan, kemudian bersedia mengikuti mana yang terbaik. Itulah pertanda adanya hidayah Allah kepada mereka. Dan patut kita camkan benar-benar pendapat Sayyid Muhammad Rasyid Ridla sebagaimana dikutip oleh ‘Abdul Hamid Hakim bahwa pengertian sebagai Ahl al-kitab tidak terbatas hanya kepada kaum Yahudi dan Kristen seperti tersebut dengan jelas dalam al-Qur’an serta kaum Majusi (pengikut Zoroaster) seperti tersebut dalam sebuah hadits, tetapi juga mencakup agama-agama lain yang mempunyai suatu bentuk kitab suci.”¹¹⁵

Jadi, pluralisme adalah sikap saling menghargai dan menghormati di antara satu dengan lainnya. Untuk dapat memiliki sikap saling menghargai dan menghormati ini, umat beragama dituntut untuk mencari semangat kebenaran dari agama. Dalam upaya mencari semangat kebenaran ini menarik mempertimbangkan konsep al-hanîfiyyah al-samhah yang disampaikan oleh Nurcholish. Ia menegaskan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah ialah al-hanîfiyyah al-samhah, agama yang memiliki semangat kebenaran yang lapang dan terbuka. Ia mengemukakan:

“Sikap mencari Kebenaran secara tulus dan murni (hanîfiyyah, kehanifan) adalah sikap keagamaan yang benar, yang menjanjikan kebahagiaan sejati, dan yang tidak bersifat palliative atau menghibur secara semu dan palsu seperti halnya kultus dan fundamentalisme.

¹¹⁵ Madjid, “Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang” 16.

Maka Nabi pun menegaskan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah ialah al-hanifiyyah al-samhah (baca: “al-hanifiyyatus-samhah”) yaitu semangat mencari kebenaran yang lapang, toleran, tidak sempit, tanpa kefanatikan, dan tidak membelenggu jiwa.¹¹⁶

Oleh karena itu, umat Islam tidak dilarang (atau diperintahkan) untuk berbuat baik dan adil kepada siapapun dari kalangan bukan Muslim yang tidak menunjukkan permusuhan, baik atas nama agama atau lainnya, seperti penjajahan, pengusiran dari tempat tinggal dan bentuk penindasan yang lain.¹¹⁷

4. Pluralisme dalam Berpikir dan Bertindak

Pluralisme harus diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, pluralisme meliputi aktivitas berpikir dan berperilaku, sehingga dapat membangun sikap keterbukaan. Dari situ, kebenaran akan dapat ditemukan dan dibuktikan. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menegaskan pentingnya keterbukaan untuk menemukan kebenaran di mana pun juga.¹¹⁸ Pandangan tentang pluralisme dapat dilihat dan dibuktikan dalam bertindak dan berpikir. Inilah yang melahirkan toleransi. Sikap toleran tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan formal atau pun kepintaran pemikiran secara alamiah, tetapi merupakan persoalan hati, persoalan perilaku. Tidak pula harus kaya dulu. Bahkan, seringkali semangat ini terdapat justru pada mereka yang tidak pintar juga tidak kaya, yang biasanya disebut “orang-orang terbaik”.¹¹⁹ Gus Dur memberi contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Kyai Khasbullah, yakni dengan cara menahan diri. Begitu juga, ia memberi contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Kyai Iskandar, dengan cara bergaul secara berbau dalam masyarakat.

¹¹⁶ Ibid., 19.

¹¹⁷ Madjid, “Hubungan Antar Umat Beragama : Antara Ajaran Dan Kenyataan,” 111.

¹¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Muslim Di Tengah Pergumulan* (Jakarta: Lapenas, 1981), 3.

¹¹⁹ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effeni, Ahmad Wahib Dan Abdurrahman Wahid, I.* (Jakarta: Paramadina, 1999), 398.

Dalam menjalin hubungan pergaulan, umat beragama tidak pantas memiliki sikap eksklusif, karena sikap tersebut akan mengisolir orang tersebut (suatu kelompok) dalam membangun komunikasi kemanusiaan. Jika demikian, orang lain juga akan mereaksi dengan sikap yang sama. Kehidupan sosial tidaklah seperti itu, karena masing-masing membutuhkan antara satu dengan lainnya. Inilah yang oleh Gus Dur disebut dengan ‘eksklusivisme agama’. Menurutnya, berbagai peristiwa kerusuhan yang berkedok agama di beberapa tempat adalah akibat adanya eksklusivisme agama.¹²⁰

Oleh karena itu, jika masing-masing tidak memiliki rasa eksklusivisme, tidak ada alasan bagi umat beragama untuk mengembangkan sikap permusuhan di antara mereka. Bahkan, di antara sesama umat beragama mestinya memiliki sikap saling menyantuni, terutama di antara sesama pemeluk agama. Seperti yang ditegaskan Gus Dur, esensi “saling menyantuni” justru terletak pada sikap-sikap di mana kita bisa saling mengoreksi sesama orang Islam. Nabi pernah mencontohkan, bahwa jika Fatimah (putri beliau) melakukan pencurian maka ia tetap harus dihukum. Jadi, sikap santun tidak boleh dengan standar ganda atau tidak boleh mengabaikan keadilan kepada siapa pun, termasuk orang berlainan agama.¹²¹

Berbuat adil kepada siapapun bukan berarti menerima keyakinan aqidah dari umat beragama lain. Hal ini seperti yang dijelaskan Gus Dur ketika memahami bunyi ayat al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 120 (Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sampai kamu ikuti agama mereka. Gus Dur memandang bahwa ayat ini sering digunakan untuk membenarkan sikap dan tindakan anti-toleransi, karena kata “tidak rela” di sini dianggap melawan atau memusuhi, lalu dikaitkan dengan pembuatan gereja-gereja, penginjilan atau pekabaran Injil, dan sebagainya. Menurutnya, kata “tidak rela” harus didudukkan secara proporsional. Tidak rela itu artinya tidak bisa menerima konsep-

¹²⁰ Wahid, “Dialog Agama Dan Masalah Pendangkalan Agama,” 52.

¹²¹ Ibid., 53.

konsep dasar. Tentu saja, ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Tidak menerima konsep dasar bukan berarti mesti mengembangkan sikap permusuhan atau perlawanan. Kristen dan Yahudi tidak bisa menerima konsep dasar Islam adalah sudah pasti. Begitu juga sebaliknya, Islam juga tidak bisa menerima konsep dasar agama Kristen dan Yahudi. Oleh karena itu, menurutnya, kita tidak akan goyang dari konsep Tauhid, tapi kita menghargai pendapat orang lain.¹²² Pendapat orang lain ini tentu saja berarti keyakinan orang lain.

5. Pluralisme bukanlah relativisme dan sinkretisme

Pluralisme adalah salah satu pilar terpenting dalam membangun dialog. Pilar lainnya adalah toleransi, yaitu upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun adanya keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan.

Dalam hal ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa pluralisme tidaklah sama dengan relativisme dan sinkretisme. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Alwi Shihab bahwa konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Karena, konsekuensi dari paham relativisme agama bahwa doktrin agama apapun harus dinyatakan benar. Atau, “semua agama adalah sama”. Oleh karena itu, seorang relativis tidak akan mengenal, apalagi menerima, suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa. Namun demikian, paham pluralisme terdapat unsur relativisme, yakni unsur tidak mengklaim kebenaran tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Paling tidak, seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain. Begitu juga, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian

¹²² Ibid., 54.

komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.¹²³

Di dalam memahami kemajemukan dengan terlibat secara aktif dalam pergaulan, ada satu hal penting yang harus diperhatikan, sebagaimana ditegaskan oleh Alwi, adalah apabila konsep pluralisme agama hendak diterapkan di Indonesia, maka ia harus bersyaratkan komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati mitra dialognya, tetapi yang terpenting ia harus committed terhadap agama yang dianutnya. Hal ini untuk menghindari relativisme agama. Ia menekankan perlunya membudayakan sikap keterbukaan, menerima perbedaan, dan menghormati kemajemukan agama, dibarengi loyalitas komitmen terhadap agama masing-masing.¹²⁴

B. Etika Hubungan Antar Agama

Hubungan Antar Agama membutuhkan tatanan-tatanan etis dalam implementasinya. Wacana dalam etika hubungan antar agama meliputi banyak hal, di antaranya adalah wacana toleransi, hak asasi manusia, kerukunan dan perdamaian.

1. Toleransi

Di dalam Alqur'an telah termuat ajaran tentang toleransi. Salah satu ayat tentang toleransi adalah ayat al-Qur'an yang berbunyi: "*wa lâ tujâdilû ahlal kitâbi illa billati hiya ahsan, illalladzîna dhalamû minhum*" (Janganlah mengadakan diskusi dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya, kecuali terhadap mereka yang beragresi/berbuat dhalim).¹²⁵ Islam telah mengajarkan toleransi kepada pemeluknya. Dalam surat yang lain juga disebutkan bahwa Allah SWT menjadi umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hal itu

¹²³ Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, 41–43.

¹²⁴ *Ibid.*, 43.

¹²⁵ Rasjidi, "Pidato Musyawarah Antar Agama 30 Nopember 1967 Di Jakarta," 40.

dimaksudkan agar masing-masing orang bisa saling mengenal, saling bergaul, dan saling memahami antara satu dengan lainnya.

Namun, berkenaan dengan pemahaman dan implementasi tentang toleransi ini tidak jarang terdapat ketegangan-ketegangan, terutama Islam-Kristen pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1970-an dan 1970-an Rasjidi misalnya, tidak sepakat jika umat Islam Indonesia dikatakan tidak toleran hanya karena keberatan terhadap usaha pengkristenan bangsa Indonesia. Menurutnya, masyarakat Islam mempunyai sejarah sendiri yang sudah dicantumkan dalam al-Qur'an, yaitu bahwa Islam harus menghormati agama-agama lain, khususnya agama kitab, Masehi dan Yahudi. Kebebasan beragama dan menjalankan syari'atnya dijamin penuh dalam masyarakat Islam, tetapi dalam batas hidup bersama dan tidak merongrong masyarakat Islam. Rasjidi tidak bisa menerima jika toleransi berarti bahwa umat Islam harus diam saja melihat umat Islam dikristenkan di mana-mana dengan segala macam usaha dan bujukan materi.¹²⁶

Terkait dengan toleransi ini, negara sudah mengaturnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 bahwa di dalamnya terkandung landangan makna toleransi. Negara menjamin kebebasan umat beragama, artinya menjamin masyarakat memeluk agamanya masing-masing. Toleransi tidak seharusnya dipaksakan secara top-down, tetapi, toleransi juga tidak dapat dilepaskan dari peran dan perilaku para pemimpin negara, dengan menghindari sebab-sebab yang akan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat bidang agama. Rasjidi pernah menaruh harapan berkenaan dengan hubungan antara Islam dan Kristen sebagaimana tersurat dalam pernyataan di bawah ini :

“Kami umat Islam Indonesia ingin hidup damai dan rukun, menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan kita semua. Satu-satunya jalan adalah hidup dalam toleransi. Biarkanlah kami memperbaiki nasib kami, mengatur kehidupan kekeluargaan kami, dan kami juga tidak akan mengganggu saudara-saudara kita

¹²⁶ Ibid., 40–41.

yang beragama Masehi. Kita semua sedang membangun, marilah kita bangun dahulu jiwa toleransi di dada kita masing-masing”.¹²⁷

Berbicara mengenai toleransi dalam perspektif Islam, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, bahwa doktrin ajaran Islam sesungguhnya dilandasi oleh konsep cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang tertinggi adalah dari Allah SWT. Dalam hal ini Allah memiliki sifat ar-Rahman dan ar-Rahim. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa di antara makna ar-Rahman adalah Allah Maha Pemurah bagi semua makhluk (baik yang kafir maupun yang mukmin). Artinya semua makhluk memperoleh kemurahan rahmat-Nya. Allah SWT memberi kasih sayang kepada semua makhluk. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah kepada kaum mukmin. Kata ar-Rahman dan ar-Rahim dapat diartikan bahwa penjagaan, pemeliharaan dan asuhan Allah terhadap seluruh alam semata-mata karena rahmat dan kasih sayang-Nya.

Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, artinya sifat ketuhanan Allah terhadap hamba-Nya bukanlah sifat keganasan dan kezaliman, tetapi berdasarkan cinta dan kasih sayang. Karena itu, manusia mestinya beribadah dan berbuat juga berdasarkan pada cinta dan kasih sayang sesama umat manusia, bahkan kepada makhluk hidup lainnya seperti binatang dan tumbuhan.

Nabi Muhammad saw bersabda:

انما يرحم الله من عباده الرحماء (رواه الطبرني)

Artinya: Allah hanya sayang kepada hamba-hamba-Nya yang pengasih. (Riwayat Tabrani)

الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض
يرحمكم من في السماء (رواه احمد وابوداود والترمذي والحاكم)

Artinya: Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Rahman. Oleh karena itu, sayangilah semua makhluk yang di

¹²⁷ Ibid., 29.

bumi, niscaya semua makhluk yang di langit akan menyayangi kamu semua. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud at-Tirmizi dan al-Hakim)

من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة (رواه البخاري)

Artinya: Siapa yang kasih sayang meskipun kepada seekor burung (pipit) yang disembelih, akan disayangi Allah pada hari Kiamat. (Riwayat al-Bukhari)

Jadi, di dalam menyembelih hewan pun juga harus dengan kasih sayang yaitu dengan menggunakan tata cara yang baik, misal dengan memakai pisau yang tajam.

Kedua, bahwa dalam urusan agama tidak boleh ada pemaksaan. Hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an :

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 256)

Hal ini diperkuat dengan ayat Al-Qur'an:

لكم دينكم ولي دين

Artinya: Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku". (Q.S. Al-Kafirun: 6)

قل أتجادوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم
ونحن له مخلصون

Artinya: Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati. (QS. Al-Baqoroh: 139)

Ketiga, bahwa Islam juga mengajarkan agar umat Islam saling menjalin hubungan dan pergaulan dengan sesama manusia.

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal. (QS. Al-Hujurat: 13)

Kemudian, Islam juga mengajarkan agar kita berdialog atau berdebat dengan cara yang baik-baik, dengan lemah lembut dan penuh penghormatan kepada orang lain.

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن
له مسلمون

Artinya: Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang dzalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri". (QS. Al-Ankabut: 46)

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imron: 159)

Keempat, bahwa Islam mengajarkan bahwa umat Islam hendaknya senantiasa menebarkan salam kedamaian kepada semua orang. Hal dibuktikan dengan perintah kita mengucapkan salam kepada siapapun dengan bacaan: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh (Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah SWT senantiasa ada pada engkau sekalian).

Kelima, bahwa ajaran Islam memiliki tujuan syariat yang bersifat universal, yaitu menjaga nyawa (hidup), menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga akal. Hal ini diwujudkan dalam bentuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah, dengan prinsip tawasuth (moderat), tawazun (tidak ekstrim), tasamuh (toleransi), ta'adul (adil).

2. Menghormati Hak Asasi Manusia

Tatanan etis lainnya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terdapat respons pro dan kontra mengenai konsep dan implementasi hak-asasi manusia di Indonesia. Di antara tokoh yang melakukan kritik terhadap implementasi hak asasi manusia adalah Rasjidi.¹²⁸ Isu hak asasi manusia adalah sesuatu yang sangat melekat dalam hubungan antar agama. Namun, isu ini menjadi problematis, karena masing-masing umat memiliki persepsi yang berbeda-beda. Bahkan di kalangan intern umat beragama juga terdapat berbagai macam pemikiran.

Di kalangan Islam sendiri misalnya seperti dikemukakan oleh Khaled M. Abou el-Fadl, terdapat dua kecenderungan dalam menanggapi isu HAM ini, yaitu kalangan muslim moderat dan muslim puritan. Dua kecenderungan ini menunjukkan hal yang bertolak belakang. Jika kaum puritan mengatakan bahwa HAM adalah “konsep universal yang keliru” yang diintrodusir oleh Barat, maka kalangan muslim moderat justru sebaliknya. Muslim moderat meragukan

¹²⁸ Ibid., 41.

pernyataan yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah konsep-universal yang keliru, atau sebagai praktik khas Barat yang tak sesuai atau tidak pas bagi budaya lain di mana pun.

Muslim moderat percaya bahwa mengupayakan penghargaan dan penegakan hak-hak asasi manusia sebagai tujuan etis yang hendak dicapai merupakan perkara prinsip yang mendasar, dan jauh dari konsep-universal yang keliru. Sesungguhnya, banyak muslim moderat percaya bahwa sementara bisa sangat tidak jujur untuk berlagak bahwa hukum Islam menawarkan daftar hak-hak asasi manusia yang siap pakai.

Berdasarkan tradisi Islam yang sudah ada, kaum moderat mengemukakan bahwa minimal semua manusia punya hak akan harga-diri dan kebebasan. Keyakinan kalangan moderat terhadap hak-hak asasi manusia diawali dengan premis bahwa penindasan adalah pelecehan besar-besaran terhadap Tuhan dan manusia. Alquran mendeskripsikan para penindas sebagai perusak bumi dan juga menggambarkan penindasan sebagai sebetulnya penghinaan terhadap Tuhan. Semua manusia berhak atas harga-diri. Ayat Alquran yang dijadikan dasar argumentasi adalah Q.S. Al-Isra (17) ayat 70, yang menyatakan bahwa Tuhan telah menganugerahkan harga-diri pada setiap manusia. Dalam hal ini, kebebasan dan pilihan adalah komponen esensial yang “membentuk harga-diri manusia.”¹²⁹

Masalah HAM ini terkait dengan hak kebebasan beragama yang dimiliki oleh setiap orang. Islam adalah agama yang tidak mengizinkan pemaksaan agama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mengenai hal ini Mohammad Natsir pernah mengemukakan:

“Islam dengan tegas mengakui kemerdekaan berfikir dan ber’itikad. Lâ ikrâha fî al-dîn. Islam tidak mengizinkan memaksa-maksakan agama dan kepertajaan. Sekalipun ummat Islam itu di suatu masa dan di suatu tempat merupakan mayoritas, mereka dilarang oleh code

¹²⁹ Khaled M. Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi, 2005), 221.

ethiek Islam memaksa-maksakan kepertjajaan dan kejakinan agama mereka kepada minoritas jang beragama lain dari Islam.”¹³⁰

Dalam konteks pemahaman itu, kata “ber’itikad” pada paragraf di atas dipahami sebagai berkeyakinan atau berkeimanan. Hal ini berdasarkan al-Qur’an Surat Syûrâ ayat 15. “..Bagi kami amalan kami, bagi Saudara amalan Saudara-saudara ...”. Inilah yang, oleh Natsir, dianggap sebagai kode etik dalam kehidupan beragama. Sebagaimana disebutkan di atas, rumusan kode etik adalah bahwa keyakinan agama tidak boleh (dan memang tidak bisa) dipaksakan. “Tidak ada paksaan dalam keyakinan agama”.¹³¹ Ayat al-Qur’an yang dapat dijadikan pedoman dan diperuntukan sebagai peringatan adalah Surat Âli ‘Imrân ayat 24. Pada bagian akhir ayat itu dinyatakan”Isyhadû biannâ muslimûn” (...saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang Islam).¹³²

Sebagaimana juga dicontohkan oleh Natsir, peristiwa disepakatinya “Piagam Madinah” pada masa Nabi di Madinah. Piagam Madinah adalah satu contoh mengenai prinsip kemerdekaan beragama yang pernah dipraktekkan oleh umat Islam. Bagi umat Islam, mayoritas bukanlah untuk menindas minoritas, tapi justru untuk melindungi hak-hak mereka. Hal ini berdasarkan pesan Rasulullah, “Barangsiapa menzhalmi seorang zimmi, sesungguhnya dia memusuhi aku”.¹³³

Secara nyata, pemikiran tentang kebebasan beragama pernah dikemukakan Natsir sebelum tahun 60-an, tepatnya adalah tahun 1952. Natsir menyampaikan pidato, yang pada tanggal 3 Agustus 1952 dimuat di koran Harian Abadi Jakarta, mengenai Islam memberantas intoleransi agama dan menegakkan kemerdekaan beragama. Ia mengemukakan:

¹³⁰ Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, 19.

¹³¹ Mohammad Natsir, *Mencari Modus Vivendi Antar Ummat Beragama* (Jakarta: Media Dakwah, 1980), 15.

¹³² M. Natsir, *Islam Dan Kristen Di Indonesia*, IV. (Jakarta: Media Dakwah, 1988), 1.

¹³³ Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, 19–20.

“Islam memberantas intoleransi agama, menegakkan kemerdekaan beragama dan meletakkan dasar bagi keragaman hidup antar agama. Kemerdekaan menganut agama, adalah suatu nilai hidup, yang dipertahankan oleh tiap-tiap Muslimin dan Muslimat, Islam melindungi kemerdekaan menyembah Tuhan menurut agama masing-masing, baik di gereja ataupun di mesjid.”¹³⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kebebasan memeluk agama adalah hak bagi siapapun. Tidak boleh ada pihak manapun yang memaksakan suatu agama kepada orang lain. Memilih agama adalah kebebasan hak asasi manusia. Hak asasi ini harus dihormati dan dijaga oleh semua pihak.

3. Memperhatikan Kerukunan dan Perdamaian

Tatanan etis dialog yang juga sangat penting adalah kerukunan dan perdamaian. Mengenai wacana tentang kerukunan dan perdamaian ini kita dapat belajar dari apa yang pernah dikemukakan oleh A. Mukti Ali, tentu sesuai setting masa Orde Baru yaitu pembangunan. Kerukunan hidup umat beragama bisa dikatakan sebagai prasyarat berhasilnya pembangunan. Ia mengemukakan:

“Untuk berhasilnya pembangunan bangsa, harus dikembangkan, disamping prasarana materiil, juga prasarana sosial, yang dalam hal ini masalah integrasi dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat esensiil. Dalam rangka inilah “kerukunan hidup umat beragama” merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan vital.

Adalah satu hal yang harus benar-benar disadari bahwa pertentangan-pertentangan dalam kehidupan sosial keagamaan, amat mengganggu, baik stabilitas nasional maupun kehidupan agama itu sendiri.

Ketidakrukunan dalam kehidupan sosial keagamaan pasti akan menimbulkan problem-problem sosial, politik, ekonomi dan keamanan, yang sangat jauh dan luas akibat-akibatnya. Itulah sebabnya maka

¹³⁴ Natsir, *Islam Dan Kristen Di Indonesia*, 200.

usaha menciptakan dan membina kerukunan hidup umat beragama perlu beroleh penanganan yang sungguh-sungguh dan hati-hati”¹³⁵

Secara lebih luas, dialog antar agama adalah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan umat. Di suatu daerah kabupaten atau kota, atau kecamatan dan desa, dialog antar agama untuk mewujudkan kerukunan umat beragama merupakan modal penting untuk melakukan pembangunan manusia, baik spiritual maupun material. Tanpa adanya kerukunan dan perdamaian, pembangunan pasti tidak dapat berjalan dengan baik, pendidikan akan terganggu, perkembangan ekonomi masyarakat akan mandeg dan sebagainya. Kerukunan dan perdamaian adalah prasyarat terwujudnya keamanan dan kesejahteraan umat manusia.

Selain sebagai titik tolak bisa diadakannya dialog antar umat beragama, kerukunan juga menjadi tujuan dialog itu sendiri. Kerukunan tidak boleh menghambat kemajuan masing-masing agama. Kerukunan juga merupakan sebuah keadaan dinamis di antara umat beragama. Hal ini seperti yang pernah dilukiskan oleh Mukti Ali :

“Membina kerukunan hidup umat beragama tidaklah harus berarti mempertahankan status quo dalam arti menghambat kemajuan masing-masing agama. Juga tidak berarti sekedar menjaga dan memelihara situasi tidak adanya pertentangan dan ketegangan.

Situasi rukun itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang sedang membangun, yang menghadapi aneka tantangan dan persoalan. Ini berarti bahwa kerukunan yang didambakan itu adalah suatu keadaan yang dinamis yang merupakan bagian dari pertumbuhan masyarakat. Oleh karena itu, kerukunan itu harus diciptakan, dipelihara dan dibina terus menerus. Di sinilah pentingnya dialog di antara tokoh-tokoh berbagai agama.”¹³⁶

Kerukunan dan perdamaian adalah sesuatu yang harus diupayakan, diciptakan, dipelihara dan dibina secara terus menerus. Kerukunan

¹³⁵ Ali, “Peranan Agama Di Dalam Pembangunan Nasional,” 21.

¹³⁶ Ibid.

bukan sesuatu yang ibaratnya “turun dari langit” atau *taken for granted* saja. Kerukunan itu dalam bahasa teologis adalah sesuatu yang ikhtiari, sesuatu yang harus dipayakan. Di antara ikhtiar tersebut tentu adalah dialog antar agama.

Untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di kalangan antar umat beragama tidak mudah. Hal ini karena masing-masing pemeluk agama memiliki konsep sendiri mengenai bagaimana menyikapi pemeluk agama lain. Dalam konteks ini, kita dapat mempertimbangkan penjelasan Mukti Ali yang menyatakan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. *Pertama*, sinkretisme, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. *Kedua*, *reconception*, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. *Ketiga*, sintesis, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. *Keempat*, penggantian, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. *Kelima*, *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan.¹³⁷

Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan “agree in disagreement”. Ia mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk

¹³⁷ Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah Dan Misi,” 227–229.

percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.¹³⁸

Tawaran dari Mukti Ali di atas tentu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Dengan memiliki pemahaman bahwa agama yang dipeluk adalah paling baik dan paling benar akan menjadikan seseorang memiliki komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Sementara itu, dengan pemahaman bahwa orang lain juga dipersilahkan bahkan dihargai untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar tentu menjadi seseorang mau menghormati dan menghargai orang yang beragama lain. Hal ini adalah sikap yang sangat bijaksana dalam menjalin hubungan antar masyarakat yang berbeda-beda agamanya. Inilah sikap yang elegan untuk menghadapi adanya berbagai perbedaan di kalangan umat beragama, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Inilah sebenarnya titik temu itu, setuju dalam perbedaan.

Dalam bahasa Natsir, semua pihak harus menjadi identitas masing-masing. Sekalipun mungkin susah mencari titik temu tetapi semua pihak harus tetap bisa dapat hidup berdampingan secara damai dan berragam.¹³⁹ Menurutnya, Islam adalah identitas agama yang sudah dimiliki oleh umat Islam. Begitu juga agama yang lain adalah identitas bagi umat agama lain. Semua pihak hendaknya menghormati dan tidak mengganggu identitas tersebut. Agama hendaknya tidak dijadikan pokok sengketa.¹⁴⁰ Perdamaian Nasional hanya bisa dicapai kalau masing-masing golongan agama, disamping memelihara identitas masing-masing juga pandai menghormati identitas golongan lain.”¹⁴¹

Selain kerukunan, perdamaian juga merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi dialog antar agama. Pentingnya masalah perdamaian ini juga pernah disinggung oleh Mukti Ali. Ia mengapresiasi

¹³⁸ Ibid., 230.

¹³⁹ Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, 16.

¹⁴⁰ Ibid., 24.

¹⁴¹ Natsir, *Mencari Modus Vivendi Antar Ummat Beragama*, 10.

gagasan perdamaian yang dikemukakan oleh Pope Paul VI. Ia mengutip pesan Pope Paul VI yang berbunyi:

“Peace cannot be based on a false rethoric of words which are welcomed because they answer to the deep, genuine aspirations of humanity, but which can also serve, and unfortunately have sometimes served to hide the lack of true spirit and of real intention for peace, if not indeed to mask sentiments and actions of appression and party interests. Nor can one rightly speak of peace where no recognition or respect is given to its solid foundations: namely sincerity, justice and love in the relations, between states, and within the limits of each nation, in the relations of citizens with each other and with their rulers; freedom of individuals and of peoples, in all its expressions civic, cultural, moral, and religious; otherwise, it is not peace which will exist-even if, perchance, oppression is able to create the external appearance of order and legality- but an unceasing and insuppressible growth of revolt and wars.”¹⁴²

Mukti Ali menggambarkan bahwa Indonesia sesungguhnya adalah negara yang cinta damai. Mengutip apa yang dikemukakan oleh Christiaan Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa sebagai negara Muslim (dalam arti negara yang didiami oleh mayoritas Muslim dan secara resmi Indonesia memang belum pernah mendeklarasikan sebagai sebuah negara Muslim) Mukti Ali mengatakan bahwa rasa keberagaman adalah sangat kuat dan tidak pernah hilang. Hubungan antara Muslim dan komunitas agama lain di Indonesia adalah sangat membanggakan. Mereka hidup secara harmonis dan damai.¹⁴³

Namun, Mukti Ali memaparkan bahwa situasi tahun 60-an masyarakat Indonesia merasakan adanya ketegangan-ketegangan di antara satu kelompok agama dengan kelompok agama lainnya, antara orang Islam dan orang Kristen. Setelah tahun 1965, ketegangan itu pecah menjadi konflik terbuka. Ada masalah-masalah yang menyebabkan semua ini terjadi. Misalnya, menurut pandangan orang Islam, sikap dan perilaku orang Kristen adalah ofensif. Para intelektual Kristen

¹⁴² Ali, “Dialogue Between Muslims and Christians in Indonesia and Its Problems,” 52.

¹⁴³ Ibid., 54.

melakukan serangan yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad Saw, Qur'an dan ajaran-ajaran Islam lewat tulisan-tulisan. Inilah sumber serangan yang menyakitkan kepada orang Islam.¹⁴⁴ Padahal, umat Islam memiliki keyakinan yang berbeda dari keyakinan orang Kristen. Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang suci yang menjadi utusan Tuhan. Al-Qur'an adalah kitab suci dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya saling pemahaman, saling pengertian, dan bahkan harus berani mengubah sikap yang semula berasumsi negatif dan selalu bermusuhan menjadi asumsi positif dan persahabatan. Ia mengatakan:

“This is a very important factor in straining the relations between these two world communities, Christian and Islamic. This generates bitterness and hatred. Moreover this malicious propaganda necessarily results in creating in the hearts of the Christian masses contempt and hatred against the Muslims.

To my mind, a change of their attitude and behaviour in this respect must be made, at least to an extent that their criticism and opposition does not become an instrument of hatred and provocation.”¹⁴⁵

Jadi, memang diperlukan perubahan sikap dan perilaku untuk tidak saling menciptakan rasa kebencian dan permusuhan. Pengalaman konflik memang pernah terjadi antara orang Kristen dan Islam, terutama peristiwa perang Salib yang membekas sampai sekarang ini. Dalam kasus Indonesia, Mukti Ali sempat menyinggung provokasi orang Kristen, seperti kasus pendirian gereja di suatu tempat yang seluruhnya didiami oleh orang Muslim, paling tidak sebagian besarnya adalah Muslim, sehingga menimbulkan reaksi dari penduduk lokal itu. Sering kali konflik berawal dari masalah itu. Lebih jelasnya adalah:

“It has been said before that sporadic explosion of conflict between the Christians and the Muslims in more than one place in Indonesia has occurred. These conflicts are caused mainly by the provocation of the Christians. The building of churches in the predominantly Muslim surrounding naturally leads to unfavourable reaction from the part of

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ibid., 55.

*the local inhabitants. As an illustration, an accident occurred lately in the suburbs of Djakarta, the capital of Indonesia.*¹⁴⁶

Faktor pendirian tempat ibadah tentu bukan satu-satunya kasus yang menyebabkan ketegangan. Banyak kasus-kasus yang saling bergantian baik dihadapi oleh kalangan Muslim maupun oleh Kristen atau agama-agama lain. Beberapa kasus di Papua, di Aceh, di Lampung dan juga tempat-tempat lain bisa ditemukan.

Faktor kemiskinan dan keterbelakangan juga sempat menjadi pemicu konflik, karena tidak jarang kedua hal itu dijadikan sebagai sasaran untuk penyebaran agama dengan melalui pembagian barang-barang konsumsi dan kebutuhan lainnya.¹⁴⁷ Selain itu, opini masyarakat yang bersifat menghasut juga menjadi faktor ketegangan. Ketika terjadi konflik, salah satu umat beragama mencoba menghasut opini masyarakat untuk menyalahkan umat yang lain karena dituding agresif dan tidak toleran. Lebih jelasnya:

*“When an accident really occured afterwards, the Christians tried to incite public opion to blame the Muslims for being aggressive and intolerant. This sort of accident has really a far-reaching consequence and has burned sentiment of the Muslims.”*¹⁴⁸

Masalah perdamaian memiliki cakupan yang luas, bukan hanya perdamaian lokal suatu negara tetapi juga perdamaian dunia, perdamaian umat manusia. Tetapi, dalam mewujudkan perdamaian umat manusia itu, oleh Mukti Ali, dinyatakan bahwa pembangunan manusia menuju komunitas dunia itu bukan hanya persoalan pemahaman saling ketergantungan, toleransi dan relativitas budaya, tetapi juga persoalan adanya gap antara kaya-miskin, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tatanan internasional berkaitan dengan kekayaan/kemakmuran, kapasitas produktif dan distribusi kekuasaan.¹⁴⁹ Namun,

¹⁴⁶ Ibid., 56.

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Mukti Ali, “Towards World Community Cooperation and Resource Mobilization,” *Al Jami'ah* XIII, no. 6 (1974): 15.

di negara berkembang kapasitas untuk komunikasi antar agama dan kerjasama yang efektif juga tergantung pada tingkat kesamaan yang lebih besar dalam relasi-relasi politik.¹⁵⁰

Adanya perbedaan kepercayaan agama, bagi umat Islam bukanlah otomatis menjadi halangan untuk bisa hidup berdampingan secara damai. Menurut Natsir, hidup berdampingan itu bukan hanya toleransi pasif, tetapi juga harus melakukan hal-hal aktif yaitu berbuat baik, berbuat adil antara satu dengan lainnya.

Oleh Natsir, hal itu diungkapkan :

“Bukan sekedar untuk hidup berdampingan dengan toleransi yang pasif saja, akan tetapi lebih positif dari itu; untuk berbuat baik, dan berlaku adil antara satu sama lain. Kita ummat Islam, diandjurkan supaya tidak dihalangi oleh perbedaan agama, untuk berbuat baik dan berlaku adil, terhadap ummat manusia tanpa diskriminasi agama dan kepertajaan.”¹⁵¹

Lebih lanjut Natsir mengajak agar umat beragama sama-sama mengadakan *modus vivendi*. *Modus vivendi* adalah bahasa Latin yang berarti cara hidup. Maksudnya adalah persetujuan sementara antara kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁵² *Modus vivendi* ini adalah bekerja bersama-sama, misalnya dalam menghadapi ateisme, menahan keruntuhan akhlak masyarakat Indonesia, dan memulihkan kesusilaan dan budi pekerti. Sebagai umat beragama, mereka harus bahu-membahu menanggulangi pemulihan hidup bersusila dan bermoral dalam masyarakat sebagai “proyek bersama”.¹⁵³

Umat manusia adalah satu, sebagai makhluk dari Khaliq yang Satu. Manusia adalah satu keluarga atau persaudaraan, yang semua anggotanya tanpa kecuali sama-sama berhak hidup, yang terdiri dari unsur-unsur fitrah kejadian yang sejenis, sama-sama memiliki

¹⁵⁰ Ibid., 16.

¹⁵¹ Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, 18–19.

¹⁵² Hassan (red.) Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ihtiar Baru-Van Hoeve, 1989), 2268.

¹⁵³ Natsir, *Mencari Modus Vivendi Antar Ummat Beragama*, 24.

martabat kemanusiaan. Inilah yang digunakan oleh Natsir untuk memaknai Tauhid, yakni menuju iman pada Allah, Khalik yang satu, dan menuju pada umat manusia yang satu. Tauhid adalah *hablum-minallah* dan *hablum-minannas*.¹⁵⁴

Masih menurut Natsir, takwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal di antara umat manusia. Iman kepada Allah menimbulkan sikap menghormati martabat pribadi sesama manusia. Rujukan yang dipakai untuk memperkuat argumen itu adalah apa yang disebutnya dari Abu Ju'la yang berbunyi: “*Al-khalqu kulluhum ‘iyalullâhi fa ahabbuhum ilaihi anfa’uhum li-iyâlihi*” (“Semua makhluk adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintainya ialah yang paling bermanfaat bagi sesama tanggungannya”). Begitu juga ia merujuk apa yang disebutnya sebagai pesan Rasulullah saw. yang berbunyi: “*Irhamû man fi al-ardli yarhamukum man fi al-samâ’i*” (“Sayangilah penduduk bumi ini, niscaya kamu akan disayangi oleh siapa yang di langit”).¹⁵⁵

Natsir mengatakan:

“Kitabullah dan Sunnah-Rasul mengadakan kepada kita, bahwa bumi Allah, bukanlah monopoli kita semua. Ia ‘Ijalullah, umat manusia sebagai keluarga tanggungan Allah. Sebagai keseluruhan terdiri dari bermatjam-matjam unsur, unsur berbagai-bagai bangsa, dan unsur berbagai-bagai aliran kepertjajaan dan agama.”¹⁵⁶

Menjelaskan ayat di atas, Natsir mengingatkan agar umat Islam tidak a priori untuk bermusuhan dengan golongan-golongan seperti tersebut dalam ayat di atas. Namun demikian, umat Islam juga tidak boleh meleburkan diri dalam aliran-aliran itu semua. Ada satu motto yang dikemukakan untuk menggambarkan di mana posisi umat Islam harus berperan. Motto itu adalah “bangun dan maju dengan identitas kepribadian sendiri, berlomba-lomba dengan mereka semua untuk

¹⁵⁴ Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, 9–10.

¹⁵⁵ *Ibid.*, 10.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 11.

berbuat baik.” Motto ini didasarkan pada ayat al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah ayat 148.¹⁵⁷

Natsir juga memakai Surat Al-Baqarah ayat 213 untuk menjelaskan kesatuan umat. “Adalah manusia itu satu umat yang tunggal”. Penjabaran Natsir mengenai ayat di atas adalah:

“Bahwa dalam tubuh ummat manusia sebagai keseluruhan, ada berbagai-bagai bangsa dan bahasa, adalah satu fakta kehidupan yang tak dapat dimungkiri. Sudah begitu Sunnatullah, menurut hikmah iradah Ilahi dan tidak bisa dirobah.

Akan tetapi perbedaan bangsa dan suku bangsa, berlainan bahasa, warna kulit, dan tingkat ketjercadatan, tidak boleh dijadikan sumber sengketa, tidak boleh dijadikan sumber kesombongan, sumber mau menguasai sendiri.

Kepada ummat manusia sebagai keseluruhan dipesankan terlebih dahulu, bahwa adanya berbagai bangsa dan suku bangsa, ialah untuk berlaku kenal-mengenal, memberi dan menerima satu sama lain.”¹⁵⁸

Menurut Natsir, hal-hal di atas itulah yang menjadi dasar keragaman hidup berdampingan antar bangsa, bersih dari kesombongan dan kecongkakan bangsa dan jenis.¹⁵⁹

Dalam pengertian lain, Djohan Effendi menegaskan perlunya paradigma moral dan etis yang harus dikembangkan oleh umat Islam dan Kristen. Untuk menjelaskan tentang paradigma moral dan etis ini Djohan mengungkapkan cerita-cerita perjumpaan umat Islam dan Kristen pada masa Nabi. Ada tiga cerita yang diungkapkan. Pertama, cerita tentang pertemuan Nabi Muhammad (kanak-kanak) dengan Bahira (seorang Rahib) ketika Nabi ikut kafilah dagang pamannya. Bahiro merasakan bahwa pada anak itu (Muhammad) akan menjadi orang besar kelak. Kemudian dukungan moral Waraqah (seorang penganut agama Kristen) atas wahyu pertama yang diterima oleh

¹⁵⁷ Ibid., 12.

¹⁵⁸ Ibid., 13.

¹⁵⁹ Ibid., 15.

Nabi. Kedua, pengalaman umat Islam ketika mendapat perlindungan di negeri Abisinia di bawah kekuasaan Raja Nejasi. Ketika itu umat Islam mendapat ancaman dari kaum Quraisy, tapi mendapat simpati dari pihak Kristen. Ketiga, cerita tentang sikap respek Nabi Muhammad terhadap para penganut agama non-Islam. Nabi pernah mempersilahkan orang-orang Kristen dari Najran untuk mempergunakan Masjid Nabi sebagai tempat melakukan kebaktian.¹⁶⁰

Menurut Djohan, beberapa peristiwa di atas sesungguhnya mengandung dimensi moral dan etis. Ia mengungkapkan :

“Cerita-cerita di atas, saya rasa, mengandung dimensi moral dan etis yang berkaitan dengan hubungan dan pergaulan yang seharusnya dikembangkan di antara umat Islam dan Kristen, bahkan di antara umat yang berbeda-beda agama pada umumnya. Yakni adanya keterkaitan moral dan etis untuk saling menghormati dan saling membela hak hidup satu sama lain.”¹⁶¹

Adapun yang harus dilakukan, menurut Djohan, adalah dimulai dengan kesediaan melakukan introspeksi dan otokritik secara jujur. Masing-masing harus mau melihat diri dan mencari kesalahan serta kelemahan masing-masing. Dengan kata lain, masing-masing harus menghindari kecenderungan untuk selalu mencari kesalahan orang dan mencari dalih pembenaran untuk diri sendiri. Setelah itu, masing-masing harus mencoba dan berusaha untuk saling memahami dengan sebaik-baiknya tentang kepercayaannya, keprihatinannya, persoalan-persoalan yang dihadapinya, dan latar belakang sejarahnya. Djohan optimis bahwa pemahaman yang utuh satu sama lain akan lebih mudah mewujudkan saling pengertian sebagai landasan kehidupan dan pergaulan bersama.¹⁶²

Tanggung jawab moral dan etis harus dikembangkan untuk mewujudkan kerjasama secara lebih nyata. Ini adalah tantangan

¹⁶⁰ Djohan Effendi, “Dimensi Moral Dan Etis Dalam Perjumpaan Islam-Kristen: Tinjauan Dari Sisi Islam,” *Majalah Peninjau* XIII, no. 1+2 (1986): 181–183.

¹⁶¹ *Ibid.*, 183.

¹⁶² *Ibid.*, 184.

bersama yang dihadapi oleh umat beragama, terutama ketika kita menghadapi masalah kemiskinan.¹⁶³ Tentu saja, apa yang dimaksud tanggung jawab moral dan etis adalah untuk keselamatan dan kedamaian umat manusia. Ketika masing-masing umat memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk membangun kehidupan yang damai, maka benturan antar pemeluk agama bisa dihindari.

Sementara itu, mengikuti apa yang dikemukakan Gus Dur, kita harus mengembangkan rasa kebersamaan dan saling pengertian. Kerukunan umat beragama sangatlah penting, tetapi itu belum cukup kalau tidak ditumbuhkan sikap saling mengerti. Rukun berarti peaceful co-existence: hidup berdampingan secara damai, tapi tidak saling mengerti. Oleh karena itu, perlu dikembangkan rasa kebersamaan dan saling pengertian. Dari saling pengertian itulah akan ada titik temu. Ia mencontohkan, kenapa orang Kristen membangun gereja dan orang Islam membangun masjid. Sebagai umat beragama, mereka (umat Kristen dan Islam) sama-sama membutuhkan tempat-tempat beribadah. Saling pengertian akan adanya kebutuhan itu menjadi titik temu yang sangat baik, sehingga mereka bisa membangun kebersamaan.¹⁶⁴

Kerukunan umat beragama tidak semata-mata bermuara pada masalah agama tetapi juga menyentuh berbagai bidang kehidupan lain, seperti sosial, politik, budaya, hukum dan sebagainya. Karena itu perlu mencari, menggali, menyusun dan menyebarkan bingkai teologis kerukunan disamping bingkai sosio-kulturalnya. Seperti diungkapkan oleh Burhanuddin Daja, ia mengatakan:

“Kalimatun sawâ’, konsep yang sama, dasar yang sama, dalil yang sama, visi yang sama, ungkapan yang sama, obsesi yang sama dan sebagainya, ini tentu bukan hanya terbatas adanya pada ajaran tentang Tuhan.

¹⁶³ Ibid., 185–186.

¹⁶⁴ Wahid, “Dialog Agama Dan Masalah Pendangkalan Agama,” 56–57.

Untuk dimensi budaya, seperti budaya keterbukaan, budaya tanpa kekerasan dan hormat menghormati, budaya solidaritas, budaya keadilan dan kemerdekaan, kepedulian sosial dan lain-lain, akan dengan mudah pula digali kalimatun sawâ' dari khasanah ajaran-ajaran dasar berbagai agama itu, apakah kitab sucinya, dogma-dogmanya, atau warisan-warisan sejarahnya yang luhur dan sebagainya, termasuk konsepsi tentang manusia sendiri.”¹⁶⁵

Agama mengantarkan pada kesempurnaan eksistensi manusia, sumber vitalitas yang mewujudkan perubahan dunia dan melestarikannya. Tanpa agama manusia tidak sempurna. Agama merupakan salah satu sumber nilai, memiliki peranan, arti dan bahkan sumbangan yang sangat besar dan paling tinggi harganya bagi setiap jenjang kehidupan manusia. Begitu vitalnya agama ini kadang-kadang atas nama agama orang bersatu dan bersaudara. Demi agama pula orang bertengkar dan berseteru.¹⁶⁶

Dalam hal ini, beberapa ayat al-Qur'an menunjukkan perspektif Islam tentang hubungan antar agama-agama. Islam memberi kebebasan “bagimu agamamu dan bagi agamaku”(Q.S. Al-Kâfirûn (109): 6). Islam juga menganjurkan agar terjadi sikap “saling menolong dalam kebaikan dan takwa”. Islam juga tidak melarang untuk bertukar pikiran, berdiskusi dengan penganut agama lain dengan cara-cara yang baik dan sopan.(Q.S. Al-Ankabût (29): 46)

Kerukunan hidup umat beragama lebih dari sekedar sikap dan pandangan toleran dalam menghadapi berbagai keyakinan dan ajaran agama yang berbeda-beda. Hal ini mengimplikasikan tindakan aktif dalam menjamin hubungan dan kerjasama yang harmonis dan penuh pengertian antar para pemeluk suatu agama, antar para pemeluk agama yang berbeda-beda, dan antara para pemeluk agama

¹⁶⁵ Burhanuddin Daja, “Bingkai Teologi Kerukunan Beragama (Kembali Kepada Kitab Suci),” *Al-Jami'ah*, no. 59 (1996): 193–194.

¹⁶⁶ Burhanuddin Daja, “Dakwah, Misi, Zending Dan Dialog Antar Agama Di Indonesia,” in *70 Tahun H.A. Mukti Ali, Agama Dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), 466–467.

dengan pemerintah.¹⁶⁷ Tiga hal terakhir adalah penjabaran dari trilogi kerukunan hidup umat beragama. Kehidupan rukun adalah modal dasar untuk pembangunan. Adapun kerukunan antar umat beragama sesungguhnya terlahir dari adanya hubungan dialogis yang mengembangkan sikap toleransi/saling menghormati.¹⁶⁸

Oleh karena itu, umat beragama mesti menciptakan kerukunan terus menerus dalam kehidupan beragama. Adapun strategi untuk menciptakan kerukunan tersebut adalah kemauan dari masing-masing pemeluk agama untuk memahami kembali pesan-pesan Tuhan ada dalam kitab suci masing-masing. Dengan pemahaman yang benar, dipastikan umat beragama akan menghindari konflik antar agama. Menurut Alwi Shihab :

“Konflik antar agama adalah fenomena berumur setua agama-agama itu sendiri. Meski demikian, cita-cita akan kerukunan umat beragama tak pernah pupus, karena bagi banyak orang penyelamatan umat manusia terletak pada persatuan umat beragama dalam memecahkan persoalan-persoalan fundamental yang bersumber pada materialisme dan ketakberagamaan. Di atas segalanya, kerukunan umat beragama bukanlah utopia yang tak mungkin diwujudkan, betapapun sulitnya. Lebih-lebih di Indonesia, di mana ada persoalan dalam hubungan antara umat dua agama besar: Islam dan Kristen. Tapi bagaimana cita-cita besar itu bisa diwujudkan?”

Umat Islam dan umat Kristiani hendaknya sadar akan pentingnya kehendak yang terkandung dalam perintah Tuhan. Pemahaman terhadap substansi perintah Tuhan ini tak lain adalah manifestasi iman kita kepada-Nya. Karena adalah janggal bila manusia berusaha mewujudkan kehendak Tuhan di atas bumi tanpa lebih dahulu memahami substansi keinginan-Nya.”¹⁶⁹

¹⁶⁷ Daja, “Bingkai Teologi Kerukunan Beragama (Kembali Kepada Kitab Suci),” 190.

¹⁶⁸ Daja, *Perbandingan Agama: Suatu Paradigma Studi Strategis Dan Pembangunan Nasional Indonesia*, 11.

¹⁶⁹ Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, 116.

Mengikuti apa yang dikemukakan Alwi Shihab, maka pemahaman atas substansi (kehendak) perintah Tuhan adalah salah satu pijakan kukuh dalam membina hubungan antara pemeluk Islam dan Kristen. Kerjasama adalah sesuatu yang sangat positif. Untuk menciptakan kerjasama, kedua belah pihak dituntut bersama-sama mengoreksi citra dan kesan keliru yang selama ini tergambar dalam benak masing-masing mengenai pemeluk agama lain. Diakui, perbedaan memang tidak dapat dipungkiri, tapi dialog harus difokuskan pada titik-titik persamaan antar kedua agama. Alwi menggunakan bahasa al-Qur'an kalimatun sawa' untuk menyebut titik persamaan. Adapun di antara titik persamaan itu adalah penciptaan suatu kehidupan bermoral yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan manusia.¹⁷⁰

Kerja sama antar pemeluk agama itu dimaksudkan untuk menanggulangi banyak problem manusia modern masa kini, misalnya penanggulangan aneka ragam eksploitasi, penindasan, ketidakadilan, kemerosotan moral, kemiskinan, dan kebodohan. Jadi, ada kebutuhan bersama yang dirasakan oleh manusia. Hal ini menuntut dilakukannya upaya-upaya di antara pemeluk agama.

¹⁷⁰ Ibid., 117.

BAB IV

TANTANGAN DIALOG ANTAR AGAMA

A. Dialog dan Persoalan Sosial

Mencermati perjalanan umat beragama di Indonesia, tampak bahwa di kalangan umat beragama ada segudang persoalan. Persoalan-persoalan itu ada yang sudah terselesaikan, ada yang masih dalam proses penyelesaian, dan ada juga yang belum terselesaikan. Beberapa persoalan dalam hubungan antar umat beragama terasa masih berlanjut sampai masa sekarang dan mungkin sampai masa yang akan datang. Beberapa kasus yang pernah menimpa umat beragama, seperti di Ambon dan Sambas, di Papua, Aceh dan Lampung adalah sedikit contoh yang masih menjadi pelajaran berharga umat beragama.

Di antara persoalan di atas, yang masih menyelimuti, dan mungkin terus akan menyelimuti umat beragama adalah masalah identitas (*identity*),¹⁷¹ yakni identitas sebagai umat beragama yang berimplikasi dalam segala aspek kehidupan. Identitas adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi, identitas yang dipegang secara membabi buta, tanpa memberi kesempatan dialog, akan membawa implikasi yang tidak baik

¹⁷¹ Jacques Waardenburg, "Critical Issues in Muslim-Christian Relations: Theoretical, Practical, Dialogical, Scholarly," *Jurnal Islam and Christian-Muslim Relations* 8, no. 1 (1997).

bagi kehidupan beragama. Di sisi lain, saling menjaga antar identitas akan sangat menentukan terciptanya kerukunan umat beragama. Natsir telah mengingatkan betapa sensitifnya masalah identitas ini.¹⁷² Beberapa peristiwa konflik antar pemeluk agama seringkali berbenturan dalam masalah identitas, terutama ketika tahun 60-an atau 70-an. Bahkan di tahun-tahun setelah itu, persoalan identitas bukan hilang sama sekali.

Sering kali identitas masih menjadi sumber masalah dalam relasi umat beragama. Di beberapa tempat (negara), identitas suatu agama diidentikkan dengan letak geografis (kedaerahan) tertentu. Akhirnya, yang terjadi adalah logika hitam putih. Di daerah tertentu adalah Islam misalnya, atau di daerah yang lain adalah Kristen. Pada skala internasional, identitas agama dalam logika kedaerahan pernah mewarnai kehidupan beragama, bahkan sampai sekarang. Di antara contohnya adalah orang-orang Islam tradisional menganggap bahwa semua orang Eropa (Barat) otomatis adalah Kristiani. Padahal, seiring perjalanan sejarah, meningkatnya jumlah orang Eropa tidak memperjelas afiliasi kepada Kristen. Tidak sedikit orang Eropa yang beragama Islam atau Yahudi. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Eropa menganggap bahwa semua orang Turki, Persia dan Arab otomatis adalah “Muslim”. Padahal kenyataannya, tidak sedikit orang Arab yang Kristiani.

Dalam penggunaan umum di Timur Tengah, termasuk Israel, masyarakat diidentifikasi dan ditentukan sesuai dengan komunitas sosio-religius yang dimiliki, tanpa melihat komitmennya terhadap agama itu. Terutama dalam situasi konflik dan minoritas, makna sosial menonjol pada makna agama; misalnya orang Azeris adalah Muslim dan orang Armenia adalah Kristen. Identitas “Kristen” atau “Muslim” dalam wilayah-wilayah di mana mereka hidup bersama, secara fundamental menjadi identitas kolektif. Jika terjadi konflik pun kemudian menjadi konflik kolektif.

¹⁷² Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, 16.

Di Indonesia, yang merupakan negara kesatuan dengan prinsip tanpa perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan),¹⁷³ dihantui munculnya faktor identitas yang mengental. Pengalaman beberapa kasus konflik antar umat beragama hampir menciptakan identifikasi agama berdasarkan kedaerahan, misalnya, Halmahera adalah daerah Kristen, sementara Ternate adalah daerah Islam. Begitu juga, ada suatu daerah yang hanya boleh didiami oleh etnis tertentu saja dalam skala kecil tentu masih terjadi.

Karena identitas inilah agama-agama mengalami perbedaan. Para pemeluk agama cenderung hanya mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan cara hidup tersendiri atau dengan meletakkan doktrin-doktrin. Mereka juga membuat distingsi antara agama mereka dan identitas sosial mereka, yakni untuk mengatakan antara makna agama dan makna sosial dari identitas mereka. Oleh karena itu, pencampuran antara identitas agama dan identitas kedaerahan harus dihapuskan. Khususnya Indonesia, jika problem ini tidak terselesaikan, maka potensi konflik antar agama berdasarkan kedaerahan akan sangat mungkin terjadi. Secara konstitusional, Indonesia sesungguhnya telah menjamin kebebasan beragama, yang berarti masing-masing tidak boleh mengganggu identitas keyakinan orang lain. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 dan beberapa ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat berkenaan dengan kebebasan beragama.¹⁷⁴ Sekarang tergantung bagaimana realisasi konstitusi itu di tengah masyarakat.

Karena itulah, dialog adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Dialog dalam konteks semacam itu (adanya klaim identitas) memang akan memberi kesan adanya negosiasi antara dua kelompok atau komunitas daripada pertemuan dua orang untuk mengekspos kepercayaan pribadi masing-masing yang mereka sadari sepenuhnya. Namun, hal ini adalah langkah yang memang harus ditempuh. Karena,

¹⁷³ Syamsuhadi Marse, *Pedoman Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 1990).

¹⁷⁴ Nuhrison, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 1997), 7–14.

jika perasaan identitas ini melekat pada masing-masing pihak secara membabi buta maka sikap simpati mungkin tidak dapat dibayangkan adanya, dan menyebabkan posisi saling curiga mencurigai. Jadi, yang penting adalah adanya pertemuan di antara para pemeluk agama untuk dialog dengan keluhuran dan kejujuran hati dan pikiran.

Masalah berikutnya adalah berkembangnya persepsi yang tidak benar mengenai pemeluk agama lain. Umat beragama telah mempersepsi masing-masing melalui bangunan pemikiran agamanya masing-masing. Artinya, pemeluk agama tertentu mempersepsi agama lain bukan atas dasar kontak dengan para pemeluk (pengikut) agama orang lain tersebut. Orang-orang Islam, misalnya, mempunyai konstruk khusus mengenai Kristen, yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an tertentu, yang mengakui variasi-variasi tertentu. Sementara itu, orang-orang Kristen juga mempunyai konstruksya sendiri mengenai Islam.

Persepsi masing-masing agama adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Antara satu dengan lainnya tidak jarang terjadi kontradiksi yang sangat tajam. Dari kontradiksi inilah, konflik-konflik mudah terjadi. Oleh karena itu, umat beragama, dalam pengertian sosial atau religius, perlu melihat masing-masing melalui konstruk-konstruk umum yang mereka buat. Konstruk-konstruk ini mempunyai pengaruh yang besar sekali pada hubungan antara umat beragama. Umat beragama harus secara jujur mau mendengarkan apa yang dipersepsikan oleh masing-masingnya. Begitu juga sebaliknya, mereka harus jujur menyampaikan persepsi dari agamanya masing-masing. Paling tidak, bisa ditiru apa yang telah disampaikan oleh Nurcholish Madjid dalam banyak tulisannya. Ungkapan tentang *kalimatun sawa*' dan persepsi tentang ahli kitab yang jauh dari sikap-sikap permusuhan.¹⁷⁵

Klaim menjadi masyarakat sempurna adalah sesuatu yang menjadi masalah dalam hubungan antar umat beragama. Di kalangan pemeluk agama ada perasaan kesempurnaan pada diri masing-masing, misalnya

¹⁷⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 177–200.

Yahudi merasa sebagai umat pilihan, Kristen mereka sebagai umat penyelamat dan Islam mereka sebagai umat yang paling sempurna. Begitu juga, ada masyarakat yang merasa yakin mewakili realitas Islam atau Kristen yang sempurna sebagai agama, Sehingga tidak jarang Islam atau Kristen telah terideologi secara tertutup. Dalam kasus Islam, ada orang-orang Islam, misalnya, yang mendeklarasikan Arab Saudi atau Iran pada saat ini menjadi realisasi Islam yang benar di dunia. Dalam kasus Kristiani, ada orang-orang yang mendeklarasikan, misalnya, gereja katolik Roma atau gereja lain menjadi perwujudan Kristiani yang benar di dunia.

Adanya klaim dan ideologisasi semacam itu mengharuskan umat beragama untuk mengakui distansi yang ada. Itu tidak bisa dihindari. Dengan menyadari distansi, baik Kristen maupun Islam, akan kondusif untuk melakukan komunikasi. Jika agama terjebak ke dalam suatu ideologi dan jika terjadi absolutisasi masyarakat atau institusi atas nama agama, maka dialog antar pemeluk agama akan terhalangi, karena masing-masing merasa paling benar dan paling sempurna.

Peran para pemimpin agama sangat besar pengaruhnya pada ideologisasi agama dalam negara. Ketika satu komunitas dimobilisir oleh aktivitas-aktivitas ideologis para pemimpin, maka mereka akan mudah bergerak dan melawan pihak lain. Dalam kasus itu agama dari komunitas tersebut akan mengambil bentuk-bentuk baru dan agresif, yang menyebabkan adanya hubungan buruk yang saling membalas. Hubungan semacam itu lebih sebagai akibat dari interpretasi yang memiliki interes-interes praktis oleh kedua pihak.

Selanjutnya, masih banyak pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak didik belum dilengkapi dengan sensitif pluralisme. Pendidikan agama untuk anak-anak masih diwarnai oleh penanaman sisi teologis yang seringkali mempertentangkan secara tajam antara umat agama yang satu dengan lainnya. Anak didik sudah dimasuki “virus” sentimen, anti-toleransi, anti pluralisme dan semacamnya. Padahal, upaya dialog harus dilakukan sejak dini, yakni sejak masa anak-anak. Penanaman sikap kepada anak-anak untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain adalah modal utama untuk masa selanjutnya.

Hal ini bisa dilakukan, paling tidak, dengan menghindari ucapan-ucapan dan perilaku yang saling menghina. Dalam konteks ini perlu memberikan pengetahuan dasar kepada anak-anak tentang agama atau keyakinan orang lain.

Institusi pendidikan menjadi faktor teramat penting dalam menumbuhkan budaya dialog sejak dini. Pendidikan harus diisi dengan materi-materi seperti yang dicontohkan beberapa ayat al-Qur'an tentang toleransi, kebebasan beragama, tolong-menolong, saling menghormati dan saling bertukar pikiran kepada penganut agama lain. Institusi pendidikan diharapkan akan melahirkan generasi yang menghormati keanekaragaman agama, tidak menanamkan superioritas-inferioritas agama dan mengutamakan penggalian terhadap ajaran-ajaran dasar yang sama dari kitab-kitab suci.¹⁷⁶

Oleh karena itu, untuk mencapai perubahan dalam pendidikan agama, jika masih banyak ditemukan muatan pendidikan yang penuh nuansa sentimen, anti-toleransi dan anti-pluralsime, maka diperlukan revisi buku-buku sekolah yang digunakan, dan bahkan bukan hanya buku-buku tentang agama tetapi juga buku-buku tentang sejarah dan geografi. Kiranya tidak sedikit, buku-buku non-Islam membikin ungkapan-ungkapan yang menyakitkan tentang Muslim, terutama buku-buku yang dipengaruhi oleh pemikiran para orientalis. Begitu juga sebaliknya, buku-buku Muslim membuat ungkapan yang menyakitkan tentang orang-orang Kristen, terutama oleh kelompok fundamentalis. Persoalan ini tampaknya tidak hanya terdapat di Barat dengan orientalismenya, tetapi juga di Indonesia. Buku-buku yang menginformasikan tentang agama orang lain dengan standar teologis agamanya masing-masing banyak ditemukan. Inilah yang kemudian menimbulkan sikap yang tidak simpatik kepada pemeluk agama lain, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan sebagainya.

Di tengah umat beragama yang terbiasa melihat dunia hanya dari perspektif agama mereka secara spesifik sehingga memunculkan

¹⁷⁶ Burhanuddin Daja, *Dialog Antar Agama Dan Pembangunan* (Yogyakarta, 1999).

Kristen-sentris dan Islam-sentris, maka kebutuhan untuk belajar lebih banyak tentang agama orang lain adalah sangat penting. Kita perlu mengembangkan kesadaran konstruktif mengenai “agama-agama lain”. Selain itu, diskusi dan sikap menerima terhadap masyarakat yang pluralistik menjadi sesuatu yang sangat menentukan pada masa-masa mendatang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian agama (studi agama) terhadap persoalan-persoalan yang selama ini terabaikan dalam konteks relasi antar umat beragama. Kajian-kajian itu adalah usaha untuk melakukan kritisisme situasi sejarah yang seringkali menunjukkan kesalahpahaman antar umat beragama. Melalui kajian-kajian itu dimungkinkan tidak hanya dapat menemukan fakta-fakta tetapi juga meneliti fakta-fakta yang berarti pada masa lalu atau berarti pada masa sekarang. Hendaknya studi agama-agama tidak hanya berkonsentrasi pada fakta-fakta agama tetapi juga pada hal-hal yang telah diinterpretasikan oleh pemeluk agama dalam semua varietasnya. Di Indonesia, perkembangan studi agama di beberapa pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga lain menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, terutama di UIN, IAIN, STAIN, dan juga PTKI lainnya, sehingga pencarian titik temu agama-agama bisa lebih banyak alternatif.

Menurut hemat penulis, keperluan yang urgen untuk melakukan studi agama adalah pada tiga aspek. Pertama, mengkaji sejarah relasi-relasi antar umat beragama. Dialog antar umat beragama, sebagaimana yang pernah terjadi dalam rentang sejarah, harus dilihat sebagai momen yang istimewa dalam sejarah relasi umat beragama dan interaksi pada umumnya. Kedua, mengkaji relasi-relasi yang sedang terjadi pada masa sekarang; misalnya tentang perkembangan-perkembangan pada hari-hari ini dan implikasi-implikasinya bagi relasi mereka. Ketiga, mengkaji akar-akar konflik antara komunitas-komunitas beragama dan mencari solusi yang tepat untuk memecahkan konflik semacam itu. Dalam studi semacam itu tentu saja diperlukan kontribusi ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora untuk menghindari konflik-konflik di masa depan.

Persoalan yang tidak kalah peliknya adalah masalah yang berkenaan dengan hubungan antara mayoritas dan minoritas. Dalam konteks internasional, tidak jarang masyarakat minoritas mengalami diskriminasi baik dalam masyarakat Kristen maupun Muslim. Banyak masyarakat Hindu atau Budha menjadi minoritas di suatu negara dan begitu juga sebaliknya. Menyikapi fenomena itu, perlunya dikembangkan sikap dan perasaan sama dari semua agama dan pengakuan penuh dari masing-masing pihak. Mayoritas hendaknya mau memahami minoritas, begitu juga sebaliknya.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa pada masa sekarang ini banyak orang Islam hidup sebagai minoritas dalam negara-negara Kristen, dan sebaliknya banyak juga orang Kristen hidup sebagai minoritas dalam negara-negara non-Kristen termasuk negara Muslim. Jika tidak dikembangkan sikap saling pengertian dan persamaan di antara mereka, bukan tidak mungkin terjadi konflik di antara mereka.

Kebanyakan agama di dunia ini telah menjadi agama-agama misi sejak awal dan telah terjadi saling kompetisi untuk saling memenangkan atau saling mengalahkan. Di sinilah masalah konversi mengambil tempat. Agama-agama sama-sama memiliki sensitif untuk menarik (mengubah) seseorang masuk dalam agamanya. Kristen memiliki misionaris, Islam memiliki da'i, agama lain juga memiliki alat yang sama. Di Indonesia misalnya, pada tahun 60-an dan 70-an, isu konversi menjadi perbincangan yang sangat serius. Oleh karena itu, perlu kode etik bagi aktivitas misi dan dakwah dalam rangka saling menghormati setiap kepercayaan lain dan untuk melindungi jatuhnya korban dari praktek-praktek yang tidak jelas yang digunakan oleh orang-orang fanatik, yang memang berbakat untuk melakukan konversi.

Kebebasan beragama merupakan sesuatu yang sangat urgen. Dari kebebasan beragama inilah, dialog memungkinkan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan secara terbuka dan secara langsung, dan menyampaikan masalah kebenaran kepada setiap yang lain. Kebebasan beragama akan dapat mengarahkan pada dialog yang

benar, karena masing-masing tidak dihindangi ketakutan, intimidasi dan perasaan was-was.

Masih ada masalah yang cukup serius untuk dihadapi, yakni berkaitan dengan orang-orang yang tidak mau melakukan dialog; baik mereka yang tidak mau berdialog mengenai masalah keyakinan dan moralitas, maupun mereka yang tidak mau melakukan dialog apapun, baik masalah keyakinan, moralitas maupun hal-hal praktis. Para pemeluk agama yang tidak siap dialog terbuka bisa ditemui di masing-masing pemeluk agama. Masing-masing memiliki kelompok-kelompok fundamentalis yang tidak mau kompromi. Mereka ini biasanya terwujud dalam gerakan-gerakan religius-ideologis yang merasa ingin menjaga fundamen-fundamen dan integritas agama mereka dan menutup diri mereka dari apa yang harus dikatakan oleh pemeluk agama lain.

Dalam pemeluk agama Kristen terdapat para fundamentalis atau evangelis, para misionaris yang fanatik, serta orang-orang ultra-konservatif yang melihat tradisi mereka sebagai eternal dan mereka menganggap sejarah itu adalah sesuatu yang negatif belaka. Begitu juga di dalam pemeluk Islam juga terdapat gerakan-gerakan fundamentalis yang mereduksi Islam pada versinya yang ideologis atau bahkan hanya pada interes-interes politik mereka, dan mungkin juga para ultra-konservatif. Dalam upaya mengatasi itu, bentuk-bentuk komunikasi baru harus dikembangkan dan kebencian-kebencian lama disampaikan secara rasional. Berbagai penyadaran tentang sensitif pluralisme harus terus dilakukan.

Inilah yang pernah ditegaskan oleh M. Syafi'i Anwar, bahwa adanya perbedaan agama-agama itu bukan berarti tidak ada "titik temu" yang dapat melahirkan mutual understanding di antara mereka. Titik temu itu bisa berupa kesatuan yang bersifat moral, teologis, dan metafisik. Titik temu juga bukan hanya berarti dimensi eksoteris (lahiriyah) agama-agama, tetapi juga dimensi esoterisnya (batinnya).¹⁷⁷ Secara tegas ia mengatakan bahwa bagi kaum Muslimin, dialog antar agama

¹⁷⁷ Anwar, "Sikap Politik Kepada Ahl Al-Kitab," 3.

bukanlah sesuatu yang diharamkan. Al-Qur'an sebagai kitab suci kaum Muslimin telah berdialog dengan agama-agama lain yang hadir sebelum datangnya. Pengakuan dan ajakan dialog itu bisa dilihat dalam surat Ali Imron ayat 64. Mengikuti apa yang dikatakan Syafi'i Anwar bahwa dalam masalah dialog dan hubungan antar agama, tawaran Al-Qur'an adalah teologi inklusif yang ramah, dan menolak eksklusivisme. Al-Qur'an bersikap positif terhadap agama-agama lain.¹⁷⁸

Selain itu, penulis memberi penekanan terhadap paradigma yang menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam mencari jalan keluar untuk mengembangkan dialog di masa depan. Dalam hal ini umat beragama, khususnya umat Islam, dapat belajar dari pengalaman Nabi Muhammad ketika mengimplementasikan pengalaman toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pengakuan akan pluralisme agama yang pernah dialami oleh umat beragama pada masa Nabi.

Pengalaman Nabi yang paling awal adalah pengalaman hidup bersama dengan pemeluk agama lain. Sebagaimana dikatakan Michael H. Hart bahwa di kota Mekkah sebelum datangnya Islam ada sejumlah kecil pemeluk-pemeluk Yahudi dan Nasrani, serta sejumlah besar penyembah berhala.¹⁷⁹ Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, Usman ibnu Huairis, Abdullah ibnu Djahsy dan Zaid ibnu Umar.¹⁸⁰ Berangkat dari sini sangat mungkin kontak telah terjadi di antara mereka. Di antara pemeluk agama saat itu melihat ada kesamaan antara agama yang dibawa Musa. Tokoh yang sempat terekam mengakui kesamaan apa (wahyu) yang diterima oleh Nabi dan Musa adalah Waraqa bin Naufal.

Ketika itu, Muhammad menceritakan kepada istrinya Khadijah tentang apa yang telah dialaminya di Gua Hira ketika didatangi Malaikat Jibril dan disampaikan wahyu dari Allah. Setelah Khadijah mendengar cerita dari Muhammad dan ketika Muhammad sedang tidur, Khadijah

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁹ Michael H. Hart, *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*, XII. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1990), 28.

¹⁸⁰ A Sjalabi, *Sedjarah Dan Kebudayaan Islam* (Djakarta: Djajamurni, 1970), 45.

berkonsultasi dengan saudara sepupunya (anak pamannya) Waraqa bin Naufal perihal apa yang telah dialami Muhammad. Waraqa kemudian mengakui bahwa Muhammad adalah Nabi umat ini, meski ia belum bertemu dengan Muhammad.¹⁸¹ Kemudian ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Waraqa bin Naufal pada saat akan mengelilingi Ka'bah, Waraqa mengingatkan kepada Muhammad bahwa beliau adalah Nabi atas umat ini. Dikatakannya bahwa Muhammad telah menerima Namus besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan Muhammad sangat berat.¹⁸²

Pengalaman yang sangat berkesan dan memiliki bekas yang sangat berharga adalah ketika Muhammad menyarankan kaum Muslimin untuk pergi ke Abisinia (Habsyi atau Ethiopia) yang penguasa dan rakyatnya memeluk agama Kristen.¹⁸³ Pengalaman itu menunjukkan betapa antar pemeluk agama bisa hidup rukun dan saling menerima antara satu dengan lainnya. Pada saat itu, rombongan pertama terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan,¹⁸⁴ atau ada yang mengatakan 10 laki-laki dan 4 perempuan.¹⁸⁵ Mereka kemudian pulang kembali setelah mendengar bahwa di Mekkah kaum Muslimin diperlakukan dengan baik. Tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Maka rombongan yang kedua kembali lagi ke Abisinia dengan 80 orang laki-laki tanpa istri dan anak-anak. Mereka tinggal di Abisinia sampai sesudah hijrah Nabi ke Yatsrib.¹⁸⁶

Orang-orang Islam mendapat perlindungan keamanan Raja Najasy dari ancaman kaum kafir Quraisy yang mengejar sampai ke

¹⁸¹ A Guillaume, *The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah* (Karachi: Oxford University Press, 1970), 111–116.

¹⁸² Chotijah Nasution, *Sejarah Dan Perkembangan Dakwah Islam* (Yogyakarta: Idea Offset, 1978), 1.

¹⁸³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 22.

¹⁸⁴ Kennet W. Morgan, *Islam Jalan Lurus* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1963), 11.

¹⁸⁵ Sjalabi, *Sedjarah Dan Kebudayaan Islam*, 65.

¹⁸⁶ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Tintamas, 1984), 118.

negeri Abisinia. Raja Najasy sempat berdialog dengan umat Islam berkenaan dengan keberadaan agama Islam yang menganjurkan untuk berlaku jujur, dapat dipercaya, bersih, tidak berdusta, menyambung silaturrahi, menyudahi pertumpahan darah dan sebagainya. Dialog tersebut membahas juga tentang posisi Islam dan Nasrani. Mengenai hal ini, Raja Najasy mengibaratkan dengan menggoreskan tongkat di tanah dan dia berkata, “Antara agama tuan-tuan dan agama kami sebenarnya tidak lebih dari garis ini.”¹⁸⁷ Selama di Abisinia kaum muslimin merasa aman dan tenteram.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa antara agama-agama, terutama agama Ibrahim (abrahamic religions), memiliki titik-titik persamaan. Titik-titik persamaan ini bahkan sampai pada hal-hal yang bersifat teologis, misalnya tentang keesaan Tuhan (tauhid). Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan moralitas dan etika dalam kehidupan sesama manusia, seperti sopan santun, kejujuran, keadilan, kesejahteraan, saling menghormati, saling menghargai dan lain-lain.

Pengalaman berikutnya adalah pengalaman ketika umat beragama (umat Islam, Nasrani dan Yahudi) menjalin hubungan kehidupan bernegara. Ketika pada periode Madinah, hubungan umat Islam, umat Nasrani dan Yahudi ditandai terbentuknya negara kota Madinah yang menjunjung tinggi pluralitas, baik agama, suku dan golongan. Bahkan sebelumnya, ketika umat Islam baru saja melakukan hijrah ke Madinah, kesadaran pluralitas ini terlihat sangat menonjol. Hubungan umat beragama waktu itu diawali dengan kontak damai antara umat Islam dengan penduduk Madinah, baik yang sudah menjadi muslim maupun yang masih memegang agama dan keyakinan sebelumnya. Semua penduduk menyambut kedatangan umat Islam dengan damai. Bahkan, orang-orang musyrik dan Yahudi menyambut kedatangan Muhammad dengan baik.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Ibid., 122.

¹⁸⁸ W.Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1956), 195–204.

Kemudian, dalam bidang politik kenegaraan, Nabi Muhammad memantapkan suatu tatanan kenegaraan yang luar biasa dengan mencoba melihat berbagai pihak dan berbagai kepentingan yang berkembang pada saat itu. Nabi lalu mewujudkan persatuan Madinah dan meletakkan dasar organisasi politik kenegaraan dengan mengadakan persekutuan yang kuat. Lalu disepakatilah Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu kaum muslimin –Anshar dan Muhajirin—dengan orang-orang Yahudi dan penduduk Madinah lainnya membuat perjanjian tertulis yang berisi beberapa hal yang prinsip, seperti pengakuan atas agama mereka masing-masing dan harta benda mereka. Dalam perjanjian itu disinggung juga tentang kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, tentang keselamatan harta benda dan larangan orang melakukan kejahatan. Itu merupakan sejarah baru dalam kehidupan politik dunia waktu itu.

Secara lengkap isi perjanjian Madinah itu dimuat dalam buku Sirah Muhammad karya Ibnu Ishak, yang banyak dinukil oleh tokoh-tokoh sejarah.¹⁸⁹ Di antara isi Piagam Madinah adalah bahwa negara mengakui dan melindungi kebebasan menjalankan ibadah agama masing-masing, semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat.¹⁹⁰ Dari situlah penduduk Madinah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, lintas agama dan lintas suku.

Pengalaman-pengalaman di atas memberi gambaran bahwa kemajemukan agama tidak menghalangi untuk hidup bersama, berdampingan secara damai dan aman. Bahkan, kemajemukan agama tidak menghalangi umat beragama untuk membangun suatu negara yang bisa mengayomi dan menghargai keberadaan agama-agama tersebut. Adanya saling pengertian dan pemahaman yang dalam akan keberadaan masing-masing menjadi modal dasar yang sangat menentukan. Seperti yang dikemukakan Djohan Effendi, pengalaman-pengalaman Nabi di atas mengandung dimensi moral dan etis. Di antara

¹⁸⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

¹⁹⁰ *Ibid.*, 93–94.

dimensi moral dan etis agama-agama adalah saling menghormati dan menghargai agama/ pemeluk agama lain. Jika masing-masing pemeluk agama memegang moralitas dan etikanya masing-masing, maka kerukunan, perdamaian dan persaudaran bisa terwujud.

Hal itu juga pernah dikemukakan oleh M. Amin Abdullah, seorang guru besar UIN Yogyakarta, bahwa pintu masuk titik temu agama-agama bisa melalui etika dan spiritualitas. Ia mengemukakan:

“Al-Qur’an hanya mengajak kepada seluruh penganut agama-agama lain dan penganut agama Islam sendiri untuk mencari “titik temu” (kalimatun sawa’) di luar aspek teologis yang memang sudah berbeda sejak semula. Pencarian titik temu lewat perjumpaan dan dialog yang konstruktif berkesinambungan merupakan tugas kemanusiaan yang perenial, abadi, tanpa henti-hentinya. Pencarian titik temu antar umat beragama dapat dimungkinkan lewat berbagai cara, salah satunya lewat pintu masuk etika, karena lewat pintu masuk etika manusia beragama secara universal menemui tantangan-tantangan kemanusiaan yang sama. Lewat pintu masuk etika ini – untuk tidak mengatakan lewat pintu teologis—manusia beragama merasa mempunyai puncak-puncak keprihatinan yang sama. Untuk era sekarang, tantangan scientisme dengan berbagai implikasinya, tantangan lingkungan hidup, menjunjung tinggi harkat kemanusiaan (human dignity), menghormati hak asasi manusia adalah merupakan agenda bersama umat manusia tanpa pandangan “bulu” keagamaannya. Lewat pintu etika ini, seluruh penganut agama-agama dapat tersentuh “religiusitas”nya, untuk tidak hanya menonjolkan “having a religion”nya. Lewat pintu etika, dimensi spiritualitas keberagamaan lebih terasa promising and challenging dan bukannya hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah kelembagaan agama.”¹⁹¹

B. Tantangan Dialog Antar Agama

Pada bahasan ini penulis ingin memberikan satu tawaran tentang standar yang dapat dipakai untuk mengembangkan dialog antar agama

¹⁹¹ M. Amin Abdullah, “Etika Dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam,” *Jurnal Ulumul Qur’an* IV, no. 4 (1993): 21.

di masa depan. Tawaran ini diilhami oleh pemikiran para cendekiawan Muslim Indonesia selama kurun waktu kurang-lebih 30-an dan berbagai perkembangan global umat beragama pada beberapa tahun terakhir.

Di era globalisasi ini umat beragama dihadapkan pada tantangan munculnya benturan-benturan atau konflik di antara mereka. Potensi pecahnya konflik sangatlah besar, sebesar pemilahan-pemilahan umat manusia ke dalam batas-batas objektif dan subjektif peradaban. Menurut Samuel P. Huntington, unsur-unsur pembatas objektif adalah bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, dan lembaga-lembaga. Unsur pembatas subjektifnya adalah identifikasi dari manusia. Perbedaan antar pembatas itu adalah nyata dan penting.¹⁹² Secara tidak sadar, manusia terkelompok ke dalam identitas-identitas yang membedakan antara satu dengan lainnya.

Dari klasifikasi di atas, harus diakui bahwa agama merupakan salah satu pembatas peradaban. Artinya, umat manusia terkelompok dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Kong Hucu dan sebagainya. Potensi konflik antar mereka tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pecahnya konflik antar umat beragama perlu dikembangkan upaya-upaya dialog untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan pembatas di atas.

Dialog adalah upaya untuk menjembatani bagaimana benturan bisa dieliminir. Dialog memang bukan tanpa persoalan, misalnya berkenaan dengan standar apa yang harus digunakan untuk mencakup beragam peradaban yang ada di dunia. Menurut hemat penulis, perlu adanya standar yang bisa diterima semua pihak. Dengan kata lain, perlu ada standar universal untuk semua. Standar itu hendaknya bermuara pada moralitas internasional atau etika global, yaitu hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian. Hal-hal ini bersifat universal dan melampaui kepentingan umat tertentu.¹⁹³

¹⁹² Huntington, "Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?," 12.

¹⁹³ Bassam Tibi, "Moralitas Internasional Sebagai Landasan Lintas Budaya," in *Agama Dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996), 163.

Standar universal ini memang bukan persoalan mudah, karena ia adalah gagasan teoritis yang mungkin berbeda dengan kenyataan-kenyataan di lapangan. Namun, sebagai nilai-nilai universal yang bisa melindungi hak-hak semua masyarakat dunia tampaknya nilai-nilai itu bisa mewakili kebutuhan bersama manusia, paling tidak dari standar kemanusiaan (manusiawi).¹⁹⁴

Di sinilah kemudian diperlukan suatu pendekatan dan metodologi yang proporsional baik secara intra-agama maupun antar agama untuk menghindari lahirnya truth claim yang mungkin justru akan memperuncing benturan. Banyak tawaran yang telah dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim Indonesia. Semua itu merupakan sumbangan pemikiran yang dapat menjadi moralitas yang bersifat universal atau menjadi global etik yang dapat dipakai oleh semua orang. Apa yang dikemukakan oleh Rasjidi dengan pemahaman pluralisme agama secara sosiologis, menjagi toleransi agama dan hak asasi manusia, Natsir dengan konsep *modus vivendi* dan persaudaraan universal yang penuh dengan nuansa hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama, Mukti Ali dengan *agree in disagreement*, Djohan Effendi dengan dimensi moral dan etisnya, Abdurrahman Wahid dengan self-kritiknya dan *peacefull co-existent*, Nurcholish Madjid dengan *samhah al-hanifiyyah-nya*, Burhanduddin Daja dengan kembali kepada kitab suci, dan Alwi Shihab dengan perlunya memahami pesan Tuhan, merupakan upaya untuk mencari solusi bagaimana umat beragama bisa hidup damai dan harmonis.

Selanjutnya, suatu dialog akan dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila, paling tidak, memenuhi hal-hal berikut ini. *Pertama*, adanya keterbukaan atau transparansi. Terbuka berarti mau mendengarkan semua pihak secara proporsional, adil dan setara. Dialog bukanlah tempat untuk memenangkan suatu urusan atau perkara, juga bukan

¹⁹⁴ Zainul Abas, "Dialog Agama, Pluralitas Budaya Dan Visi Perdamaian," *Kompas* (Jakarta, 1997).

tempat untuk menyelundupkan berbagai “agenda yang tersembunyi” yang tidak diketahui dengan partner dialog.¹⁹⁵

Kedua adalah menyadari adanya perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan memang merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Artinya, tidak ada yang berhak menghakimi atas suatu kebenaran atau tidak ada “truth claim” dari salah satu pihak. Masing-masing pihak diperlakukan secara sama dan setara dalam memperbincangkan tentang kebenaran agamanya.¹⁹⁶

Ketiga adalah sikap kritis, yakni kritis terhadap sikap eksklusif dan segala kecenderungan untuk meremehkan dan mendiskreditkan orang lain. Dengan kata lain, dialog ibarat pedang bermata dua; sisi pertama mengarah pada diri sendiri atau otokritik, dan sisi kedua mengarah pada suatu percakapan kritis yang sifatnya eksternal, yaitu untuk saling memberikan pertimbangan serta memberikan pendapat kepada orang lain berdasarkan keyakinannya sendiri. Agama bisa berfungsi sebagai kritik, artinya kritik pada pemahaman dan perilaku umat beragama sendiri.¹⁹⁷

Keempat adalah adanya persamaan. Suatu dialog tidak dapat berlangsung dengan sukses apabila satu pihak menjadi “tuan rumah” sedangkan lainnya menjadi “tamu yang diundang”. Tiap-tiap pihak hendaknya merasa menjadi tuan rumah. Tiap-tiap pihak hendaknya bebas berbicara dari hatinya., sekaligus membebaskan dari beban: misalnya kewajiban terhadap pihak lainnya, maupun kesediaannya pada organisasinya dan pemerintahannya. Suatu dialog hendaknya tidak ada “tangan di atas” dan “tangan di bawah”, semuanya harus sama.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Tibi, “Moralitas Internasional Sebagai Landasan Lintas Budaya,” 163.

¹⁹⁶ Tarmizi Thaher, “Kerukunan Hidup Umat Beragama Dan Studi Agama-Agama Di Indonesia,” in *Studi Agama-Agama Di Perguruan Tinggi, Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 1999), 2–3.

¹⁹⁷ Hidayat, “Lingkup Dan Metodologi Studi Agama-Agama,” 42.

¹⁹⁸ Ismail Raji (ed.) Al-Faruqi, *Trialog Tiga Agama Besar: Yahudi, Kristen, Islam*, I. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), 12.

Kelima, adalah ada kemauan untuk memahami kepercayaan, ritus, dan simbol agama dalam rangka untuk memahami orang lain secara benar. Masing-masing pihak harus mau berusaha melakukan itu agar pemahaman terhadap orang lain tidak hanya di permukaan saja tetapi bisa sampai pada bagiannya yang paling dalam (batin). Dari situlah bisa ditemukan dasar yang sama sehingga dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai, meskipun adanya perbedaan juga menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.¹⁹⁹

Namun demikian, penulis melihat adanya berbagai permasalahan yang dapat menjadi penghambat dialog antar umat beragama. Di antara sesuatu yang dapat menjadi penghambat itu adalah sebagai berikut: (1) terjebak pada perbedaan landasan visi pada hal-hal yang fundamental yang diekspresikan secara keras.²⁰⁰ Misalnya tentang keselamatan, ada banyak orang yang berfikir secara sektarian. Keselamatan dianggap sebagai dominasi dari satu kelompok, sementara kelompok lain tidak selamat. (2) kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama-agama lain secara benar dan seimbang, akibatnya kurang penghargaan dan muncul sikap saling curiga yang berlainan. Hal ini akibat adanya *truth claim*, atau sesuatu yang akan mengakibatkan adanya *truth claim*. Hal ini adalah antitesis dari prasyarat dialog yang mengharuskan adanya saling pemahaman terhadap berbagai macam agama. Jika masing-masing tidak memahami secara benar terhadap agama orang lain maka ini akan menjadi penghambat dialog, karena akan muncul kecurigaan-kecurigaan. (3) Faktor-faktor sosial politik dan trauma akan konflik-konflik dalam sejarah, misalnya Perang Salib atau konflik antar agama yang pernah terjadi di suatu daerah tertentu. (4) Merasa diri paling sempurna sehingga muncul sikap-sikap defensif dan agresif. Orang lain dianggap tidak sempurna dan harus mengikuti apa yang dimau oleh yang menganggap dirinya sempurna itu. (5) Munculnya sekte-sekte keagamaan fundamentalis dan radikal dari masing-masing agama. Ciri khas fundamentalis dan radikal

¹⁹⁹ Sunardi, "Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama," 76.

²⁰⁰ Ligoy CP, "Gereja Indonesia Dan Dialog Antar Agama," 208.

adalah tidak adanya sikap kompromistik. Kebenaran dipandang secara hitam putih. (6) Kesenjangan sosial ekonomi,²⁰¹ (7) Masih adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan kepada orang lain, atau dengan kata lain, kerukunan yang ada hanyalah kerukunan semu. (8) Penafsiran tentang misi atau dakwah yang konfrontatif. (9) Ketegangan politik yang melibatkan kelompok agama.²⁰²

²⁰¹ Ibid., 131.

²⁰² Hasyim, *Toleransi Dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Agama*, 350–351.

BAB V

PERAN AGAMA DI TENGAH PROBLEMATIKA MODERNITAS

Modernitas telah muncul dan menjadi keniscayaan sejarah. Modernitas ditandai oleh kreativitas manusia dalam mencari jalan mengatasi kesulitan hidup di dunia ini. Modernitas telah mulai sejak menjelang akhir abad ke-15, sebagaimana dikemukakan Arnold Toynbee, ketika orang Barat “berterimakasih tidak kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri karena ia telah berhasil mengatasi kungkungan Kristen abad pertengahan”.²⁰³ Selanjutnya, modernitas “mengacu” kepada bentuk kehidupan sosial atau organisasi yang muncul di Eropa pada kira-kira abad ke-17 dan sesudahnya dan yang pada gilirannya menancapkan pengaruhnya ke seluruh dunia.²⁰⁴

Zaman modern ditandai dengan “zaman teknik” (*technical age*) atau teknologi. Dengan tibanya zaman teknologi itu, umat manusia tidak lagi dihadapkan kepada persoalan kulturanya sendiri secara terpisah dan berkembang secara otonomi dari yang lain, tetapi terdorong menuju kepada masyarakat jagad (*global*) yang terdiri dari

²⁰³ Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, 450.

²⁰⁴ Anthony Giddens, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 1.

berbagai bangsa yang erat berhubungan satu sama lain. Penggunaan sepenuhnya teknologi di suatu bagian dunia (Barat) tidak lagi dapat dibatasi pengaruhnya hanya kepada tempat itu sendiri saja, tetapi merambah ke seluruh muka bumi, meliputi seluruh budaya manusia tanpa dapat dihindari sama sekali.²⁰⁵

Ada pandangan bahwa kekuatan utama yang membentuk dunia modern adalah kapitalisme. Tataan sosial modernitas yang baru muncul bersifat *kapitalis* dalam sistem ekonominya dan dalam institusi lainnya. Sementara dalam pandangan Emile Durkheim, bahwa sifat institusi modern terutama pada dampak *industrialisme*. Menurut Durkheim, kompetisi kapitalistis bukan merupakan unsur sentral dalam tataan industrial yang tengah muncul. Karakter kehidupan sosial modern yang begitu cepat berubah pada hakikatnya tidak berasal dari kapitalisme, melainkan dari pembagian kerja yang kompleks, yang menempatkan produksi pada kebutuhan manusia melalui eksploitasi alam secara industrial. Kita hidup bukan dalam tataan kapitalis, melainkan dalam tataan industrial.²⁰⁶

Kapitalisme telah menjadi motor yang menggerakkan bangsa Barat sehingga menjadi bangsa modern. Secara filosofis, kapitalisme adalah kelanjutan dari materialisme, yakni pandangan hidup yang memberi tempat sangat tinggi kepada kenikmatan lahiriyah.²⁰⁷ Kapitalisme adalah sistem produksi komoditas, yang terpusat pada relasi antara kepemilikan modal pribadi dan pekerja upahan yang tidak menguasai hak milik, relasi ini membentuk poros utama sistem kelas. Perusahaan kapitalis bergantung kepada produksi yang ditujukan kepada pasar kompetitif, harga yang menjadi tanda bagi para investor, produsen dan konsumen. Sementara, karakteristik utama *industrialisme* adalah pemakaian sumber-sumber kekuasaan material yang tidak berjiwa dalam produksi barang, yang dipadukan dengan peran sentral mesin dalam proses produksi. Industrialisme

²⁰⁵ Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, 452.

²⁰⁶ Giddens, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*, 14–15.

²⁰⁷ Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, 458.

mengandaikan adanya organisasi sosial produksi yang diatur dalam rangka mengkoordinasikan aktivitas manusia, mesin dan input serta output berupa bahan mentah dan barang. Industrialisme, terlebih lagi, mempengaruhi bukan hanya tempat kerja namun juga transportasi, komunikasi dan kehidupan domestik.²⁰⁸

Selain itu, dalam konteks modernitas ini, sebagaimana pandangan Talcott Parsons, uang adalah salah satu dari beberapa jenis “mediasi sirkulasi” dalam masyarakat modern, begitu juga kekuasaan dan bahasa.²⁰⁹ Kehidupan dunia modern serasa seperti terbang dengan pesawat pencari nafkah. Namun, modernitas ibarat “penampakan yang menakutkan”, karena ia memiliki resiko-resiko. Resiko-resiko modernitas benar-benar menjadi “penampakan yang menakutkan”. Kemungkinan adanya perang nuklir, kerusakan lingkungan, ledakan penduduk yang tak terbendung, runtuhnya transaksi ekonomi global, dan potensi kerusakan global lain memberikan sebuah cakrawala bahaya yang mengerikan bagi semua orang.²¹⁰

Problema yang senantiasa menyertai modernitas adalah problema kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Di balik kemajuan dan optimisme kemakmuran dari modernitas ternyata menyembunyikan wajah yang suram, yaitu kemiskinan yang menyayat hati. Kemiskinan masih banyak dialami oleh umat manusia (baca; umat Islam). Di tengah orang lain yang bergelimangan harta, masih terdapat sekian juta orang hidup kekurangan; makan susah, sekolah susah, apalagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Di tengah kehidupan modern ini juga banyak kejadian memilukan yang terjadi dan dialami oleh umat manusia. Kita masih sering lihat perselisihan (konflik) antara sesama manusia (baik yang seagama maupun yang berbeda agama). Konflik-konflik di Indonesia melibatkan baik orang yang seagama maupun yang berbeda agama. Kekerasan antar kampung, antar ormas, antar pemuda dan lain sebagainya masih

²⁰⁸ Giddens, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*, 74.

²⁰⁹ *Ibid.*, 29.

²¹⁰ *Ibid.*, 165.

mewarnai kehidupan sampai sekarang ini. Pada bulan Agustus 2012, terjadi kerusuhan di Sampang. Kerusuhan juga pernah terjadi pada tahun 2011. Kerusuhan disinyalir terkait dengan perbedaan paham keagamaan. Pada bulan Oktober 2012, Kerusuhan yang bernuansa SARA di Kecamatan Way Panji Lampung Selatan (Lamsel) kian meluas. Bentrokan bukan lagi antara warga Desa Balinuraga dan Desa Sidoreno dengan warga Desa Agom Kalianda, tapi sudah melibatkan beberapa desa di Lamsel termasuk dari kabupaten lain. Pada tanggal 8 Nopember 2012, terjadi kerusuhan di Kampung Kesumadadi (Ibukota Kecamatan Bekri) Kabupaten Lampung Tengah, yang disinyalir karena isu pencurian sapi. Pada bulan Nopember 2012 juga terjadi kerusuhan di daerah Barong Tongkok Kutai Barat Kalimantan Timur. Kerusuhan tersebut bermula dari persoalan kesalahpahaman masalah pembelian BBM. Pada tanggal 22 Januari 2013, terjadi kerusuhan di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Kerusuhan disinyalir persoalan isu perkosaan sehingga korban sampai tewas.

Peristiwa kekerasan, pembunuhan dan perbuatan saling menyakiti juga banyak terjadi dalam skala yang lebih kecil, yang sifatnya pribadi. Seorang ayah membunuh anak, seorang anak membunuh orang tuanya, membunuh keluarganya, membunuh tetangganya, dan lain sebagainya masih sering kita saksikan. Maraknya peredaran dan penggunaan narkoba di kalangan remaja atau bahkan anak-anak, prostitusi, perampokan, penjarahan, mengambil hak-hak orang lain, merusak aset-aset negara atau masyarakat, bahkan sampai melakukan korupsi besar-besaran dan lain sebagainya adalah fenomena yang seakan dianggap lumrah.

Lalu, di mana peran agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di atas. Mengapa agama seolah kehilangan vitalitasnya berada di tengah modernitas? Menghadapi problematika modernitas tersebut, bagaimana mestinya peran diformulasikan, sehingga secara fungsional mampu menjawab krisis manusia modern?

Penulis memiliki suatu keyakinan bahwa Islam, yang bersumber dari Allah SWT yang telah menurunkan wahyu Al-Qur'an dan Nabi Muhammad yang telah diutus oleh Allah SWT menyampaikan

risalah yang diperkuat dengan sunnah-sunnahnya, memiliki ajaran untuk *rahmatan lil alamin*. Sebagai agama *rahmatan lil-alamin*, Islam mengandung ajaran tentang pentingnya membangun kemakmuran dan kesejahteraan (mengatasi masalah kemiskinan), mewujudkan keadilan dalam kehidupan, menciptakan keamanan dan kedamaian dalam interaksi sosial, melestarikan alam semesta untuk mendukung kemajuan, memperjuangkan kesamaan derajat dan kesamaan hak di antara sesama manusia.

Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan nilai-nilai di atas.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah : 8)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ
سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا
لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

“Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hampanan?, dan gunung-gunung sebagai pasak?, dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh, dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari), dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.” (Q.S. An-Naba’ : 6-15)

Namun, dalam perjalanannya, elan vital Islam sebagaimana yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi berjalan seiring dengan perkembangan umat Islam. Faktor keberadaan umat Islam sangat mempengaruhi corak dan warna dari Islam itu sendiri. Islam, yang ditentukan oleh keberadaan umat Islam itu, mengalami pasang surut. Prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam sebenarnya mampu dipakai untuk mengantisipasi berbagai problematika kehidupan modernitas. Untuk itulah dibutuhkan suatu rumusan teologi yang benar-benar mampu memecahkan masalah modernitas.

Di sinilah, perlu melakukan perubahan paradigma pemahaman mengenai teologi yang semula hanya sebagai keyakinan atau terkait dengan Tuhan dan hal-hal yang bersifat eskatologis digeser menjadi ideologi revolusi. Dengan kata lain, sebagaimana dikatakan Hassan Hanafi, perlu pembaharuan dalam pemahaman teologi, yakni transformasi dari keyakinan-keyakinan religius ke dalam ideologi revolusioner untuk mengubah berbagai problematika yang ada

di masyarakat seperti penjajahan, disintegrasi, kapitalisme, dan keterbelakangan.²¹¹

Karena itulah, Islam harus senantiasa dihadapkan dengan realitas, baik realitas sehari-hari maupun realitas ilmiah. Di sini Islam dapat dijadikan sebagai pendekatan atau konsep untuk membaca realitas. Cara kerja seperti ini, oleh Kuntowijoyo, disebut sebagai bergerak dari teks menuju konteks (teks ke konteks) yang pada akhirnya melahirkan konsep “Pengilmuan Islam”.²¹² Oleh Fazlur Rahman, gerakan metodologis dalam memahami Al-Qur’an harus bergerak dalam dua arah, yang biasa disebut *double movement*, yaitu bergerak dari teks ke konteks dan dari konteks ke teks kembali, yang di dalamnya terhadap “ideal moral” dan “legal spesifik”.

Sebagai agama, Islam adalah sebuah sistem. Karena itu agama tidak hanya terbatas pada urusan individual, tetapi juga campur tangan dalam urusan publik. Pandangan agama hanya sebagai urusan individu akan melahirkan pandangan bahwa “agama adalah candu” (Marxisme), dan “agama adalah ilusi” (Freudianisme). Pemikiran manusia dianggap telah menjadi “petunjuk bagi orang yang percaya” menggantikan kedudukan agama yang sebenarnya (Darwinisme, Freudianisme, Pragmatisme, dan sebagainya. Orang-orang “modern” dituntun oleh “agama baru” itu.²¹³

Inilah yang oleh Kuntowijoyo disebut bahwa umat Islam terjebak ke dalam mistik kenyataan. Menurut Kuntowijoyo, setidaknya ada lima macam “mistik” (“misteri”) yang ada pada umat Islam, yaitu mistik metafisik, mistik sosial, mistik etis, mistik penalaran, dan mistik kenyataan. Mistik metafisik ialah hilangnya seseorang “dalam” Tuhan yang disebut *mysticism* atau sufisme, baik sufisme substansi atau sufisme atribut, menyatu dalam arti zat atau menyatu dalam arti kehendak/sifat/akhlak. Mistik sosial ialah hilangnya perorangan dalam

²¹¹ Hassan Hanafi, *Islamologi: Dari Teologi Statis Ke Anarkis* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 8.

²¹² Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Metodologi Dan Etika* (Jakarta: Penerbit Teraju, 1998), 2.

²¹³ Ibid.

satuan yang lebih besar, organisasi, sekte, atau masyarakat. Mistik etis ialah hilangnya daya seseorang menghadapi nasibnya, menyerah pada takdir, atau fatalisme. Mistik penalaran ialah hilangnya nalar (akal) seseorang karena kejadian-kejadian di sekitar tidak masuk dalam akalunya. Mistik kenyataan ialah hilangnya hubungan agama dengan kenyataan, kenyataan sebagai sebuah *konteks*. Yang dihadapi oleh umat Islam sekarang adalah mistik kenyataan. Agama kehilangan kontak dengan kenyataan, dengan realitas, dengan aktualitas, dengan kehidupan. Dengan kata lain, *teks* kehilangan *konteks*. Karena itu perlu demistifikasi. Demistifikasi dimaksudkan sebagai gerakan intelektual untuk menghubungkan kembali *teks* dengan *konteks*, atau *teks menuju konteks*. Supaya antara teks dan konteks ada *korespondensi*, ada kesinambungan. Dengan demistifikasi umat akan mengenal lingkungan dengan lebih baik; baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan simbolis, maupun lingkungan sejarah.²¹⁴

Dengan kata lain, orientasi teologi haruslah menekankan pada praksis daripada teoretisasi hal-hal yang abstrak. Orientasi praksis adalah teologi yang memiliki kemampuan untuk membebaskan (liberatif) dan menyangkut interaksi dialektis antara “apa yang ada” (*is*) dan “apa yang seharusnya” (*ought*).²¹⁵ Orientasi praksis Islam dapat dilihat ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur’an, seperti Surat An-Nisa’ ayat 95-96.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٥٩) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٦٩)

²¹⁴ Ibid., 5–10.

²¹⁵ Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, 8.

Artinya: “Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk^[340] satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar (yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (٥٧)

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: «Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!..»

Di sinilah perlu pergeseran pemahaman bahwa wilayah berjuang di jalan Allah itu adalah untuk membela kepentingan orang yang tertindas dan lemah. Ruang lingkup pembelaan tersebut meliputi masalah sosial-ekonomi dan juga masalah psiko-sosial, terutama menyoroti struktur sosial yang menindas dan keharusan untuk mengubahnya menjadi struktur yang lebih adil. Terkait dengan masalah ini, sebagaimana dinyatakan Asghar Ali Engineer, bahwa jika agama secara serius dianggap sebagai kebaikan dan berdiri sepihak dengan revolusi, kemajuan dan perubahan, maka agama harus dilepaskan dari aspek-aspek teologis yang bersifat filosofis (atau hal-hal yang abstrak) yang bukannya mendukung kaum yang tertindas, namun justru mendukung kelompok penindas. Ia menawarkan apa yang disebut dengan “teologi pembebasan” (*the theology of liberation*). Agama tidak boleh hanya berhenti sampai pada urusan akhirat, namun juga tidak boleh semata-

mata berurusan dengan masalah duniawi; agama harus dapat menjaga relevansinya. Historisitas dan kontemporeritas agama di satu pihak, dan urusan duniawi dan akhirat di pihak lain, harus disatukan sehingga menjadi sebuah agama yang hidup dan dinamis. Agama harus menjadi sumber motivasi bagi kaum tertindas untuk merubah keadaan mereka, dan menjadi kekuatan spiritual untuk mengkomunikasikan dirinya secara berarti dengan dan memahami aspek-aspek spiritual yang lebih tinggi dari realitas ini.”²¹⁶

Karena itulah, perlu mengembangkan struktur sosial yang membebaskan dari segala macam perbudakan. Di sini tauhid, sebagai inti dari teologi Islam, harus dilihat dari perspektif sosial. Tauhid harus ditafsirkan bukan hanya sebagai keesaan Tuhan, sebagaimana teologi klasik, tetapi juga sebagai kesatuan manusia (*unity of mankind*) yang tidak akan benar-benar terwujud tanpa terciptanya masyarakat tanpa kelas (*classless society*). Konsep tauhid seperti itu mendorong terciptanya keadilan dan kebajikan (*al-'adl wa al'ahsan*). Ketika dunia terbelah menjadi negara berkembang dan kelas yang menindas (negara maju), maka kesatuan manusia yang sebenarnya tidak mungkin dicapai. Karena itu, tauhid harus mampu menciptakan struktur yang bebas eksploitatif.²¹⁷

Struktur sosial yang membebaskan tentu saja menentang konsep superioritas ras, kesukuan, kebangsaan atau keluarga. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an. "Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui." (QS. Al-Hujurat : 13). Ayat ini secara jelas membantah semua konsep superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan atau keluarga, dengan satu penegasan dan seruan akan pentingnya kesalehan. Kesalehan yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukan hanya

²¹⁶ Ibid., 32.

²¹⁷ Ibid., 14.

kesalahan ritual, namun juga kesalahan social, “Berbuatlah adil, karena itu lebih dekat kepada taqwa.”

Islam sangat menekankan pada keadilan di semua aspek kehidupan. Dan keadilan ini tidak akan tercipta tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan marginal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada mereka untuk menjadi pemimpin. Al-Qur’an tidak ragu-ragu untuk mempercayakan kepemimpinan seluruh dunia kepada mustad’afin, yakni kaum yang lemah. Menurut Al-Qur’an, mereka itu adalah pemimpin dan pewaris dunia. Al-Qur’an juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas. “Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang yang tertindas, laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berkata, “Tuhan kami! Keluarkanlah kami dari kota ini yang penduduknya berbuat zalim. Berilah kami perlindungan dan pertolongan dari-Mu”²¹⁸

Dengan bahasa lain, sebagaimana tawaran Muslim Abdurrahman, bahwa prospek Islam di Indonesia adalah perlu mengembangkan pandangan “Islam Transformatif”. Islam Transformatif berbeda dengan model kesalahan-kesalahan simbolis, termasuk proyek sosial karikatif bagi kaum mustad’afin. Islam Transformatif adalah konsep Islam yang lebih berimplikasi sosial yang secara transformatif sehingga dapat mengubah realitas sosial yang lebih manusiawi.²¹⁹ Islam tidak boleh menjadi alat legitimasi sekelompok penguasa sumber-sumber ekonomi dan politik. Islam harus dapat menampilkan kesalahan yang berpihak untuk menentang semua proses dehumanisasi.²²⁰

Dengan bahasa lain, konsep Islam yang perlu dikembangkan adalah Islam yang emansipatoris atau Islam yang dapat membebaskan. Hal ini sebagaimana yang diperjuangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid dan Masdar F. Mas’udi. Perspektif dasar model Islam emansipatoris ini tidak bisa lepas dari sejarah teori kritis, sehingga disebut Islam Kritis.

²¹⁸ Ibid., 8.

²¹⁹ Abdurrahman, *Islam Transformatif*, 9.

²²⁰ Moeslim Abdurrahman, *Islam Yang Memihak* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 7.

Kritisisme ada dua elemen. Pertama, realitas material, sebuah pemikiran yang mempertanyakan ideologi hegemonik yang bertolak pada kehidupan riil dan materiil atau mempertanyakan hegemoni bertolak pada realitas empirik. Kedua, visi transformatif, memiliki komitmen pada perubahan struktur (relasi-relasi), baik relasi kekuasaan dalam dunia produktif (majikan-buruh), maupun relasi hegemonik dalam hubungan pemberi dan penerima narasi (ulama-umat), maupun relasi politik (penguasa-rakyat).²²¹

Sementara itu, Kuntowijyo memperkenalkan istilah Ilmu Sosial Profetik untuk menjelaskan visi keislaman yang membebaskan. Ilmu Sosial Profetik atau biasa disingkat ISP adalah salah satu gagasan penting Kuntowijoyo. Baginya, ilmu sosial tidak boleh berpuas diri dalam usaha untuk menjelaskan atau memahami realitas dan kemudian memaafkannya begitu saja tapi lebih dari itu, ilmu sosial harus juga mengemban tugas transformasi menuju cita-cita yang diidealkan masyarakatnya. Ia kemudian merumuskan tiga nilai dasar sebagai pijakan ilmu sosial profetik berdasarkan QS. Ali Imran 110. Melalui ayat ini Kuntowijoyo meletakkan tiga pilar bagi Ilmu Sosial Profetik yaitu humanisasi (*ta'muruna bil-ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*). Ketiga pilar inilah yang kemudian dipakai sebagai landasan untuk mengembangkan ISP, serta menjadi ciri paradigmatismenya. Penekanan Kuntowijoyo, bahwa transendensi harus menjadi dasar dari dua unsur yang lain menunjukkan perhatian Kunto terhadap signifikansi agama dalam proses theory building dalam ilmu sosial. Melalui transendensi, ISP hendak menjadikan nilai-nilai agama sebagai bagian penting dalam proses membangun peradaban.²²²

²²¹ Masdar F. Mas'udi, "Paradigma Dan Metodologi Islam Emansipatoris," in *Islam Emansipatoris: Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan* (Jakarta: P3M, 2004), xvii.

²²² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998).

BAB VI

URGENSI HAM DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

Pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bagi umat beragama sangat dibutuhkan sebagai pijakan untuk mengembangkan kehidupan beragama yang rukun dan damai. HAM adalah sebuah konsep universal. Dengan tidak memperdebatkan lebih jauh siapa yang memperkenalkan konsep HAM, mengupayakan penghargaan dan penegakan hak-hak asasi manusia sebagai tujuan etis yang hendak dicapai merupakan perkara prinsip yang mendasar. Hal ini disebabkan, paling tidak, semua manusia punya hak akan harga-diri dan kebebasan. Penindasan adalah pelecehan besar-besaran terhadap Tuhan dan manusia. Alquran mendeskripsikan para penindas sebagai perusak bumi dan juga menggambarkan penindasan sebagai sebetulnya penghinaan terhadap Tuhan. Semua manusia berhak atas harga-diri. Ayat Alquran Q.S. Al-Isra (17) ayat 70, menyatakan bahwa Tuhan telah menganugerahkan harga-diri pada setiap manusia. Dalam hal ini, kebebasan dan pilihan adalah komponen esensial yang “membentuk harga-diri manusia.”²²³

²²³ El-Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*, 221.

Di sisi lain, ketika manusia dibelenggu, dipenjara, ditindas, atau dicampakkan, mereka merasa bahwa harga-diri mereka sangat diruntuhkan. Despotisme dan kekerasan oleh Negara merupakan di antara bentuk pelanggaran kebebasan itu. Penindasan memungkinkan negara merampas harga-diri manusia tanpa ada sedikit perlawanan dari individu-individu itu terhadap negara. Alquran secara tegas mengutuk praktik despotisme dan penggunaan kekuasaan secara sembarangan. Untuk menghadapi masalah itu, Alquran menganjurkan umat Islam untuk memberikan perlawanan atau, bila tak sanggup melakukannya meninggalkan wilayah opresif itu dan berhijrah ke negara-negara yang lebih adil dan menjunjung tinggi nilai kesederajatan. Ayat Alqur'an Q.S. an-Nisa' (4) ayat 97 menyatakan bahwa umat Islam yang diam saja dan tetap tinggal di wilayah sarat despotisme serta rela dan tunduk di hadapan penindasan sama artinya berlaku tidak adil dan jahat terhadap diri mereka sendiri.

Oleh Khaled M. Abou el-Fadl, pengalaman umat Islam dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana dapat digambarkan dari peristiwa yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khaththab:

Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, 'Umar ibn al-Khaththab, khalifah kedua dan Sahabat dekat Nabi, menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi bebas. 'Umar menasihati salah seorang gubernurnya dengan mengatakan bahwa ketidakadilan bisa menjadi sebuah bentuk perbudakan dan penaklukan, dan secara retorik Umar mengajukan pertanyaan kepada gubernurnya itu: siapa yang punya hak untuk menindas orang ketika Tuhan telah menciptakannya dengan kondisi bebas?²²⁴

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kebebasan adalah hak alamiah bagi semua manusia, dan bahwa merampas kebebasan manusia sama dengan menundukkan dan memperbudak mereka. Ketundukan kepada Tuhan hanya bisa bermakna jika manusia bebas untuk tunduk atau tidak tunduk. Tanpa kebebasan memilih, ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan menjadi sungguh-sungguh tak berarti

²²⁴ Ibid., 222.

apa-apa. Pilihan (kebebasan) adalah anugerah Tuhan, dan anugerah ini merupakan elemen kunci dari kemampuan untuk berserah di hadapan Tuhan dan karena itu, ia juga berarti kebebasan untuk menegakkan nilai-nilai kebertuhanan atau menolak melakukannya. Diperbudak dan ditundukkan oleh manusia pada dasarnya tidak selaras dengan kewajiban untuk tunduk kepada Tuhan tanpa syarat.²²⁵

Ayat Alqur'an Q.S. Ali Imran (2) ayat 64. juga memerintahkan umat Islam dan kaum nonmuslim untuk menciptakan sebuah konsensus di antara mereka untuk menyembah Tuhan semata dan tidak rnenperlakukan satu sama lain sebagai tuhan. Ayat ini menunjukkan prinsip mendasar dan krusial yaitu : manusia semestinya tidak mendominasi satu sama lain. Satu-satunya ketundukan yang bernilai etis adalah ketundukan kepada Tuhan, sedangkan ketundukan manusia di hadapan manusia lain tak lain adalah sebertuk penindasan.

Menurut Khaled, menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam Islam ini dapat merujuk pada gagasan tentang *haqq* di dalam Islam. Memahami gagasan ini akan membantu menjelaskan bahwa ide tentang hak asasi manusia sebenarnya berakar dengan baik di dalam hukum dan teologi Islam. Khaled menjelaskan :

Haqq punya dua makna: ia berarti hak, dan juga bisa berarti kebenaran. Menurut teori tentang *haqq* dalam hukum Islam, baik Tuhan maupun manusia memiliki seperangkat haknya masing-masing. Penting untuk dicatat, bila seseorang memiliki sebuah hak, orang itu mempunyai hak tersebut di hadapan *siapa pun* yang melanggar atau mengancam hak tersebut. Pada prinsipnya, hak tersebut sangat dikukuhkan dan bahkan negara tidak diperbolehkan membatalkan atau menghilangkannya. Bahkan Tuhan tidak akan mencabut sebuah hak yang dimiliki oleh seseorang kecuali jika orang yang memiliki hak tersebut memutuskan untuk membatalkannya—dengan kata lain, kecuali jika seseorang membatalkan atau melepaskan hanya, tak seorang pun bisa secara sah menyangkal hak seseorang itu. Arti dari prinsip-prinsip hukum ini adalah bahwa menurut hukum Islam, hak seseorang, apa pun hak itu, sangat suci, dan pemilik hak tersebut

²²⁵ Ibid., 223.

mempunyai kekebalan atau kebebasan yang tak bisa diremehkan atau dilanggar, bahkan oleh negara sekalipun.²²⁶

Seperti Khaled, Arkoun juga menjelaskan bahwa selama ini, istilah *al-haqq* yang terdapat dalam Al-Qur'an hanya diberlakukan hanya bagi hak-hak Tuhan, *huquq allah*. Dengan menghormati hak-hak Allah sebenarnya seseorang meletakkan dirinya dalam hak-hak sendiri. Dalam bahasa Arab, perubahan dari *haqq* bentuk tunggal ke *huquq* jamak berarti desakralisasi hak yang diambil dari kekuatan agama dari *al-haqq* dan dikenakan kepada hal-hal yang tidak pasti, profan, dan hak-hak individu.²²⁷

Pemikiran Islam selalu mencakup diskursus tentang hak-hak Tuhan dan hak-hak manusia (*huquq allah/huquq adami*); yang pertama mempunyai keunggulan dan prioritas di atas yang kedua. Itulah sebabnya mengapa pemikiran tradisional mengatakan bahwa setiap orang beriman harus melaksanakan lima kewajiban hukum (rukun Islam) : penegasan keimanan (shahada), shalat, zakat, berpuasa pada Bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji di Mekkah. Karena berdasarkan ketaatan maka keimanan menginternalisasi ide tentang hak-hak Tuhan. Ketika manusia diperintah untuk mematuhi hak-hak Allah, maka ia menemukan diri mereka dibatasi untuk menghidupkan hubungan yang sempurna antara hak-hak Tuhan dan hak-hak manusia. Dengan kata lain, penghargaan pada hak azasi manusia adalah satu aspek sebagai upaya menghormati hak-hak Tuhan.²²⁸

Doktrin-doktrin ini sangat penting untuk membangun pijakan bagi gagasan tentang hak asasi manusia di dalam Islam. Tuhan dan manusia sama-sama memiliki hak. Akan tetapi, hak-hak Tuhan akan ditegakkan di Hari Akhir oleh-Nya, sementara itu hak-hak individu atau manusia harus dijaga dan ditegakkan oleh manusia di muka bumi. Pada praktiknya, Tuhan akan peduli dengan hak-hak-Nya di Hari Akhir, tetapi manusia harus peduli dengan hak-hak mereka di muka

²²⁶ Ibid., 223–224.

²²⁷ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam* (English: Westview Press, 1994), 107.

²²⁸ Ibid., 108.

bumi, dengan mengakui hak asasi manusia dan melindungi kesucian hak-hak tersebut.²²⁹

Konsep tentang keadilan adalah bagian terpenting dalam menjelaskan hak asasi manusia. Tradisi Islam meletakkan keadilan sebagai kewajiban Islam. Bahkan, ada prinsip bahwa di mata Tuhan, masyarakat non muslim yang adil lebih baik nilainya dibandingkan masyarakat muslim yang tidak adil. Alasan prinsip ini adalah bahwa ketundukan sejati kepada Tuhan adalah mustahil adanya bila ketidakadilan merambah di mana-mana di tengah-tengah masyarakat. Jika ketidakadilan mewabah di dalam sebuah masyarakat, situasi ini akan menyebabkan tersebarnya sifat dan karakter yang tidak selaras dengan kemampuan untuk tunduk kepada Tuhan, termasuk di dalamnya adalah ketakutan, kecemasan, dan tidak adanya ketenangan. Ketakutan akan mengakibatkan adanya ketidakjujuran dan kemunafikan karena orang harus berbohong dan menyembunyikan keyakinan dan sikap jujur mereka supaya tetap bisa hidup. Ketakutan juga mengakibatkan adanya ketidakamanan dan oportunistik karena orang menganggap bahwa tidak ada korelasi antara tindakan dan akibat. Ketakutan juga mengakibatkan penderitaan karena orang pada akhirnya dirampas hak-haknya.²³⁰

Dengan landasan keadilan akan memberikan hak kepada setiap orang. Keadilan yang sempurna berarti mencapai keseimbangan yang juga sempurna antara kewajiban dan hak. Alquran dan hadis Nabi telah menegaskan bahwa manusia punya hak atas pemerolehan hak-hak dan perlindungan di dalam hidup. Di dalam rumusan tradisi yurisprudensi Islam klasik bahkan telah disusun tentang skema hak asasi manusia yang dapat disebut sebagai “hak-hak dasar “ yang ada pada diri manusia, yaitu kehidupan (nyawa), kemampuan untuk berpikir dan berefleksi (akal), hak untuk menikah, mempunyai keturunan dan membesarkannya (keturunan), hak untuk memeluk dan menjalankan

²²⁹ El-Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*, 224.

²³⁰ *Ibid.*, 225.

agama, dan hak untuk memiliki harta dan tidak memiliki harta yang diambil tidak dengan cara yang jujur dan adil (harta).

Jadi lima hal itu adalah “agama, nyawa, akal, keturunan dan harta,²³¹ sebagaimana dikemukakan As-Syatibi dalam kitabnya “Al-Muwafaqat” yang menyebutnya dengan istilah “al-mabadi’ al-khamsah” yang meliputi : *hifdu ad-din* (menjaga agama), *hifdu an-nafsi* (menjaga nyawa), *hifdu al-aqli* (menjaga akal), *hifdu an-nasali* (menjaga keturunan), dan *hifdu al-mal* (menjaga harta).

Kategori-kategori di atas merupakan lima *hak* dasar manusia meskipun hak-hak itu bukan merupakan daftar lengkap dan utuh dari semua yang berhubungan dengan manusia. Lima hak itu lebih mencerminkan hak dasar, dan bukan hak selengkapnya, yang layak diakui sebagai milik manusia. Lima hak itu bukanlah hasil akhir dari pemikiran tentang hak-hak manusia; lima hak itu baru semacam titik tolak.²³²

Inilah yang oleh Abdullahi Ahmed An-Naim disebutkan bahwa hak asasi manusia didasarkan pada dua kekuatan utama yang memotivasi seluruh tingkah laku manusia, kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas. Melalui kehendak untuk hidup, umat manusia selalu berusaha keras untuk menjamin kebutuhan makan, perumahan, kesehatan, dan apa saja yang berkaitan dengan pemeliharaan hidup. Selain itu, orang senantiasa berusaha keras untuk memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui pembangunan dan penggunaan sumberdaya yang ada, serta melalui perjuangan politik untuk mencapai distribusi kesejahteraan dan kekuasaan dengan adil dan jujur di antara anggota komunitas tertentu. Sementara, hak untuk bebas merupakan kekuatan yang menggerakkan di balik pencarian kesejahteraan dan kemuliaan spiritual, moral dan seni.²³³

²³¹ Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif* (Jakarta: Serambi, 2003), 227.

²³² El-Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*, 227.

²³³ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 1996), 313–314.

Untuk mengetahui bagaimana konsep hak asasi manusia dipahami dalam pemikiran muslim kontemporer, maka perlu dirunut berbagai istilah atau terminologi yang dipakai oleh para sarjana klasik dan bagaimana hal itu dipahami sekarang. Sebagaimana dijabarkan Khaled, para sarjana klasik mengklasifikasi isu-isu yang terkait dengan hak-hak dasar ke dalam kategori *dharuriyyat* (kemendesakan yang mendasar), *hajiyyat* (kebutuhan mendasar), dan *tahsiniyyat* (kemewahan atau pemerindah):

- *Dharuriyyat* terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial bagi kelangsungan dan perlindungan kepentingan atau hak-hak di atas. *Dharuriyyat* adalah segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan menjadikan kepentingan atau hak-hak di atas tidak bisa terlindungi sama sekali.
- *Hajiyyat* berada sedikit di bawah level *dharuriyyat*. *Hajiyyat* atau kebutuhan adalah segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan kepentingan atau hak yang dimaksud, tetapi tidak sedemikian darurat. Tak seperti *dharuriyyat*, jika *hajiyyat* tidak terpenuhi, maka kepentingan atau hak tersebut masih bisa terlindungi, meskipun sangat melemah.
- *Tahsiniyyat* adalah hal-hal yang tidak mendesak dan tidak juga sangat penting bagi perlindungan kepentingan atau hak. Sebaliknya, jika terpenuhi, *tahsiniyyat* akan menyempurnakan dijalankannya kepentingan atau hak tersebut.²³⁴

Contoh konkrit dari ketiga kategori tersebut misalnya : larangan membunuh adalah sebuah *dharuriyyat* demi melindungi hak untuk hidup. Pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang menjamin agar seseorang bisa cukup makan dan minum, dan juga punya tempat tinggal yang layak untuk hidup adalah sebuah *dharuriyyat* untuk memelihara kehidupan. Memberikan perawatan kesehatan yang memadai, pendidikan dasar dan menengah, busana, atau pekerjaan, bisa dipandang sebagai *hajiyyat*. Memberikan sarana untuk pendidikan

²³⁴ El-Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*, 227.

tinggi, transportasi, bimbingan psikologis pribadi, atau hak berlibur, bisa dianggap sebagai *tahsiniyyat*.

Secara prinsip, dengan kategori di atas dapat dibedakan antara hal-hal yang harus dijamin pemenuhannya bagi orang sebab hal tersebut sangat esensial dan menjadi sendi kehidupan yang sehat, terhormat, dan bermartabat, dan hal-hal yang kurang esensial. Apa yang semestinya dipandang sebagai *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* memang tergantung pada setiap generasi muslim untuk mengeksplorasi dan menentukannya, *sesuai dengan tuntutan lingkungan yang bergeser dan waktu yang berubah*. Oleh karena itu, dirasa tidak bijak jika seseorang menyusun daftar khusus kemendesakan, kebutuhan, dan kemewahan yang tak lentur dan bersifat konstan serta tak berubah.²³⁵

Menurut Khaled, dalam sumber-sumber klasik, terdapat perdebatan luas mengenai apa yang seyogianya dibutuhkan bagi perlindungan terbaik atas lima hak-hak dasar—agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Sayangnya, semua perdebatan ini sudah terlupakan di era modern ini. Sesungguhnya, sejumlah besar pemerintah di negara-negara muslim kini mengabaikan *dharuriyyat* dan *hajiyyat* warga yang mereka perintah. Misalnya, terjadi begitu banyak eksekusi mati secara semena-mena oleh pemerintah Saudi, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap kepentingan pertama manusia— yaitu, kepentingan untuk melindungi kehidupan. Lebih jauh lagi, penangkapan dan penyiksaan massal yang sewenang-wenang di negara-negara muslim tak bisa disangkal lagi adalah pelanggaran terhadap kehidupan dan akal, serta mungkin juga nama baik.

Kategori-kategori di atas adalah gambaran mengenai apa saja yang mendesak untuk diperjuangkan oleh manusia, dan juga apa yang boleh jadi bukan sebuah kemendesakan dalam hidup tetapi akan tetap dipandang cukup penting untuk berposisi sebagai kebutuhan atau kemewahan. Karena itulah, perdebatan klasik mengenai *dharuriyyat* dan *hajiyyat* kiranya dapat diterjemahkan di era modern menjadi perdebatan tentang hak-hak yang bisa melindungi kepentingan

²³⁵ Ibid., 228.

individu. Nilai-nilai yang lahir dari tradisi klasik, seperti harga-diri, kebebasan, lima hak-hak dasar, dan diskursus tentang penaklukan dan penindasan, bisa diterjemahkan menjadi sebuah kompilasi hak-hak asasi manusia yang koheren bagi era modern yang hadir secara natural dari khazanah warisan Islam. Hak-hak ini akan menopang prinsip-prinsip demokrasi di dalam Islam di era modern ini.²³⁶

²³⁶ Ibid., 229–230.

BAB VII

EPILOG

Kemajemukan etnis dan agama adalah fakta yang ada di Indonesia. Sejak Negara kesatuan Republik Indonesia diproklamkan, Indonesia telah berdiri dan dibangun di atas kemajemukan. Pancasila dan UUD 1945 adalah wujud kompromi dari kemajemukan yang ada; kemajemukan agama, etnis, bahasa, kultur dan sebagainya.

Adanya kemajemukan, ditambah faktor politik, kesenjangan ekonomi dan tidak adanya saling pengertian terhadap watak dan kultur masing-masing memberi peluang terjadinya konflik dan benturan. Selama setengah abad lebih, beberapa konflik dan benturan akibat kemajemukan juga telah terjadi di Indonesia. Konflik etnis, agama atau konflik sosial lainnya telah mewarnai perjalanan hidup bangsa Indonesia.

Kasus Maluku, Sambas, Sampit dan juga tempat-tempat lain yang pernah terjadi adalah contoh adanya konflik-konflik sosial tersebut. Ancaman terjadinya peristiwa yang sama menjadi sesuatu yang susah dielakkan, baik di daerah yang semula sudah ada konflik maupun daerah yang belum ada konflik.

Pengalaman konflik adalah pengalaman yang memilukan bagi bangsa Indonesia. Banyak orang melupakan makna “Bhineka

Tunggal Ika” sebagai soko guru bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat yang beragam. Banyak orang terlalu asyik dengan euforia kebebasan yang berekses mengentalnya perasaan etnisitas dan kesukuan. Disamping itu, pernah ada kelatahan masyarakat dalam memaknai otonomi daerah yang dianggap sebagai terlepas dari ikatan-ikatan nasionalisme. Padahal, nasionalisme adalah sesuatu yang sudah terbangun sejak lama.

Dalam konteks agama, masalahnya sangat rumit, karena ada indikasi bahwa agama ditarik sedemikian rupa ke dalam wilayah konflik politik. Agama dijadikan alat justifikasi suatu perilaku politik tertentu. Akibatnya agama seakan-akan menjadi pemicu konflik sehingga umat beragama berhadapan-hadapan demi kepentingan politik tertentu, bukan kepentingan agama. Akibat lebih jauh, konflik sosial yang sudah terjadi dan potensi-potensinya telah menyeret agama selalu di bawah bayang-bayangannya.

Masalah ancaman potensi konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah merupakan pekerjaan rumah yang harus dicarikan jalan pemecahannya secara terus menerus. Usaha untuk menjaga dan merawat kerukunan tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena persoalannya sudah sedemikian dinamis dan harus diselesaikan secara komprehensif. Jika tidak, maka “api dalam sekam” itu bisa meledak sewaktu-waktu. Kesadaran dari pihak-pihak untuk menjaga ini semua menjadi faktor yang paling menentukan. Berbai pihak harus memiliki kesepahaman yang sama bagaimana menyelesaikan persoalan perbedaan-perbedaan yang barangkali muncul sewaktu-waktu.

Untuk mengeliminir ekses-ekses negatif dari perbedaan-perbedaan yang ada perlu ditumbuhkan saling pengertian antar sesama bangsa. Di sinilah perlu dikembangkan budaya dialog; dialog antar agama, dialog antar etnis, dan dialog antar pembatas budaya lainnya. Hal ini sekaligus untuk menumbuhkan pemahaman bahwa perbedaan adalah realitas yang bukan berarti harus bermusuhan.

Selain itu, kearifan-kearifan lokal tidak boleh diabaikan. Banyak kasus menunjukkan bahwa kearifan lokal menjadi faktor penentu

dalam menyelesaikan konflik agama. Faktor kearifan lokal inilah yang juga pernah didengungkan oleh masyarakat Maluku agar mereka yang bertikai kembali kepada adat Pela Gandong.

Satu peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia tidak cukup hanya dicermati dengan satu pendekatan tetapi memerlukan banyak pendekatan. Kasus-kasus konflik tidak cukup hanya dilihat dengan pendekatan etnis, tetapi juga harus dilihat dengan pendekatan politis, ekonomis, kultural dan juga agama. Tetapi, yang pasti biasanya ada satu pemicu utama dari kasus tersebut, ini yang harus selalu diantisipasi.

Untuk mewujudkan tatanan sosial yang damai, demokratis, berkeadilan, berkebebasan dan berperadaban, diperlukan kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak. Kita semua dituntut untuk bahu-membahu membangun bangsa ini. Setiap komponen bangsa ini selalu dituntut merajut kebersamaan yang kuat, karena membangun bangsa ini bukan hanya tanggung jawab perorangan tetapi tanggung jawab kita semua, apapun status dan identitas kita.

Sebagai usaha jangka panjang dan investasi untuk masa yang akan datang, masalah pendidikan agama bagi anak-anak merupakan sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat. Ada banyak keluhan bahwa sampai sekarang ini masih banyak pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak didik belum dilengkapi dengan sensitif pluralisme. Pendidikan agama untuk anak-anak masih diwarnai oleh penanaman sisi teologis yang seringkali mempertentangkan secara tajam antara umat agama yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, anak didik sudah dimasuki “virus” sentimen, anti-toleransi dan anti-pluralisme.

Hal itu adalah masalah yang ada dalam masing-masing agama, karena masing-masing memiliki asumsi bahwa penanaman nilai-nilai agama yang paling efektif adalah ketika usia kanak-kanak. Demikian juga, dialog yang paling efektif sesungguhnya juga ketika dapat dilakukan sejak usia kanak-kanak.

Pemahaman tentang sensitif pluralisme pada gilirannya akan sangat membantu untuk mengembangkan suatu dialog antar umat beragama. Secara tidak langsung penanaman sensitif pluralisme merupakan suatu

bentuk pendidikan dialog yang telah dilakukan sejak dini, yakni sejak masa anak-anak. Sehingga, penanaman sikap kepada anak-anak untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain adalah modal utama untuk masa selanjutnya.

Jika umat beragama mengangankan kedamaian sejati antar umat manusia, tidak ada pertikaian antar agama dan peristiwa sejenisnya, maka harus diakui bahwa investasi dialog sejak masa kanak-kanak adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dalam hal ini, berbagai cara bisa dilakukan, baik melalui ucapan, perilaku maupun pemikiran-pemikiran untuk memberi pengetahuan dasar tentang agama atau keyakinan orang lain.

Karena itulah institusi pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan budaya dialog sejak dini. Melalui institusi pendidikan ini materi-materi seperti yang dicontohkan beberapa ayat Alquran atau kitab suci lain tentang toleransi, kebebasan beragama, tolong menolong, saling menghormati dan saling bertukar pikiran kepada penganut agama lain dapat ditanamkan secara efektif dan terarah. Materi-materi itulah yang sebenarnya dikandung dalam peraturan perundangan-undangan tentang kerukunan hidup umat beragama yang sudah diatur di negara Indonesia ini.²³⁷ Harus diakui bahwa institusi pendidikan memegang peran strategis dalam membangun kehidupan antar umat manusia yang beradab dan saling menghormati keanekaragaman agama. Institusi pendidikan mestinya tidak dilakukan untuk menanamkan perasaan superioritas-inferioritas agama, menanamkan kebencian dan sikap-sikap antipati lainnya.

Di tengah banyak orang sudah terbiasa melihat dunia hanya dari perspektif agama mereka secara spesifik, sehingga memunculkan Kristensentris, Islamsentris atau lainnya, maka kebutuhan untuk belajar lebih banyak tentang agama orang lain adalah sangat penting. Kita perlu mengembangkan kesadaran konstruktif mengenai “agama-agama lain”. Selain itu, diskusi dan sikap menerima terhadap masyarakat yang

²³⁷ Nuhriison, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, 7–14.

pluralistik menjadi sesuatu yang sangat menentukan pada masa-masa mendatang.

Dengan kata lain, kita harus menyadari adanya perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan memang merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Artinya, tidak ada yang berhak menghakimi atas suatu kebenaran atau tidak ada “truth claim” dari salah satu pihak. Masing-masing pihak diperlakukan secara sama dan setara dalam memperbincangkan tentang kebenaran agamanya.²³⁸

Perlu disadari bersama bahwa umat beragama secara universal menemui tantangan-tantangan kemanusiaan yang sama. Umat beragama memiliki puncak-puncak keprihatinan yang sama. Tantangan teknologi-industri dengan berbagai implikasinya, tantangan kerusakan lingkungan hidup, masalah kemiskinan, harkat kemanusiaan (human dignity) dan hak asasi manusia telah menghadang di depan mata. Tantangan tersebut bersifat universal, tanpa pandang “bulu” agama apa yang dipeluknya. Selain itu, umat beragama juga dihadapkan pada tantangan bersama yang sangat kompleks; tantangan ketidakadilan, kekerasan, konflik, kerusuhan, dan berbagai peristiwa yang merugikan kehidupan manusia secara umum.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perdamaian abadi umat beragama, maka seluruh penganut agama-agama seharusnya tersentuh “religiuitas”nya sehingga dapat memunculkan dimensi spiritualitas keberagamaan yang lebih terasa menentramkan dan menyejukkan. Pemahaman tentang sensitif pluralisme pada gilirannya akan sangat membantu untuk mengembangkan suatu hubungan antar umat beragama yang kondusif. Penanaman sensitif pluralisme perlu dipupuk secara terus-menerus.

Membangun Moderasi Beragama

Suatu hal penting yang selalu menarik direnungkan oleh umat beragama di Indonesia adalah (1) bagaimana mempraktekkan

²³⁸ Thaher, “Kerukunan Hidup Umat Beragama Dan Studi Agama-Agama Di Indonesia,” 2-3.

kehidupan beragama sesuai dengan agama masing-masing yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (2) bagaimana mempraktekkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip kehidupan beragama sesuai dengan agama masing-masing. Dengan kata lain bagaimana mengintegrasikan antara keberagaman dan keindonesiaan, bagaimana antara keberagaman dan keindonesiaan bisa saling menguatkan. Dari sinilah diskusi mengenai bagaimana membangun moderasi beragama dan revolusi mental penting untuk dilakukan.

Moderasi beragama adalah cara beragama dengan mengembangkan pemikiran dan sikap keberagaman yang bersifat moderat dan tidak ekstrem. Istilah moderasi beragama banyak dikemukakan oleh mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Mengenai pemaknaan moderasi ini Lukman Hakim mengelaborasi secara panjang lebar dalam Pidato Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019. Menurut Lukman Hakim, kata moderasi mengandung dua makna yaitu, memandu/mengatur/menengahi serta pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Kedua makna itu mirip dan sama-sama aplikatif, menjalankan fungsi kontrol. Memoderasi artinya mengendalikan sesuatu agar tidak kebablasan, menarik hal yang keterlaluan agar berada di jalur yang tepat, dan mengepaskan hal ihwal untuk mencapai keseimbangan dengan berupaya menghadirkan jalan tengah bagi konservatisme versus liberalisme. Hal ini mengacu kepada pengertian moderasi secara bahasa yang berasal dari Bahasa Latin moderatio, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata moderasi juga berarti “penguasaan diri” (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Hal ini sesuai dengan arti moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyediakan dua pengertian kata ‘moderasi’, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman.

Lukman Hakim menegaskan bahwa dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan

yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jelas, moderasi sangat erat terkait dengan toleransi. Toleransi adalah kemauan dan kemampuan untuk bersedia menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain. Kesediaan seperti itu sama sekali tidak berarti mengganggu, mengurangi, atau bahkan menghilangkan keyakinan prinsipil pada diri kita. Justru agama mengajarkan agar setiap kita bersedia menghormati dan menghargai perbedaan keimanan atau keyakinan yang ada pada pihak lain. Berkeyakinan adalah hak setiap manusia yang karenanya wajib dijaga bersama. Kita memiliki ajaran 'tenggang rasa', suatu warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk mau dan mampu ikut merasakan apa yang dirasakan pihak lain yang berbeda dengan kita. Suatu nilai kearifan lokal yang bersumber dari ajaran agama. (Pidato Menteri Agama dalam Rakernas Tahun 2019).

Menurut Lukman Hakim, moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem. Ia mengamati bahwa dalam memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal/nalar, Apa yang tertulis di teks itu disimpulkan, dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Jadi betul-betul bertumpu kepada teks saja. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Liberalisme, terlalu bebas dalam memahami nilai-nilai ajaran agama sehingga kemudian mengabaikan bahkan meninggalkan teks. Menurut Lukman, liberalisme juga sama ekstremnya, sama berbahayanya. Karena itu, hendaknya agama dipahami dan diamalkan oleh seluruh bangsa dengan paham dan bentuk pengamalan yang moderat. Diharapkan agar mereka yang berada di dua kutub itu kembali ke tengah-tengah. Itulah moderat. (*kemenag.go.id*)

Menarik mencermati makna moderasi dari Lukman Hakim. Ia menegaskan apa yang disebutkan dengan moderasi adalah moderasi dalam beragama, bukan moderasi agama. Yang dimaksud moderasi adalah cara beragama secara moderat, lawan dari ekstrem. Beragama secara moderat tentu saja sesuai dengan esensi dari agama itu sendiri. Lukman menegaskan bahwa agama Islam adalah moderat. Islam sebagai sebuah ajaran itu pastilah moderat, tapi cara kita memahami ajaran ini yang bisa tergelincir atau terperosok pada paham ekstrem dalam memahami,” (Kompas.com - 13/07/2018, 22:38 WIB). Ia juga menegaskan pada dasarnya semua agama mengajarkan moderasi. Pasalnya Tuhan menurunkan agama melalui Nabi untuk untuk menjaga harkat dan martabat manusia yang harus kita lindungi sesuai dengan konteks kemanusiaan. Menurutnya, di Indonesia moderasi harus terus dilakukan karena pada dasarnya Indonesia memegang moderasi beragama sejak dulu. (NU Online, Rabu, 25 Juli 2018 19:30)

Dalam konteks agama Islam, ajaran mengenai moderasi beragama dapat dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah:143. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai “*ummatan wasathan* (umat pertengahan)”. *Ummatan wasathan* adalah umat yang mendapat petunjuk dari Allah SWT, sehingga bisa menjadi umat yang adil serta pilihan. Umat Islam diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan menenyapkan yang bathil. Sebagai *ummatan wasathan* mereka dalam segala persoalan hidup berada di tengah di antara orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya sehingga melupakan hak-hak ketuhanan dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua, karena sifatnya yang adil dan terpilih dan dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tengah. (Tafsir Kementerian Agama, aplikasi digital).

Menurut Masykuri Abdullah, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para intelektual Muslim dan pengamat lebih banyak menggunakan kata moderasi ini untuk sikap atau perilaku umat Islam dari pada untuk mensifati Islam. Masykuri lebih cenderung

pada penggunaan makna ini, karena kata *ummatan wasathan* pada QS. Al-Baqarah: 143 tersebut menunjukkan pengertian ini. Karena moderasi ini menekankan pada sikap, maka bentuk moderasi ini pun bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, karena pihak-pihak yang berhadapan dan persoalan-persoalan yang dihadapi tidak sama antara di satu negara dengan lainnya. Di negara-negara mayoritas Muslim, sikap moderasi itu minimal meliputi: pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. (<http://graduate.uinjkt.ac.id>).

Moderasi beragama menjadi modal penting dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama. Dengan mengimplementasikan moderasi beragama maka masing-masing pemeluk agama memberi penghormatan antara satu dengan lainnya, baik penghormatan prinsip-prinsip keyakinan, peribadatan maupun berbagai tradisi keberagamaan masing-masing agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Zainul. "Dialog Agama, Pluralitas Budaya Dan Visi Perdamaian." *Kompas*. Jakarta, 1997.
- Abdullah, M. Amin. "Etika Dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam." *Jurnal Ulumul Qur'an* IV, no. 4 (1993).
- . *Studi Agama, Normativitas Atau Historisitas*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdullah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Abdullah, Taufik (ed.). *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3S, 1989.
- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- . *Islam Yang Memihak*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Al-Faruqi, Ismail Raji (ed.). *Trialog Tiga Agama Besar: Yahudi, Kristen, Islam*. I. Surabaya: Pustaka Progressif, 1994.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an: Tex, Translation and Commentary*. USA: Anna Corporation, 1989.
- Ali, Mukti. *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

- . “Dialogue Between Muslims and Christians in Indonesia and Its Problems.” *Al-Jami’ah* IX, no. 4 (1970).
- . “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah Dan Misi.” In *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia Dan Belanda*. Jakarta: INIS, 1992.
- . *Lmu Perbandingan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 1990.
- . “Peranan Agama Di Dalam Pembangunan Nasional.” *Al Jami’ah* XV, no. 15 (1972): 22.
- . “Towards World Community Cooperation and Resource Mobilization.” *Al Jami’ah* XIII, no. 6 (1974).
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah*. Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Andito (ed). *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog “Bebas” Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Anwar, M. Syafi’i. *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- . “Sikap Politik Kepada Ahl Al-Kitab.” *Jurnal Ulumul Qur’an* IV, no. 4 (1993).
- Arkoun, Mohammed. *Rethinking Islam*. English: Westview Press, 1994.
- Azyumardi, Azra. “Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama: Perspektif Islam.” In *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Depag RI, 1997.
- Banawiratma. “Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik.” In *Dialog: Kritik & Identitas Agama*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effeni, Ahmad Wahib Dan Abdurrahman Wahid*. I. Jakarta: Paramadina, 1999.

- Daja, Burhanuddin. "Bingkai Teologi Kerukunan Beragama (Kembali Kepada Kitab Suci)." *Al-Jami'ah*, no. 59 (1996).
- . "Dakwah, Misi, Zending Dan Dialog Antar Agama Di Indonesia." In *70 Tahun H.A. Mukti Ali, Agama Dan Masyarakat*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- . *Dialog Antar Agama Dan Pembangunan*. Yogyakarta, 1999.
- . *Materi Kuliah Hubungan Antar Agama*, 1999.
- . *Perbandingan Agama: Suatu Paradigma Studi Strategis Dan Pembangunan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1995.
- . "State and Religious Harmony in Contemporary Indonesia." *Religiosa* I, no. 1 (1995).
- Dkk, Sumartana. *Dialog: Kritik Dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Effendi, Djohan. "Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan." *Prisma* VII, no. 5 (1978).
- . "Dimensi Moral Dan Etis Dalam Perjumpaan Islam-Kristen: Tinjauan Dari Sisi Islam." *Majalah Peninjau* XIII, no. 1+2 (1986).
- El-Fadl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: Serambi, 2003.
- . *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi, 2005.
- Eliade, Mircea (ed.). *The Encyclopedia of Religion*. 4th ed. New York: Macmillan Publishing Company, n.d.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Giddens, Anthony. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Guillaume, A. *The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*. Karachi: Oxford University Press, 1970.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Tintamas, 1984.

- Hanafi, Hassan. *Islamologi: Dari Teologi Statis Ke Anarkis*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hart, Michael H. *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*. XII. Jakarta: Pustaka Jaya, 1990.
- Hasyim, Umar. *Toleransi Dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, n.d.
- Hidayat, Komaruddin. "Agama Untuk Kemanusiaan." In *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog "Bebas"Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF. (ed.). "Lingkup Dan Metodologi Studi Agama-Agama." In *Passing Over, Melintasi Batas Agama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Paramadina, 1998.
- Huntington, Samuel P. "Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?" *Jurnal Ulumul Qur'an* IV, no. 5 (1993).
- Kleden, Ignas. "Agama Dan Perubahan Sosial." In *Agama Dan Tantangan Zaman*. Jakarta: LP3S, 1985.
- Kung, Hans and Karl-Josef Kuschel (ed.). *A Global Ethic*. New York: Continuum, 1993.
- Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu: Metodologi Dan Etika*. Jakarta: Penerbit Teraju, 1998.
- . *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1998.
- L, Johannes. "Bung Natsir: Menghadang Konflik, Membangun Toleransi." *Majalah Filsafat Driyarkara XXII No. 5*, n.d.
- Ligoy CP, A. "Gereja Indonesia Dan Dialog Antar Agama." *Majalah Rohani*, 1997.
- Madjid, Nurcholish. "Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang." *Jurnal Ulumul Qur'an* IV, no. 1 (1993).

- . “Dialog Agama-Agama Dalam Perspektif Universalisme Al-Islâm.” In *Passing Over, Melintasi Batas Agama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Paramadina, 1998.
- . “Hubungan Antar Umat Beragama : Antara Ajaran Dan Kenyataan.” In *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia (Beberapa Permasalahan)*. VII. Jakarta: INIS, 1990.
- . *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Marse, Syamsuhadi. *Pedoman Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Balitbang Depag RI, 1990.
- Mas’udi, Masdar F. “Agama Dan Dialognya.” In *Dialog: Kritik & Identitas Agama*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- . “Paradigma Dan Metodologi Islam Emansipatoris.” In *Islam Emansipatoris: Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*. Jakarta: P3M, 2004.
- Morgan, Kennet W. *Islam Jalan Lurus*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1963.
- Mughni, Syafiq A. “Berpikir Holistik Dalam Studi Islam.” In *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Jakarta: IRCiSoD, 2012.
- Muhaimin. *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2012.
- Mulder, D.C. “Pengalaman-Pengalaman Mengenai Dialog Agama: Dari Dewan Gereja-Gereja Dunia.” *Majalah Gema Duta Wacana*, 1994.
- . “Perkembangan Dialog Antar Agama Di Dunia Modern.” In *Dialog: Kritik Dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Mulkhan, Munir. “Agama Dalam Dialog Budaya.” In *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog “Bebas” Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Nadjib, Emha Ainun. “Dialog Antar Agama Dan Batas-Batasnya.” In *Dialog: Kritik & Identitas Agama*, 1993.
- Nasution, Chotijah. *Sejarah Dan Perkembangan Dakwah Islam*. Yogyakarta: Idea Offset, 1978.

- Natsir, M. *Islam Dan Kristen Di Indonesia*. IV. Jakarta: Media Dakwah, 1988.
- Natsir, Mohammad. *Mencari Modus Vivendi Antar Ummat Beragama*. Jakarta: Media Dakwah, 1980.
- Natsir, Mohd. *Keragaman Hidup Antar Agama*. II. Djakarta: Penerbit Hudaya, 1970.
- Nitiprawiro, Wahono. *Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis, Dan Isinya*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Nuhrison. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Balitbang Depag RI, 1997.
- Pignedolli, Kardinal Sergio. "Dasar Pemikiran." In *Triolog Tiga Agama Besar; Yahudi, Kristen, Islam*. I. Surabaya: Pustaka Progressif, 1994.
- Qodir, Zuly. *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam Di Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Rahman, Budhy Munawar. "Agama, Modernitas Dan Pluralisme Bangsa." In *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog "Bebas"Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- . "Kesatuan Transenden Dalam Teologi: Perspektif Islam Tentang Kesamaan Agama-Agama." In *Dialog: Kritik & Identitas Agama*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Rasjidi, M. "Pidato Musyawarah Antar Agama 30 Nopember 1967 Di Jakarta." *Al-Djami'ah* VIII, no. Mei (1968).
- Shadily, Hassan (red.). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1989.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. VII. Bandung: Mizan, 1999.
- Sills, David L (ed.). *International Encyclopedia of the Social Science*. 7th ed. London: The Macmillan Company & The Free Press, 1968.
- Sjalabi, A. *Sedjarah Dan Kebudajaan Islam*. Djakarta: Djajamurni, 1970.

- Suaedy, Ahmad. "Agama, Spiritualitas Baru Dan Keadilan: Perspektif Islam." In *Spiritualitas Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1994.
- Subhan, Arief. "Ilmu Perbandingan Agama: Ketegangan Antara Dialog Dan Dakwah." *Jurnal Ulumul Qur'an* IV, no. 4 (1993).
- Sudjangi. *Profil Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Di Indonesia: Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama*. Jakarta: Balitbang Depag RI, 1999.
- Sumartana, Th. *Dialog: Kritik Dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Sunardi, St. "Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama." In *Dialog: Kritik Dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Sutrisno, Mudji. "Pengantar." In *Cendekiawan Antara Budaya Dan Politik Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Yayasan Obor, 1996.
- Swidler, Leonard. "The Dialogue Decalogue: Ground Rules for Interreligious, Interideological Dialogue." *Al-Jami'ah*, no. 57 (1994).
- Thaher, Tarmizi. "Kerukunan Hidup Umat Beragama Dan Studi Agama-Agama Di Indonesia." In *Studi Agama-Agama Di Perguruan Tinggi, Bingkai Sosio-Kultural Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Depag RI, 1999.
- Tibi, Bassam. "Moralitas Internasional Sebagai Landasan Lintas Budaya." In *Agama Dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996.
- Titus, Harold (dkk). *Persoalan-Persoalan Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Utama, Ignatius L. Madya SJ. "Dialog Kehidupan Sebagai Cara Menjadi Gereja." *Majalah Rohani*. Yogyakarta, 1997.
- Waardenburg, Jacques. "Critical Issues in Muslim-Christian Relations: Theoretical, Practical, Dialogical, Scholarly." *Islam and Christian-Muslim Relations* 8, no. 1 (1997).

- . “Critical Issues in Muslim-Christian Relations: Theoretical, Practical, Dialogical, Scholarly.” *Jurnal Islam and Christian-Muslim Relations* 8, no. 1 (1997).
- Wahid, Abdurrahman. “Dialog Agama Dan Masalah Pendangkalan Agama.” In *Passing Over, Melintasi Batas Agama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Paramadina, 1998.
- . *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- . *Muslim Di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Lapenas, 1981.
- . “Pengantar.” In *Agama, Ideologi Dan Pembangunan*. Jakarta: P3M, 1991.
- Watt, W.Montgomery. *Muhammad at Medina*. London: Oxford University Press, 1956.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Yuwono, M. “Menuju Dialog Muslim-Kristen (Katolik) Di Indonesia.” *Majalah Rohani*, 1981.